

**PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL TBK.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2017 DAN 2016/
*31 DECEMBER 2017 AND 2016***

Lampiran /
Attachment

Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Director's Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	2	<i>Consolidated Statement of Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5	<i>Notes to Consolidated Financial Statement</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTORS' STATEMENT REGARDING**

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

**RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS AS AT
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016**

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kenneth Raymond Allan
Alamat kantor : Menara Merdeka lantai 30
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2,
Jakarta 10110, Indonesia
Telepon : (021) 2957-3737
Jabatan : Direktur

Nama : Vera Likin
Alamat kantor : Menara Merdeka lantai 30
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2,
Jakarta 10110, Indonesia
Telepon : (021) 2957-3737
Jabatan : Direktur

On behalf of the Board of Directors, the undersigned:

Name : Kenneth Raymond Allan
Office address : Menara Merdeka 30th floor
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2,
Jakarta 10110, Indonesia
Telephone : (021) 2957-3737
Position : Director

Name : Vera Likin
Office address : Menara Merdeka 30th floor
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2,
Jakarta 10110, Indonesia
Telephone : (021) 2957-3737
Position : Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. dan entitas anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. and subsidiaries (the "Group");

2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

3. a. All information in the Group's consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The Group's consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit material information or material facts; and

4. We are responsible for the Group's internal control systems.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi.

For and on behalf of the Board of Directors.

Kenneth Raymond Allan
Direktur/Director



Vera Likin
Direktur/Director

JAKARTA
14 Juni 2018

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Laporan No.: 103/BLEM/VI/2018
**Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi**
PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
Report No.: 103/BLEM/VI/2018
**The Shareholders, Board of Commissioners
and Directors**
PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk and subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2017 the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion

Keeefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis untuk opini wajar dengan pengecualian

Untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh Kelompok Usaha, entitas anak, PT Asmin Koalindo Tuhup ("AKT"), mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perjanjian perdamaian (homologasi) ditandatangani tanggal 29 Maret 2016 yang kemudian disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga tanggal 4 April 2016. Berdasarkan perjanjian perdamaian ini, kewajiban perusahaan sebesar AS\$ 1 miliar wajib dibayarkan mulai bulan ketujuh hingga tahun kesembilan sejak perjanjian perdamaian menjadi berkekuatan hukum tetap. Pada tanggal 31 Desember 2017, liabilitas jangka pendek Kelompok Usaha melebihi aset lancarnya sebesar AS\$ 538 juta. Kondisi-kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Kelompok Usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Sesuai dengan yang diungkapkan pada Catatan 17, AKT sedang mengajukan banding sehubungan dengan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan permohonan banding dan beberapa SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang terbit sampai dengan tanggal laporan ini, AKT mencatat adanya kelebihan bayar pajak sebesar AS\$ 45 juta dan pendapatan lain-lain pada tahun 2016 sebesar AS\$ 94 juta yang menjadi bagian dari saldo awal ekuitas tahun 2017.

Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian, pada 8 Maret 2017, Kelompok Usaha menandatangani perjanjian penyelesaian hutang dengan kreditor utamanya, Standard Chartered Bank. Perjanjian tersebut mengatur tentang hal-hal yang meliputi kewajiban yang harus dibayar oleh Kelompok Usaha dan jangka waktu pelunasan kewajiban tersebut.

Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 2s Kelompok Usaha belum memperhitungkan kewajiban imbalan pasca kerja untuk tahun berjalan.

on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Basis for qualified opinion

As the response to a potential liquidity issue, its subsidiary, PT Asmin Koalindo Tuhup ("AKT"), voluntarily filed a Suspension of Debt Payments ("PKPU") with the Commercial Court at Central Jakarta District Court. A composition plan was entered into between AKT and its creditors on March 29, 2016 and was approved by the appointed Panel of Judges of the Commercial Court on April 4, 2016. In accordance with the terms of the composition plan, liabilities amounted to US\$ 1 billion become payable over the period between the seventh month up to the ninth anniversary of the date the composition plan becomes legally final and binding. As at December 31, 2017, the Group's current liabilities exceeds its current assets amounting by US\$ 538 million. These conditions indicate the existence of a material uncertainty which may cast significant doubt about the Group's ability to continue as a going concern.

As disclosed in Note 17, AKT is pursuing appeals on some of its tax disputes with the tax office. Pursuant to the appeals and the underlying assessments issued until the date of this report, AKT records a tax overpayment of US\$ 45 million and other income in 2016 amounted to US\$ 94 million as part of the beginning balance of equity in 2017.

As disclosed in Note 36 to the consolidated financial statements, on 8 March 2017, the Group and its major bank creditor, Standard Chartered Bank, entered into a loan settlement agreement which sets out the terms, including the agreed timing, of the full settlement of the entire outstanding debt owing to the bank.

As disclosed in Note 2s, the Group has not accounted for any post employment benefit obligations for the current year.

Opini wajar dengan pengecualian

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini Wajar dengan pengecualian, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dan Entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasianya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami menekankan bahwa, sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 2a atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, pada tanggal 31 Desember 2017, Kelompok Usaha mengalami defisiensi modal, dan total liabilitas jangka pendek Kelompok Usaha telah melampaui total asetnya. Kondisi tersebut, bersama dengan hal-hal lain sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2a atas laporan keuangan konsolidasian, mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Kelompok Usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup penyesuaian yang mungkin harus dilakukan yang berasal dari kondisi tersebut.

Seperti diungkapkan dalam Catatan 30 atas laporan keuangan konsolidasian, Kelompok Usaha mempunyai liabilitas kontinjenji berupa berbagai tuntutan dari pihak ketiga yang timbul dari transaksi bisnis normal.

Hal lain

Sesuai yang diungkapkan pada pada Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian, Kementerian ESDM Republik Indonesia mengeluarkan putusan untuk mencabut izin kontrak karya (PKP2B) AKT. Atas putusan tersebut, AKT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan telah menganulir surat dari Kementerian ESDM tersebut.

Qualified opinion

In our opinion, except for the effects of the matter described in the basis for qualified opinion paragraph, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the Consolidated financial position of PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2017, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

We draw attention to Note 2a to the accompanying consolidated financial statements which describes that as of December 31, 2017, the Group has a capital deficiency, and its total current liabilities have exceeded its total assets. These conditions, along with other matters as set forth in Note 2a to the consolidated financial statements, indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the Group's ability to continue as a going concern. The consolidated financial statements do not include any adjustment that might result from the outcome of this uncertainty.

As disclosed in Note 30 to the consolidated financial statements, the Group is contingently liable for various claims from third parties arising from the ordinary conducts of its business.

Other matters

As disclosed in Note 36 to the consolidated financial statements, the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia issued a decree to revoke AKT's contract of work (CCoW). AKT challenged the decree through the State Administrative Court of Jakarta and, to this end, the Court has annulled the said decree.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
GIDEON ADI & REKAN**



Gideon Adi Siallagan, M.Acc, CA., CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 460 / Public Accountant Registration No. AP. 460

14 Juni 2018 / June 14, 2018

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars,
except for par value and share data)

Catatan /Notes	2017	2016	
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	26,891,688	<i>Cash and cash equivalents</i>
Kas di bank yang dibatasi Penggunaannya	5	22,875	<i>Restricted cash in bank</i>
Piutang usaha - Pihak ketiga	6	57,683,070	<i>Trade receivables - Third parties</i>
Uang muka dan pembayaran dimuka, bagian lancar - Pihak ketiga	7	75,742,935	<i>Advances and payments, current portion - Third party - Inventories</i>
Persediaan	8	129,889,122	
Pajak dibayar di muka, bagian lancar	17a	54,393,898	<i>Prepaid tax, current portion</i>
Jumlah Aset Lancar		<u>344,623,588</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Pajak dibayar dimuka, dikurangi bagian lancar	17a	-	<i>Prepaid tax, net of current portion</i>
Aset pajak tangguhan	17d	125,293,119	<i>Deferred tax assets</i>
Aset tetap	10	270,647,787	<i>Fixed assets</i>
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan	9	112,202,668	<i>Deferred exploration and development expenditure</i>
Properti pertambangan	11	136,312,855	<i>Mining properties</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>644,456,429</u>	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		<u>989,080,017</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 1/2 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dinyatakan dalam Dolar AS,
kecuali nilai nominal dan data saham)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF

FINANCIAL POSITION

31 DECEMBER 2017 AND 2016

(Expressed in US Dollars,
except for par value and share data)

	Catatan /Notes	2017	2016	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - Pihak ketiga	12	12,212,944	4,643,779	Trade payables - Third parties
Beban yang masih harus dibayar	13	13,031,634	13,386,703	Accrued expenses
Utang pajak:				Tax payable:
- Pajak penghasilan badan	17b	-	-	Corporate income tax -
- Pajak lainnya	17b	-	7,826	Other taxes -
Saldo transaksi rekening koran pihak berelasi	27a	94,782,786	78,098,640	Related-party current account balance
Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang:				Current maturity of long-term borrowings:
- Utang sewa pembiayaan	15	-	1,493,553	Finance lease payables -
- Pinjaman	14	<u>762,820,315</u>	<u>760,820,313</u>	Borrowings -
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>882,847,679</u>	<u>858,450,814</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang yang telah direstrukturisasi	16	813,817,532	813,817,532	Restructured debt
Liabilitas pajak tangguhan	17d	585,339	1,390,993	Deferred tax liabilities
Kewajiban jangka panjang setelah dikurangi bagian lancar:				Long-term borrowings net of current maturity:
- Utang sewa pembiayaan	15	3,221,549	2,881,232	Finance lease payables -
Penyisihan reklamasi dan penutupan tambang				Provision for reclamation and mine closure
Penyisihan imbalan karyawan				Provision for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>822,225,766</u>	<u>823,063,687</u>	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>1,705,073,445</u>	<u>1,681,514,501</u>	TOTAL LIABILITIES
(DEFISIENSI EKUITAS)/ EKUITAS				(DEFICIENCY IN EQUITY)/ EQUITY
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent
Modal saham-modal dasar				
53.080.000.000 lembar saham, ditempatkan dan disetor penuh				Share capital-authorized
17.693.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per saham Rp.100				53,080,000,000 shares, issued and fully paid
Premi saham	18	196,714,032	196,714,032	at par value of Rp.100
Saham simpanan	19	517,679,733	517,679,733	Share premium
		(8,380,461)	(8,380,461)	Treasury shares
(Akumulasi rugi)/saldo laba				(Accumulated losses)/retained earnings
- Dicadangkan	20	138,079,672	138,079,672	Appropriated -
- Tidak dicadangkan		<u>(1,560,084,143)</u>	<u>(1,594,406,245)</u>	Unappropriated -
		<u>(715,991,167)</u>	<u>(750,313,269)</u>	
Kepentingan non pengendali		(2,261)	(3,719)	Non-controlling interest
JUMLAH DEFISIENSI EKUITAS		<u>(715,993,428)</u>	<u>(750,316,988)</u>	TOTAL DEFICIENCY IN EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN DEFISIENSI EKUITAS		<u>989,080,017</u>	<u>931,197,513</u>	TOTAL LIABILITIES AND DEFICIENCY IN EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam Dolar AS)**

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE PERIODS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in US Dollars)**

	Catatan/ Notes	2017	2016	
Penjualan bersih (Beban) pokok penjualan	21 22	241,774,069 <u>(151,099,385)</u>	133,616,667 <u>(43,808,813)</u>	Net sales (Cost) of goods sold
Laba bruto		90,674,684	89,807,854	Gross profit
(Beban) penjualan dan pemasaran	23	(9,026,741)	(6,495,698)	<i>Selling and marketing (expenses)</i>
(Beban) umum dan administrasi	24	(21,885,783)	(9,716,043)	<i>General and administration (expenses)</i>
Pendapatan/(bebani) lain-lain, bersih	25,26	<u>(6,169,965)</u>	<u>110,465,200</u>	<i>Other income/(expenses), net</i>
		<u>(37,082,489)</u>	<u>94,253,459</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan		53,592,195	184,061,313	Profit before income tax
(Beban) pajak penghasilan	17c	<u>(19,268,635)</u>	<u>(25,126,139)</u>	<i>Income tax (expense)</i>
Laba bersih tahun berjalan		34,323,560	158,935,174	Net income for the year
(Rugi) komprehensif lain		-	(43,916)	Other comprehensive (loss)
Laba komprehensif tahun berjalan		34,323,560	158,891,258	Total comprehensive income for the year
Laba bersih yang diatribusikan kepada:				Net income attributable to:
- Pemilik entitas induk		34,322,102	158,932,932	<i>Owners of the parent -</i>
- Kepentingan nonpengendali		1,458	2,242	<i>Non-controlling interest -</i>
		34,323,560	158,935,174	
Laba komprehensif yang diatribusikan kepada:				Comprehensive income attributable to:
- Pemilik entitas		34,322,102	158,889,016	<i>Owners of the parents -</i>
- Kepentingan nonpengendali		1,458	2,242	<i>Non-controlling interest -</i>
		34,323,560	158,891,258	
Laba bersih per saham dasar dan dilusian (nilai penuh)	28	0.002	0.009	Basic and diluted profit per share (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 3 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam Dolar AS)**

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in US Dollars)**

*Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/
Attributable to owners of the parent*

	Catatan/ Notes	(akumulasi rugi)/ saldo laba/ (Accumulated loss)/ retained earnings						Kepenti- ngan non pengen- dali/ Non- control- ling interest	Jumlah (defisiensi ekuitas)/ <i>Total</i> (Deficiency In equity)/ Equity	<i>Balance as at January 1, 2016</i> <i>Comprehensive loss for the year</i>
		Modal saham/ Share capital	Premi saham/ Share premium	Saham simpanan/ Treasury shares	Dicadangkan/ Appropriated	Tidak dicadangkan/ Unappropriated	Jumlah/ Total			
Saldo 1 Januari 2016 Rugi komprehensif tahun Berjalan	20,21,22	196,714,032	517,679,733	(8,380,461)	138,079,672	(1,753,295,261)	(909,202,285)	(5,961)	(909,208,246)	<i>Balance as at January 1, 2016</i> <i>Comprehensive loss for the year</i>
Saldo 1 Januari 2017 / 31 Desember 2016		196,714,032	517,679,733	(8,380,461)	138,079,672	(1,594,406,245)	(750,313,269)	(3,719)	(750,316,988)	<i>Balance as at January 1, 2017 /December 31, 2016</i> <i>Comprehensive income for the year</i>
Rugi komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	34,322,102	34,322,102	1,458	34,323,560	
(Rugi)/laba saldo 31 Desember 2017		196,714,032	517,679,733	(8,380,461)	138,079,672	(1,560,084,143)	(715,991,167)	(2,261)	(715,993,428)	<i>(Loss)/profit balance as at December 31, 2017</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam Dolar AS)**

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in US Dollars)**

	2017	2016	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan	232,786,005	101,245,618	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok untuk kepentingan produksi	(143,448,648)	(93,001,452)	Payments to suppliers related to production
Pembayaran kepada pemasok untuk keperluan operasional non produksi	(20,681,481)	(15,753,761)	Payments to suppliers not related to production
Pembayaran sehubungan dengan karyawan	(14,875,102)	(12,110,677)	Payments related to employees
Pembayaran kepada Pemerintah	(35,791,886)	(11,123,868)	Payments to Governments
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	17,988,888	(30,744,140)	Net cash flows used in provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Penempatan kas di bank yang dibatasi penggunaanya	-	(254)	Placement of restricted cash in banks
Penerimaan dari kas di bank yang dibatasi penggunaannya	277	65,215	Proceeds from restricted cash in banks
Pembayaran pembelian aset tetap	(12,359,310)	(44,195)	Payment for purchase of fixed assets
Penerimaan atas penjualan aset tetap	-	526,938	Proceeds from sale of fixed assets
Pemberian pinjaman kepada pihak berelasi	-	-	Loan provided to related parties
Penerimaan atas pinjaman kepada pihak berelasi	16,684,145	70,666,515	Receipts from loan for related parties
Pembayaran untuk biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan	-	(31,275)	Payments for deferred exploration and development expenditure
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	4,325,112	71,182,944	Net cash flows used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Pembayaran pinjaman	-	(39,942,685)	Repayments of borrowings
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(76,480)	-	Payments for leases
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(76,480)	(39,942,685)	Net cash flows (used in)/provided from financing activities
Penurunan bersih kas dan setara kas	22,237,520	496,119	Net decrease in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	4,654,168	4,158,049	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	26,891,688	4,654,168	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan informasi lainnya

PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 15 Maret 2006 berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H. No. 109 tanggal 15 Maret 2006. Akta pendirian Perusahaan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-09502 HT.01.01.TH.2006 tanggal 3 April 2006. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Diantaranya perubahan berikut ini yang dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 28 tanggal 25 Agustus 2010 dan No. 39 tanggal 16 Desember 2010, keduanya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang memuat tentang perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, perubahan nama Perusahaan yang semula bernama PT Borneo Lumbung Energi menjadi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk., pemecahan nilai nominal saham dari Rp10.000 menjadi Rp100 per lembar saham, menerbitkan saham baru sebanyak 4.423.000.000 lembar saham, meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp500 miliar menjadi Rp5.308 miliar, mengubah susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dan untuk penyesuaian dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. IX.J.1. Akta No. 28 tanggal 25 Agustus 2010 telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-43248.AH.01.02.TH.2010 tanggal 2 September 2010. Sedangkan Akta No. 39 tanggal 16 Desember 2010, telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.10-33018 tanggal 23 Desember 2010.

Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan terakhir ditetapkan berdasarkan Akta Notaris No. 30 tanggal 16 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63806.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 5 Desember 2013.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment of the Company and other information

PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. (the "Company") was established on 15 March 2006 based on Notarial Deed of Sutjipto, S.H. No. 109 dated 15 March 2006. The Company's Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia via Decree No. C-09502 HT.01.01.TH.2006 dated 3 April 2006. The Company's Articles of Association have been amended several times. Among others the following amendments which were implemented based on Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H. No. 28 dated 25 August 2010 and No. 39 dated 16 December 2010, to change the status of the Company from a private company to a public company, to change the Company's name from PT Borneo Lumbung Energi to PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk., to conduct a stock split from Rp10,000 to Rp100 per share, to issue 4,423,000,000 new shares, to increase the Company's authorised capital from Rp500 billion to Rp5,308 billion, to approved the changes to the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners, and to conform with Capital Market and Financial Institution ("Bapepam-LK") regulation No. IX.J.1. Deed No. 28 dated 25 August 2010 has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced by Decree No. AHU-43248.AH.01.02.TH.2010 dated 2 September 2010. Moreover, deed No. 39 dated 16 December 2010 has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as evidenced by notification and acceptance Letter No. AHU-AH.01.10-33018 dated 23 December 2010.

The latest composition of the Board of Directors and Board of Commissioners was established based on the Notarial Deed of Notary Fathiah Helmi, S.H. No. 30 dated 16 October 2013 which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by Decree No. AHU-63806.AH.01.02.Tahun 2013 dated 5 December 2013.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anaknya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

Entitas pengendali utama adalah PT Republik Energi & Metal ("REM"), sebuah perusahaan yang didirikan di dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.

Perusahaan mulai mengoperasikan penambangan batubara secara komersial melalui anak perusahaan pada tanggal 15 September 2009. Lokasi penambangan Perusahaan berada di Kecamatan Muara Laung dan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Perusahaan berkantor pusat di Menara Merdeka lantai 30, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta Pusat 10110, Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa. Jasa yang dimaksudkan termasuk jasa konsultasi bisnis, jasa konsultasi pertambangan, jasa konsultasi teknik engineering dan jasa lainnya yang mendukung kegiatan pertambangan dan perdagangan barang tambang. Entitas anak bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara dan aktivitas lainnya yang terkait.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Silvanus Yulian Wenas	:	President Commissioner
Komisaris Independen	:	Soesanto Loekman	:	Independent Commissioner

Direktur	:	Kenneth Raymond Allan	:	Director
Direktur	:	Nenie Afwani	:	Director
Direktur	:	Vera Likin	:	Director

Susunan komite audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Soesanto Loekman	:	Chairman
-------	---	------------------	---	----------

Pada tanggal 31 Desember 2017, Grup mempekerjakan 1,468 karyawan (2016: 1,542 karyawan).

1. GENERAL INFORMATION (continued)

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group".

The immediate parent entity is PT Republik Energi & Metal ("REM"), a company incorporated in and under the Laws of the Republic of Indonesia.

The Company commenced its commercial coal mining operations through a subsidiary on 15 September 2009. The Company's mine site is located in the Muara Laung and Barito Tuhup Raya Sub-districts, Murung Raya Regency, Central Kalimantan. The Company's head office is located at Menara Merdeka 30th floor, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Central Jakarta 10110, Indonesia.

In accordance with Article 3 of its Articles of Association, the Company is established to conduct business in trading, construction, mining, transportation and services. The term service includes business consultation, mining consultation, technical engineering consultation and other services that support mining operations and trading. The Company's subsidiaries are engaged in coal mining and related activities.

As at 31 December 2017 and 2016, the Company's Board of Commissioners and Directors were as follows:

Komisaris Utama	:	Silvanus Yulian Wenas	:	President Commissioner
Komisaris Independen	:	Soesanto Loekman	:	Independent Commissioner

Direktur	:	Kenneth Raymond Allan	:	Director
Direktur	:	Nenie Afwani	:	Director
Direktur	:	Vera Likin	:	Director

The composition of the Company's audit committee as at 31 December 2017 and 2016 was as follows:

Ketua	:	Soesanto Loekman	:	Chairman
-------	---	------------------	---	----------

As at 31 December 2017, the Group employed employees 1,468 (2016: 1,542 employees).

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan

Pada tanggal 16 November 2010, Perusahaan menerima Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Bapepam-LK dengan suratnya No. S-10407/BL/2010 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp1.170 per lembar saham atas 4.423.000.000 lembar saham, atau 25% dari keseluruhan 17.693.000.000 lembar saham Perusahaan yang ditempatkan dan disetor penuh. Pada tanggal 26 November 2010, saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Saham Perdana dicatatkan di Bursa Efek Indonesia bersamaan dengan pencatatan 13.270.000.000 lembar saham pendiri, sehingga jumlah seluruh saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia menjadi 17.693.000.000 lembar.

c. Struktur Grup

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, struktur Grup adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Initial Public Offering of the Company's Shares

On 16 November 2010, the Company obtained a Notice of Effectiveness from the Chairman of Bapepam-LK via letter No. S-10407/BL/2010 for the Company to conduct its Initial Public Offering for offering to and subscription by the public at an offering price of Rp1,170 per share of 4,423,000,000 shares, or 25% of the total of 17,693,000,000 of the Company's issued and fully paid shares. The shares offered to the public in the Company's Initial Public Offering were listed with the Indonesia Stock Exchange on 26 November 2010. At the same time, the Company on behalf of its founding shareholders also listed the entire 13,270,000,000 founder shares, which resulted in the entire 17,693,000,000 of the Company's shares being listed on the Indonesia Stock Exchange.

c. Group structure

As at 31 December 2017 and 2016, the structure of the Group was as follows:

Entitas anak/ Subsidiaries	Aktivitas bisnis/ Business Activity	Lokasi usaha/ Location	Tahun operasi komersial/ year of commercial operation	Percentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)		Total asset sebelum eliminasi (dalam ribuan AS\$)/ Total assets before elimination (in thousands of US\$)	
				31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	31 Desember / December 2017	31 Desember/ December 2016
<u>Entitas anak melalui kepemilikan langsung/Directly owned subsidiaries</u>							
PT Asmin Koalindo Tuhup ("AKT")	Pertambangan batu bara/ Coal mining	Kalimantan Tengah/ Central Kalimantan	2009	99,99	99,99	838,574	806,278
PT Borneo Mining Services ("BMS")	Penyewaan Alat berat/ Heavy Equipment Rental	Kalimantan Tengah/ Central Kalimantan	2009	99,99	99,99	220,510	152,805
Borneo Bumi Energy & Metal Pte Ltd ("Borneo Bumi")	Investasi/ investment	Singapura/ Singapore	2011	100,00	100,00	-	-

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

AKT

AKT, sebelumnya PT Swabara Guna, didirikan pada tanggal 11 September 1992 berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 dan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, No. 52 tanggal 11 September 1992. Akta pendirian AKT disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-4105.HT.01.01.TH.93 tanggal 3 Juni 1993, dan telah diterbitkan dalam Tambahan No. 4418 Berita Acara Negara Republik Indonesia No. 76 pada tanggal 21 September 1993. Perubahan nama menjadi AKT terjadi pada tanggal 25 Februari 1998.

Anggaran Dasar AKT telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir kali berdasarkan Akta Notaris No.1 tanggal 4 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, untuk merubah pasal 14 mengenai kewenangan Direksi. Akta ini telah dilaporkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-AH.01.10-01437 tanggal 22 Januari 2013.

AKT berusaha di bidang pertambangan batubara, dan mulai periode operasinya pada tanggal 15 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Menteri ESDM") No. 375/K.30/DJB tertanggal 15 September 2009. Lokasi operasi dimulai dan difokuskan pada blok Kohong.

Kantor pusat AKT berlokasi di Menara Merdeka lantai 29, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110, Indonesia.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

AKT

AKT, formerly PT Swabara Guna, was established on 11 September 1992 under the framework of Domestic Capital Investment Law No. 6 of 1968, as amended by Law No. 12 of 1970 and by Notarial Deed No. 52 of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, dated 11 September 1992. AKT's Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia via Decree No. C2-4105.HT.01.01.TH.93, dated 3 June 1993, and published in Supplement No. 4418 of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 76 on 21 September 1993. AKT changed to its current name on 25 February 1998.

The Articles of Association of AKT have been amended several times with the most recent change based on Notarial Deed No. 1 dated 4 January 2013, drawn up before Dini Lastari Siburian, S.H., notary in Jakarta, for the purpose of amending Article 14 regarding Director's authority. This amendment has been reported to the Minister of Law and Human Rights via Decree No. AHU-AH.01.10-01437 dated 22 January 2013.

AKT is engaged in the coal mining sector, and commenced its operating period on 15 September 2009 by virtue of Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources ("MoEMR") No. 375/K.30/DJB dated 15 September 2009. Initial production comes from, and is focused on the Kohong block.

AKT registered office is located at Menara Merdeka 29th floor, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110, Indonesia.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

BMS

BMS didirikan pada tanggal 4 Agustus 2006 berdasarkan Akta Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. No. 03. Anggaran Dasar BMS disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-24799.HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan diterbitkan dalam Tambahan No. 45 dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7735 tanggal 3 Juni 2008. Akta pendirian BMS telah mengalami beberapa kali perubahan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Perubahan terakhir Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 14 Mei 2008 dibuat di hadapan Muchlis Pathanha, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-33475.AH.01.02.TH.2008 tanggal 16 Juni 2008.

BMS bergerak dalam bidang jasa pertambangan batubara termasuk sewa alat berat, jasa manajemen pertambangan dan jasa-jasa pertambangan lainnya. BMS memulai operasi komersialnya di bulan Januari 2009.

Kantor BMS berlokasi di Menara Merdeka lantai 29, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110, Indonesia.

d. Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B")

Pada tanggal 31 Mei 1999, AKT dan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") menandatangani PKP2B generasi ketiga. Berdasarkan ketentuan PKP2B tersebut, AKT bertindak sebagai kontraktor Pemerintah, dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan pertambangan di area yang berlokasi di Kecamatan Murung Raya, Kabupaten Muara Teweh, Kalimantan Tengah, Indonesia. Area yang dicakup PKP2B tersebut pada awalnya seluas 40.610 hektar namun telah dikurangi menjadi 21.630 hektar akibat dari pelepasan area sebagaimana diatur dalam ketentuan PKP2B yang dimaksud.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM No. 375/K.30/DJB, AKT memulai periode operasi 30 tahunnya sejak 15 September 2009 dengan dimulainya produksi pada blok Kohong.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

BMS

BMS was incorporated on 4 August 2006 based on Notarial Deed No. 03 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. The Articles of Association of BMS were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia via Decree No. C-24799.HT.01.01.TH.2006 dated 24 August 2006, and published in Supplement No. 45 of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 7735 dated 3 June 2008. The Articles of Association of BMS have been amended several times to conform with Law No. 40/2007 regarding Limited Liability Companies, changes in the composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders. The last amendment to the Articles of Association was effected by Notarial Deed No. 19 dated 14 May 2008, drawn up before Muchlis Pathanha, S.H., notary in Jakarta. This deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia via Decree No. AHU-33475.AH.01.02.TH.2008 dated 16 June 2008.

BMS is engaged in providing coal mining services, including heavy equipment rental, mine management services and other related mining services. BMS commenced its commercial operations in January 2009.

BMS registered office is located at Menara Merdeka 29th floor, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110, Indonesia.

d. Coal Contract of Work ("CCoW")

On 31 May 1999, AKT entered into a third generation CCoW with the Government of the Republic of Indonesia (the "Government"). Under the terms of the CCoW, AKT is appointed as the contractor of the Government, in respect of coal exploration and mining in an area located in Murung Raya, Muara Teweh Regency, Central Kalimantan, Indonesia. The area covered by AKT's CCoW initially comprised 40,610 hectares, but this has been reduced to 21,630 hectares pursuant to the relinquishment requirements under the CCoW.

By virtue of Decree of the MoEMR No. 375/K.30/DJB, AKT commenced its 30-year operating period on 15 September 2009 with initial coal production in the Kohong block.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Sebagaimana diatur dalam PKP2B yang bersangkutan, Pemerintah berhak atas 13,5% dari batubara yang diproduksi. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75/1996 tanggal 25 September 1996, AKT diharuskan untuk menyerahkan bagian 13,5% atas hak Pemerintah (biasanya disebut sebagai "royalti kepada Pemerintah") dalam bentuk tunai.

AKT membukukan 100% pendapatan yang diperoleh dari penjualan batubara, dan mencatat royalti yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai bagian dari beban pokok penjualan.

Pemerintah tetap berkeras agar AKT CCoW/PKP2B harus diubah agar sesuai dengan UU Pertambangan tahun 2009 dan prosesnya terus berlanjut. AKT telah menandatangani beberapa klausul revisi dan menunggu kata-kata definitif sebelum membahas amandemen lain yang disarankan (perpajakan/pendapatan pemerintah, dan divestasi).

Reklamasi

AKT telah menempatkan bank garansi sejak tahun 2012 untuk menjamin jumlah dana Reklamasi yang dibutuhkan (sesuai perhitungan ESDM). Berdasarkan reklamasi tahunan AKT, berbagai jumlah telah dihitung kembali sehingga jumlah total jaminan bank saat ini setara dengan jumlah saldo reklamasi saat ini yang harus ditutup sekitar Rp28.094.745.012 (setara dengan AS\$2.073.719).

Kewajiban Pasar Dalam Negeri

Kewajiban Pasar Domestik ("DMO") tercantum di dalam CCoW/PKP2B dan perhitungannya didasarkan pada persyaratan penggunaan batubara yang dibutuhkan oleh entitas Indonesia, yang dibagi dengan perkiraan jumlah produksi batubara oleh Indonesia, untuk mencapai persentase berdasarkan target produksi yang disetujui oleh ESDM untuk setiap produsen batubara, terlepas dari kualitas atau jenis batubaranya. Hal ini mengakibatkan anomali karena berbagai jenis batubara (termasuk batubara kokas keras AKT) hanya memiliki sedikit atau tidak ada pengguna/pembeli lokal.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

As stipulated in the CCoW, the Government is entitled to receive 13.5% of the total coal produced from the final point of production processes established by AKT. In accordance with Presidential Decree No. 75/1996 dated 25 September 1996, AKT is required to deliver the 13.5% Government share of production (commonly referred to as "royalty to Government") in advance of shipping/sale.

AKT records 100% of its revenue generated from coal sales, and records the royalty to Government as a component of its cost of goods sold.

The Government still insists that the AKT CCoW/PKP2B must be amended to accord with the Mining Law of 2009 and that process is ongoing. AKT has signed off on several of the revision clauses and awaits definitive wording before discussing the other suggested amendments (taxation/Government revenue, and divestment).

Reclamation

AKT has had in place since 2012 bank guarantees for the required amounts of Reclamation funds (as calculated by ESDM). Based on AKT's annual reclamation works, various amounts have been clawed back such that the current total of the bank guarantees equates to the currently outstanding reclamation amounts due to be covered some Rp28,094,745,012 (equivalent to US\$2,073,719).

The Domestic Market Obligation

The Domestic Market Obligation ("DMO") is enshrined in the CCoW/PKP2B and the calculation is based on the expected usage requirements of coal by Indonesian entities, divided by the anticipated total production of coal by Indonesia, to arrive at a percentage which is then ascribed to each coal producer based on the ESDM approved production target, regardless of quality or type of coal. This results in anomalies as various types of coal (including AKT's hard coking coal) have few or no local users/buyers.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian ini juga disusun berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. VIII.G.7 mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Kelangsungan usaha

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar kelangsungan usaha yang mengasumsikan bahwa Grup dapat merealisasikan aset dan memenuhi liabilitasnya ketika jatuh tempo melalui kegiatan usaha normal di masa mendatang.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Grup mengalami defisiensi ekuitas sebesar AS\$716 juta, juga ada kas dan setara kas yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar AS\$26,891,688.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan melanggar semua ketentuan finansial perjanjian pinjamannya dengan Standard Chartered Bank antara lain ketentuan untuk menjaga nilai kekayaan bersih berwujud minimumnya sebesar AS\$800 juta (Catatan 14a). Nilai kekayaan bersih berwujud Grup pada tanggal 31 December 2017 dan 2016 berada dibawah batas minimum tersebut terutama sebagai akibat dari akumulasi rugi operasi AKT pada periode sebelumnya dan mencatat kerugian pada tahun sebelumnya atas investasi pada pengendalian bersama entitas. Karena pelanggaran perjanjian peminjaman tidak diperbaiki maupun restrukturisasi perjanjian pinjaman yang selesai pada 31 December 2017, Grup mencatat seluruh pinjaman kepada SCB sebagai liabilitas jangka pendek dan karenanya liabilitas jangka pendek melebihi aset lancar sebesar AS\$534 juta.

Grup berkeyakinan akan mampu mendanai kebutuhan modal kerja sepanjang tahun 2018 dan beroperasi dalam jangka panjang melalui rencana-rencana berikut:

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards. The consolidated financial statements have also been prepared in conformity with regulations of the Financial Services Authority ("OJK") No. VIII.G.7 for the Guidance on Financial Statement Presentation. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Going concern

The consolidated financial statements have been prepared on a going concern basis, which assumes that the Group will be able to realise its assets and discharge its liabilities in the normal course of business as they come due into the foreseeable future.

As of a 31 December 2017, the Group had a deficiency in equity of US\$716 million and had unrestricted cash and cash equivalents of US\$26,891,688.

As at 31 December 2017 and 2016, the Company had breached its financial covenants with Standard Chartered Bank, among others the requirement to maintain its minimum tangible net worth at not less than US\$800 million (Note 14a). The Group's tangible net worth position as at 31 December 2017 and 2016 stood below the covenant minimum level primarily as a result of accumulated operational losses of AKT, and recording losses from its former investment in jointly controlled entities. As the breach of the borrowing covenants was not rectified nor the restructuring of the loan agreement completed as at 31 December 2017, the Group recorded all of its borrowings from SCB as current liabilities, hence current liabilities exceeded current assets by US\$443 million.

The Group is confident that it will be able to fund its working capital requirements throughout 2018 and operate in the long-term through the following plans:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

- untuk menjaga profitabilitas Grup dengan cara terus berfokus pada pengiriman *coking coal* berkualitas tinggi, minimalisasi biaya produksi dan logistik AKT dengan lainnya, melalui pengelolaan yang cermat atas rasio pengupasan lapisan tanah, jarak hauling, serta meningkatkan efisiensi dan tingkat pemanfaatan alat;
- penundaan pembayaran kepada kreditur tertentu, berdasarkan Kesepakatan Penyelesaian PKPU AKT;
- kehati-hatian atas pengalokasian dan penggunaan belanja modal leasing dan/atau vendor pembiayaan untuk mempertahankan cadangan kas;
- restukturasi pinjaman SCB;

Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak termasuk penyesuaian yang akan terjadi jika Grup tidak dapat melanjutkan kelangsungan usahanya.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali instrumen keuangan tertentu, yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, dan deposito dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan.

Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha Grup.

Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

- securing Group profitability by continuing to focus on the delivery of a high quality coking coal product, minimising AKT's production and logistics costs, among others through careful management of the strip ratio, haul distances and improving efficiencies and equipment utilisation rates;
- the deferral of payments to certain creditors, pursuant to AKT's PKPU Settlement Agreement;
- prudent allocation of capital expenditure and utilisation of leasing and/or vendor financing to preserve cash reserves;
- restructuring of the SCB loan;

The Group's consolidated financial statements do not include any adjustments that may result if the Group was unable to continue as a going concern.

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for certain financial instruments, at fair value through profit or loss, and using the accrual basis except for the consolidated statements of cash flows.

The consolidated statements of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities. For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents includes cash on hand, cash in banks and deposits with a maturity of three months or less, net of overdrafts.

Cash represents available and eligible payment instruments to finance the Group's business.

Cash equivalents represent very liquid investments, short-term and quickly convertible to cash at a predetermined amount without any risk of significant value change.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS\$"), kecuali dinyatakan lain.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Grup, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa unsur pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Perubahan pada PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1 (Revisi 2015) "Penyajian Laporan Keuangan"
- ISAK 31 "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 "Properti Investasi"
- ISAK 32 "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 3 "Laporan Keuangan Interim"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 24 "Imbalan Kerja"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 58 "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Cash and cash equivalents which have been restricted for a certain purpose or which cannot be used freely are not defined as cash and cash equivalents.

Figures in the consolidated financial statements are stated in United States Dollars ("US Dollars" or "US\$"), unless otherwise stated.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Group, due to the significance of their nature or amount, several items of income or expense have been shown separately.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

Changes to SFAS and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISFAS")

New standards, amendments and interpretations issued and effective for the financial year beginning 1 January 2017, which do not have a material impact on the financial statements of the Company, are as follows:

- *The amendments to SFAS 1 (Revised 2015) "Presentation of Financial Statements"*
- *ISFAS 31 "Interpretation of SFAS 13 investment Property"*
- *SFAS 32 "Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards"*
- *Annual improvement on SFAS 3 interim Financial Statements"*
- *Annual improvement on SFAS 24 "Employee Benefits"*
- *Annual improvement on SFAS 58 "Non-Current Assets which Held for Sale and Discontinued Operation"*
- *Annual improvement on SFAS 60 "Financial Instruments: Disclosure"*

The implementation of the above standards do not result in any changes to the Company's accounting policies and had no effect on the amounts reported for current year or prior financial years.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Standar baru dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"
- Amandemen PSAK 13 "Properti Investasi - Pengalihan Properti Investasi"
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK 16 (Revisi 2015) "Aset Tetap"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- Amandemen PSAK 53 "Pembayaran Berbasis Saham Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham"
- Amandemen PSAK 62 "Penerapan PSAK 71 ke PSAK 62"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 67 (Revisi 2017) "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"
- ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka"
- PSAK 69 "Agrikultur"
- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"

ISAK 33 baru berlaku efektif pada tahun buku dimulai atau setelah 1 Januari 2019 dan PSAK 71 "Instrumen Keuangan", PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan Amandemen PSAK 62 "Penerapan PSAK 71 ke PSAK 62" baru berlaku efektif pada 1 Januari 2020, sedangkan standar lain berlaku efektif pada 1 Januari 2018.

Pada saat tanggal penerbitan laporan keuangan ini, manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

ISAK 29, "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

New standards and amendments issued but not yet effective are as follows:

- The amendments to SFAS 2 "Statements of Cash Flows about Disclosure Initiative"
- The amendments to SFAS 13 "investment Property - Transfer of Investment Property"
- The amendments to SFAS 15 "investments in Associates and Joint Ventures"
- The amendments to SFAS 16 (Revised 2015) "Property, Plant and Equipment"
- The amendments to SFAS 46 "income Tax about Deferred Tax Assets Recognition for Unrealized Loss"
- The amendments to SFAS 53 "Shared-based Payment-Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions"
- The amendments to SFAS 62 "Applying SFAS 71 to SFAS 62"
- Annual improvement on SFAS 67 (Revised 2017) "Disclosures of Interests in Other Entities"
- SFAS 33 "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"
- SFAS 69 "Agriculture"
- SFAS 71 "Financial Instruments"
- SFAS 72 "Revenue from Contracts with Customers"
- SFAS 73 "Leases"

ISFAS 33 is effective for the financial year beginning on or after 1 January 2019 and SFAS 71 "Financial Instruments", SFAS 72 "Revenue from Contracts with Customers" and SFAS 62 "Applying SFAS 71 to SFAS 62" are effective on 1 January 2020, while other standards are effective from 1 January 2018.

As at the authorization date of these financial statements, the management is evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements of the Company.

ISFAS 29, "Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine"

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Interpretasi ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui aset aktivitas pengupasan lapisan tanah, jika dan hanya jika, seluruh kriteria berikut terpenuhi:

1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan (peningkatan akses menuju badan bijih (*ore body*) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada entitas;
2. entitas dapat mengidentifikasi komponen badan bijih yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
3. biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah dengan komponen tersebut dapat diukur secara andal.

Group telah mengadopsi interpretasi ini dan manajemen berpendapat bahwa interpretasi ini tidak berdampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan.

c. Konsolidasi

(i) Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) dimana Grup memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atasnya, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain. Grup juga menilai keberadaan pengendalian ketika Grup tidak memiliki lebih dari 50% hak suara namun dapat mengatur kebijakan keuangan dan operasional secara de-facto. Pengendalian de-facto dapat timbul ketika jumlah hak suara yang dimiliki Grup, secara relatif terhadap jumlah dan penyebaran kepemilikan hak suara pemegang saham lain memberikan Grup kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional, serta kebijakan lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

The interpretation requires entities to recognise a stripping activity asset if, and only if, all of the following are met:

1. *it is probable that the future economic benefit (improved access to the ore body) associated with the stripping activity will flow to the entity;*
2. *the entity can identify the component of the ore body for which access has been improved; and*
3. *the costs relating to the stripping activity associated with that component can be measured reliably.*

The Group has adopted this interpretation and management believes it will not have a material impact on the Group's financial position and performance.

c. Consolidation

(i) Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including special purpose entities) over which the Group has the power to govern the financial and operating policies, generally accompanying a shareholding of more than one half of the voting rights. The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible are considered when assessing whether the Group controls another entity. The Group also assesses existence of control where it does not have more than 50% of the voting power but is able to govern the financial and operating policies by virtue of de-facto control. De-facto control may arise in circumstances where the size of the Group's voting rights relative to the size and dispersion of holdings of other shareholders give the Group the power to govern the financial and operating policies, etc.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjenji. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjenji yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laporan laba rugi.

Imbalan kontinjenji yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjenji yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011), dalam laporan laba rugi. Imbalan kontinjenji yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are de-consolidated from the date on which that control ceases.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is re-measured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or liability is recognised in accordance with SFAS 55 (revised 2011) in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not re-measured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Selisih lebih dari jumlah imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar jumlah kepentingan nonpengendali atas jumlah aset bersih dan liabilitas teridentifikasi yang diakuisisi dicatat sebagai *goodwill*.

Jika jumlah ini lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui langsung dalam laporan laba rugi.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi Grup.

(ii) Transaksi dengan kepentingan nonpengendali

Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan nonpengendali sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Untuk pembelian dari kepentingan nonpengendali, selisih antara imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset bersih entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas.

(iii) Pelepasan entitas anak

Ketika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai wajar adalah nilai tercatat awal untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada laba komprehensif lainnya sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada laba komprehensif lainnya direklasifikasi ke laporan laba rugi.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Goodwill is initially measured as the excess of the aggregate of the consideration transferred, and the fair value of non-controlling interest over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed.

If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognised directly in the profit or loss.

Inter-company transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. Accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

(ii) Transactions with non-controlling interests

The Group treats transactions with non-controlling interests as transactions with equity owners of the Group. For purchases from non-controlling interests, the difference between any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

(iii) Disposal of subsidiaries

When the Group ceases to have control or significant influence, any retained interest in the entity is re-measured to its fair value, with the change in carrying amount recognised in the profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

(iv) Pengendalian bersama entitas

Pengendalian bersama adalah perjanjian kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas ekonomi, dan ada hanya ketika keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitas tersebut mensyaratkan konsensus dari seluruh pihak-pihak yang berbagi pengendalian.

Karakteristik umum seluruh ventura bersama adalah sebagai berikut:

- (a) dua atau lebih *venturer* terikat oleh suatu perjanjian kontraktual; dan
- (b) perjanjian kontraktual tersebut membentuk pengendalian bersama.

Perjanjian kontraktual dapat dibuktikan dalam beberapa cara, misalnya melalui suatu kontrak antara para *venturer* atau notulen rapat antara para *venturer*. Dalam beberapa kasus, perjanjian tersebut dimasukkan dalam akta atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari ventura bersama. Apapun bentuknya, perjanjian kontraktual biasanya tertulis dan berkaitan dengan masalah-masalah seperti:

- (a) aktivitas, jangka waktu dan kewajiban pelaporan dari ventura bersama;
- (b) penetapan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau organisasi setara dari ventura bersama dan hak suara *venturer*;
- (c) kontribusi modal oleh *venturer*, dan
- (d) pembagian oleh *venturer* atas *output*, penghasilan, beban atau hasil dari ventura bersama.

Pengendalian bersama entitas memiliki karakteristik berikut:

- (a) Pengendalian bersama entitas adalah ventura bersama yang melibatkan pendirian suatu perseroan terbatas, persekutuan atau entitas lainnya yang mana setiap *venturer* mempunyai bagian partisipasi. Entitas tersebut beroperasi dalam cara yang sama seperti entitas lainnya, kecuali adanya perjanjian kontraktual antar *venturer* yang menciptakan pengendalian bersama atas aktivitas ekonomi entitas;

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

(iv) Jointly controlled entities

Joint control is the contractually agreed sharing of control over an economic activity by an arrangement, which exists only when strategic financial and operational decisions related with those activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The following characteristics are common to all joint ventures:

- (a) *two or more venturers are bound by a contractual arrangement; and*
- (b) *the contractual arrangement establishes joint control.*

The contractual arrangement may be evidenced in a number of ways, for example by a contract between the venturers or minutes of discussions between the venturers. In some cases, the arrangement is incorporated in the articles or other by-laws of the joint venture. Whatever its form, the contractual arrangement is usually in writing and deals with such matters as:

- (a) *the activity, duration and reporting obligations of the joint venture;*
- (b) *the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners or equivalent governing body of the joint venture and the voting rights of the venturers;*
- (c) *capital contributions by the venturers; and*
- (d) *the sharing by the venturers of the output, income, expenses or results of the joint venture.*

Jointly controlled entities have the following characteristics:

- (a) *A jointly controlled entity is a joint venture that involves the establishment of a corporation, partnership or other entity in which each venturer has an interest. The entity operates in the same way as other entities, except that a contractual arrangement between the venturers establishes joint control over the economic activity of the entity;*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

- (b) Pengendalian bersama entitas mengendalikan aset ventura bersama, menanggung liabilitas dan beban, dan memperoleh penghasilan. Entitas tersebut dapat mengadakan kontrak atas nama sendiri dan memperoleh pembiayaan untuk tujuan aktivitas ventura bersama. Setiap *venturer* berhak atas bagian laba dari pengendalian bersama entitas, meskipun beberapa pengendalian bersama entitas juga meliputi pembagian *output* ventura bersama; dan
- (c) Pengendalian bersama entitas melakukan catatan akuntansi sendiri serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan cara yang sama seperti entitas lainnya.

Grup mencatat partisipasinya dalam pengendalian bersama entitas menggunakan metode ekuitas. Dalam metode akuntansi ekuitas, investasi pada ventura bersama pada awalnya diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian Grup atas laba atau rugi setelah akuisisi dan mutasi pada laba komprehensif lainnya masing-masing pada laporan laba rugi dan laba komprehensif lainnya.

Keuntungan yang belum terealisasi dari transaksi antara Grup dan ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup pada ventura bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut membuktikan adanya penurunan nilai dari aset yang ditransfer.

Goodwill yang timbul dari akuisisi partisipasi Grup dalam suatu pengendalian bersama entitas dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup untuk *goodwill* yang timbul dari akuisisi entitas anak.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

- (b) A jointly controlled entity controls the assets of the joint venture, incurs liabilities and expenses and earns income. It may enter into contracts in its own name and raise finance for the purposes of the joint venture activity. Each venturer is entitled to a share of the profits of the jointly controlled entity, although some jointly controlled entities also involve a sharing of the output of the joint venture; and
- (c) A jointly controlled entity maintains its own accounting records and prepares and presents financial statements in the same way as other entities.

The Group reports its interest in jointly controlled entities using equity method. Under the equity method of accounting, interests in joint ventures are initially recognised in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognise the Group's share of the post-acquisition profits or losses and movements in other comprehensive income in the profit or loss and in other comprehensive income, respectively.

Unrealised gains on transactions between the Group and its joint ventures are eliminated to the extent of the Group's interest in the joint ventures. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred.

Any goodwill arising on the acquisition of the Group's interest in a jointly controlled entity is accounted for in accordance with the Group's accounting policy for goodwill arising on the acquisition of a subsidiary.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

d. Penjabaran mata uang asing

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Dolar AS yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan menjadi mata uang Dolar AS menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan menjadi Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut.

Kurs yang digunakan pada tanggal pelaporan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut (nilai penuh):

	2017	2016	
Rupiah Indonesia setara 1 Dolar AS	13,548	13,436	Indonesian Rupiah equivalent to 1 US Dollar
Euro setara dengan 1 Dolar AS	1.193	1.054	Euro equivalent to 1 US Dollar
Dolar Australia setara dengan 1 Dolar AS	0.779	0.724	Australian Dollar equivalent to 1 US Dollar
Dolar Singapura setara dengan 1 Dolar AS	0.748	0.692	Singapore Dollar equivalent to 1 US Dollar
Pound Sterling Inggris setara dengan 1 Dolar AS	1.344	1.229	Great Britain Pound Sterling equivalent to 1 US Dollar

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berhubungan dengan pinjaman, serta kas dan setara kas disajikan pada laporan laba rugi sebagai "penghasilan atau biaya keuangan". Keuntungan atau kerugian neto selisih kurs lainnya disajikan pada laporan laba rugi sebagai "beban lain-lain, bersih".

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Foreign currency translation

(i) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the entities within the Group are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in US Dollars, which is the functional and presentation currency of the Group.

(ii) Transactions and balances

Transactions denominated in currencies other than US Dollars are translated into US Dollars at the exchange rate prevailing at the date of the transaction. At each reporting date, monetary assets and liabilities in currencies other than US Dollars are translated into US Dollars at the exchange rate prevailing at that date.

As at the reporting date, the exchange rates used, based on middle rates published by Bank of Indonesia were as follows (full amount):

	2017	2016	
Rupiah Indonesia setara 1 Dolar AS	13,548	13,436	Indonesian Rupiah equivalent to 1 US Dollar
Euro setara dengan 1 Dolar AS	1.193	1.054	Euro equivalent to 1 US Dollar
Dolar Australia setara dengan 1 Dolar AS	0.779	0.724	Australian Dollar equivalent to 1 US Dollar
Dolar Singapura setara dengan 1 Dolar AS	0.748	0.692	Singapore Dollar equivalent to 1 US Dollar
Pound Sterling Inggris setara dengan 1 Dolar AS	1.344	1.229	Great Britain Pound Sterling equivalent to 1 US Dollar

Foreign exchange gains and losses that relate to borrowings and cash and cash equivalents are presented in the profit or loss within "finance income or costs". All other net foreign exchange gains and losses are presented in the profit or loss within "other expenses, net".

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

e. Aset keuangan

I. Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini: (i) pinjaman dan piutang dan (ii) tersedia untuk dijual.

Klasifikasi ini tergantung tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuan.

(i) Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran yang tetap atau dapat ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pinjaman dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar, kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Aset ini dikategorikan sebagai aset tidak lancar.

Pinjaman dan piutang Grup terdiri dari "kas dan setara kas, kas di bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, uang jaminan, piutang dari pihak berelasi dan pinjaman kepada pihak berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

(ii) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah instrumen non-derivatif yang ditentukan pada kategori ini atau tidak diklasifikasikan pada kategori yang lain. Aset keuangan tersedia untuk dijual dimasukkan sebagai aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud melepasnya dalam kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Financial assets

I. Classification

The Group classifies its financial assets in the following categories: (i) loans and receivables and (ii) available-for-sale.

The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are included in current assets, except for maturities of more than 12 months after the end of reporting period. These are classified as non-current assets.

The Group's loans and receivables comprise "cash and cash equivalents, restricted cash in banks, trade receivables, refundable deposits, amounts due from related parties and loans to related parties" in the consolidated statements of financial position.

(ii) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-derivative instruments that are either designated in this category or not classified in any of the other categories. They are included in non-current assets unless the investment matures or management intends to dispose of it within 12 months of the end of the reporting period.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

II. Pengakuan dan pengukuran

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal transaksi–tanggal dimana Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi untuk seluruh aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Pinjaman dan piutang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Perubahan nilai wajar efek moneter dan nonmoneter yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui pada laba komprehensif lainnya.

Ketika efek diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual telah dijual, akumulasi penyesuaian nilai wajar yang diakui pada ekuitas dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai “pendapatan keuangan” atau “beban keuangan”.

III. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

II. Recognition and measurement

Regular purchases and sales of financial assets are recognised on the trade-date – the date on which the Group commits to purchase or sell the asset. Investments are initially recognised at fair value plus the transaction costs for all financial assets not carried at fair value through profit or loss.

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all risks and rewards of ownership. Loans and receivables are carried at amortised cost using the effective interest method.

Changes in the fair value of monetary and non-monetary securities classified as available-for-sale are recognised in other comprehensive income.

When securities classified as available-for-sale are sold, the accumulated fair value adjustments recognised in equity are included in the profit or loss as “finance income” or “finance costs”.

III. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and their net amounts are reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

f. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha merupakan jumlah terutang dari pelanggan atas penjualan batubara dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar. Sesuai peraturan OJK, piutang lain-lain dari pihak berelasi disajikan sebagai aset tidak lancar tanpa mempertimbangkan perkiraan periode tertagihnya.

Piutang dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup.

g. Persediaan

Persediaan batubara, termasuk persediaan batubara *run-of-mine* dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas biaya yang terjadi selama periode pelaporan dan mencakup bagian biaya *overhead* tetap dan variabel. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan yang dapat diperoleh sesuai dengan kegiatan normal usaha dikurangi beban penjualan dan biaya-biaya untuk menyelesaikan penjualan.

Suku cadang dan bahan-bahan pendukung lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan yang ditentukan dengan metode rata-rata bergerak setelah dikurangi dengan penyisihan atas persediaan yang sudah usang. Suku cadang dan bahan-bahan pendukung lainnya dicatat sebagai beban pokok penjualan pada saat digunakan.

Penyisihan atas persediaan suku cadang dan bahan-bahan pendukung yang sudah usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

h. Aset tetap

Pada awalnya, semua aset tetap diakui sebesar harga perolehan dan setelahnya dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for coal sold in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets. In accordance with OJK regulations, other receivables from related parties are classified as non-current assets without considering the expected collection period.

Amounts due from related parties are receivables balances reflecting loans given to related parties of the Group.

g. Inventories

Coal inventories, including run-of-mine stocks are valued at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined based on the weighted average cost incurred during the period and includes an appropriate portion of fixed and variable overheads. Net realisable value is the estimated sales amount in the ordinary course of business less the costs of completion and selling expenses.

Spare parts and consumable supplies are valued at cost, determined on a moving average basis, less provision for obsolete items. Stores and consumable supplies are charged to cost of goods sold in the period they are used.

A provision for obsolete and slow moving spare parts and consumable supplies is determined on the basis of estimated future usage or sale of individual inventory items.

h. Fixed assets

Initially, fixed assets are recognised at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus hingga mencapai nilai sisa, selama periode yang lebih rendah antara estimasi umur aset atau umur tambang atau sisa umur PKP2B sebagai berikut:

<u>Tahun/ Years</u>	
Bangunan	5 – 20
Infrastruktur	10 – 30
Peralatan dan perlengkapan kantor	4
Kendaraan	6 – 12
Alat berat	6 – 12

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Apabila aset tetap dihentikan penggunaanya atau dijual, nilai tercatat dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan dan kerugian yang timbul akibat penarikan atau penjualan aset tetap tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan ditentukan dengan membandingkan perolehan kas dengan nilai tercatat dan diakui pada "beban lain-lain, bersih" dalam laporan laba rugi.

Masa manfaat, nilai sisa, dan metode depresiasi aset dikaji dan disesuaikan, jika diperlukan, pada setiap tanggal akhir tahun buku. Efek dari setiap penyesuaian ini diakui dalam laporan laba rugi secara prospektif.

Nilai tercatat aset diturunkan segera ke jumlah terpulihkan jika nilai tercatat aset tersebut lebih tinggi dari pada jumlah terpulihkan yang diestimasikan (Catatan 2I).

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, infrastruktur, dan pemasangan alat berat dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Fixed assets are depreciated to their estimated residual value using the straight-line method over the lesser of the estimated useful lives of the assets or the life of mine or the term of the CCoW as follows:

Bangunan	Buildings
Infrastruktur	Infrastructure
Peralatan dan perlengkapan kantor	Office furniture and equipment
Kendaraan	Vehicles
Alat berat	Heavy equipment

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced parts is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the profit or loss during the financial period in which they are incurred.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying amounts are eliminated from the consolidated financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the profit or loss.

Gains and losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognised within "other expenses, net" in profit or loss.

The assets' useful lives, residual values, and depreciation method are reviewed, and adjusted if appropriate, at each financial year end. The effects of any revisions are recognised in the profit or loss, prospectively.

The carrying amount of an asset is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 2I).

The accumulated costs of the construction of buildings, infrastructure, and the installation of heavy equipment are capitalised as construction-in-progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

i. Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan

Biaya eksplorasi dikapitalisasi dan ditangguhkan untuk setiap *area of interest* apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut:

- (i) biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksplorasi *area of interest* tersebut atau melalui penjualan *area of interest* tersebut; atau
- (ii) kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang ekonomis dapat diperoleh, dan kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

Pemulihan biaya eksplorasi yang ditangguhkan bergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksplorasi secara komersial, atau penjualan dari *area of interest* yang terkait. Setiap *area of interest* dievaluasi kembali pada setiap akhir periode akuntansi. Biaya eksplorasi yang terkait pada suatu *area of interest* yang telah ditinggalkan atau yang telah diputuskan Direksi Grup bahwa *area of interest* tersebut tidak layak secara ekonomis, dihapuskan pada periode keputusan tersebut dibuat.

Biaya pengembangan yang ditangguhkan mencakup akumulasi biaya administrasi, biaya pembersihan lahan, dan biaya pembukaan tambang, yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan cadangan terbukti sampai siap diproduksi secara komersial.

Biaya pengembangan tersebut meliputi biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan konstruksi tambang dan infrastruktur terkait lainnya. Amortisasi diakui terhadap properti yang dikembangkan ketika tambang tersebut sudah sampai dengan tahap yang direncanakan oleh manajemen.

Biaya pengembangan tambang dan pengeluaran-pengeluaran lain yang terkait dengan pengembangan suatu *area of interest* dikapitalisasi sebelum dimulainya produksi dari area tersebut sepanjang memenuhi persyaratan untuk penangguhan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Deferred exploration and development expenditure

Exploration expenditure incurred is capitalised and carried forward for each area of interest, provided that one of the following conditions is met:

- (i) *such costs are expected to be recouped through successful development and exploitation of the area of interest or, alternatively, by its sale; or*
- (ii) *exploration activities in the area of interest have not yet reached a stage which permits a reasonable assessment of the existence, or otherwise of economically recoverable reserves, and active and significant operations in, or in relation to the area of interest are continuing.*

Ultimate recoupment of exploration expenditure carried forward is dependent upon the successful development and commercial exploitation, or alternatively, the sale of the respective area of interest. Each area of interest is reviewed at the end of each accounting period. Exploration expenditure in respect of an area of interest which has been abandoned or for which a decision has been made by the Board of Directors of the Group against the commercial viability of the area is written-off in the period in which the decision is made.

Deferred development expenditure represents the accumulated costs relating to administrative, land clearing and cost of opening the mine, which is conducted in the preparation of proven reserves until commercial production.

Such expenditure comprises costs directly attributable to the construction of a mine and the related infrastructure. Amortisation is recognised in respect of development properties when the mine is capable of operating in the manner intended by management.

Mine development expenditure and related costs in developing an area of interest prior to commencement of operations in the respective area, as long as they meet the criteria for deferral, are capitalised.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan diamortisasi berdasarkan unit produksi sejak dimulainya produksi secara komersial dengan memperhatikan masa PKP2B.

j. Properti pertambangan

Properti pertambangan merupakan penyesuaian nilai wajar atas aset bersih yang diperoleh pada tanggal akuisisi terhadap harga perolehan aset tersebut yang merupakan aset teridentifikasi berupa cadangan atau sumber daya batubara dan dinyatakan pada harga perolehan.

Saldo properti pertambangan diamortisasi selama umur properti menggunakan metode unit produksi sejak tanggal dimulainya operasi komersial. Amortisasi tersebut menggunakan basis estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif, dimulai sejak awal periode terjadinya perubahan.

k. Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih entitas anak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi.

Untuk pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dialokasikan pada setiap unit penghasil kas, atau kelompok unit penghasil kas, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Setiap unit atau kelompok unit yang memperoleh alokasi goodwill merupakan tingkat terendah dalam entitas yang goodwillnya dipantau untuk tujuan manajemen internal.

Peninjauan atas penurunan nilai pada goodwill dilakukan setahun sekali atau dapat lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai. Nilai tercatat dari goodwill dibandingkan dengan jumlah yang terpulihkan, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi dan selanjutnya tidak dibalik kembali.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Deferred exploration and development expenditure is amortised based on the units of production method, from the commencement of commercial production and giving regard to the term of the CCoW.

j. Mining properties

Mining properties represent the fair value adjustments of net assets acquired at the date of acquisition of a mining company over the acquisition costs of the assets which are identifiable in the form of coal reserves or resources and are stated at cost.

The mining properties balances are amortised over the life of the property using the units of production method from the date of the commencement of commercial operations. The amortisation is based on estimated reserves. Changes in estimated reserves are accounted for on a prospective basis, from the beginning of the period in which the change occurs.

k. Goodwill

Goodwill represents the excess of the acquisition cost over the fair value of the Group's share of the net assets of the acquired subsidiaries at the date of acquisition.

For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated to each of the cash-generating units ("CGU"), or groups of CGUs, that is expected to benefit from the synergies of the combination. Each unit or group of units to which the goodwill is allocated represents the lowest level within the entity at which the goodwill is monitored for internal management purposes.

Goodwill impairment reviews are undertaken annually or more frequently if events or changes in circumstances indicate a potential impairment. The carrying value of goodwill is compared to the recoverable amount, which is the higher of value-in-use ("VIU") and the fair value less costs to sell. Any impairment loss is recognised immediately as an expense within profit or loss and is not subsequently reversed.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

I. Penurunan nilai aset non keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas—misalnya *goodwill* atau aset tak berwujud yang belum siap untuk digunakan—tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai.

Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset nonkeuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

m. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life—for example, goodwill or intangible assets not ready for use—are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired.

Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and VIU. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (CGU). Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment loss for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

m. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman apabila besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai penarikan pinjaman dilakukan. Apabila tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas terkait.

Biaya pinjaman yang terjadi untuk konstruksi aset kualifikasi, dikapitalisasi selama periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konstruksi aset dan mempersiapkannya sampai dapat digunakan sesuai tujuan yang dimaksudkan atau untuk dijual. Biaya pinjaman lainnya dibebankan pada laporan laba rugi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

n. Biaya pengupasan lapisan tanah

Biaya pengupasan lapisan tanah biasanya dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio pengupasan lapisan tanah rata-rata selama umur tambang. Menurut ISFAS 29 biaya pengupasan lapisan tanah dibebankan kecuali terdapat kondisi tertentu yang dipenuhi.

o. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan terdiri dari nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan batubara dalam kegiatan usaha Grup yang normal. Pendapatan disajikan neto setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, penyesuaian volume dan kualitas, potongan harga dan diskon dan setelah mengeliminasi pendapatan mitra kelompok usaha dalam Grup.

Pendapatan dari penjualan batubara diakui pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowing costs incurred for the construction of any qualifying asset are capitalised during the period of time that is required to complete and prepare the asset for its intended use or sale. Other borrowing costs are expensed in profit or loss.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

n. Stripping costs

Stripping costs are recognised as production costs based on the average stripping ratio during the life of mine. Pursuant to ISFAS 29 stripping costs are expensed unless certain strict conditions are met.

o. Revenue and expense recognition

Revenue comprises the fair value of the consideration received or receivable for the sale of coal in the ordinary course of the Group's activities. Revenue is shown net of Value Added Tax, quality and volume adjustments, rebates and discounts and after eliminating sales within the Group.

Revenue from sales of coal is recognised when all the following conditions are met:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

- Grup telah memindahkan risiko secara signifikan dan manfaat kepemilikan batubara kepada pembeli;
- Grup tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas batubara yang dijual;
- jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada Grup; dan
- biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

Penjualan tagih dan tahan (*bill and hold*) batubara adalah kontrak penjualan batubara yang mana pengiriman ditunda atas permintaan pembeli tetapi pembeli memperoleh hak atas batubara dan menerima tagihan.

Penjualan tagih dan tahan batubara akan diakui sebagai pendapatan ketika:

- kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan;
- barang yang berada di tangan penjual, dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui;
- pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman; dan
- syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

p. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh *lessor* diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi insentif yang diterima dari *lessor*) dibebankan pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode sewa.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

- *the Group has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the coal;*
- *the Group retains neither continuing managerial involvement nor effective control over the coal sold;*
- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group; and*
- *the costs incurred or to be incurred with respect to the sales transaction can be measured reliably.*

Bill and hold coal sales are coal sales contracts in which delivery is delayed at the request of the buyer but the buyer has assumed title to the coal and accepted billing.

Bill and hold coal sales are recognised as revenue when:

- *it must be probable that delivery will take place;*
- *the goods must be on hand, identified and be ready for delivery to the buyer at the time the sale is recognised;*
- *the buyer must specifically acknowledge the deferred delivery instructions; and*
- *the usual payment terms must apply.*

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

p. Leases

Determination whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Grup menyewa aset tetap tertentu. Sewa aset tetap dimana Grup, sebagai lessee, memiliki sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini pembayaran sewa minimum.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan beban keuangan sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Kewajiban sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "utang sewa pembiayaan".

Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa manfaat aset dan masa sewa apabila tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Transaksi jual dan sewa-balik (*sales and lease back*) meliputi penjualan suatu aset dan penyewaan kembali aset yang sama. Pembayaran sewa dan harga jual biasanya saling terkait karena keduanya dinegosiasikan sebagai suatu paket. Perlakuan akuntansi untuk transaksi jual dan sewa-balik bergantung pada jenis sewanya.

Untuk suatu transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa pembiayaan, selisih lebih hasil penjualan dari nilai tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual-lessee, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.

Untuk transaksi jual dan sewa-balik merupakan sewa operasi dan jelas bahwa transaksi tersebut terjadi pada nilai wajar, maka laba atau rugi harus diakui segera. Jika harga jual di bawah nilai wajar, maka laba atau rugi harus diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proposisional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

The Group leases certain fixed assets. Leases of fixed assets where the Group as lessee has substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased asset and the present value of the minimum lease payments.

Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "finance lease payables".

The interest element of the finance cost is charged to the profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. Fixed assets acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership at the end of the lease term.

A sale and leaseback transaction involves the sale of an asset and the leasing back of the same asset. The lease payment and the sale price are usually interdependent because they are negotiated as a package. The accounting treatment of a sale and leaseback transaction depends upon the type of lease involved.

For a sale and leaseback transaction results in a finance lease, any excess of sales proceeds over the carrying amount shall not be immediately recognised as income by a seller-lessee. Instead, it shall be deferred and amortised over the lease term.

For a sale and leaseback transaction results in an operating lease, and it is clear that the transaction is established at fair value, any profit or loss shall be recognised immediately. If the sale price is below fair value, any profit or loss shall be recognised immediately except that, if the loss is compensated for by future lease payments at below market price, it shall be deferred and amortised in proportion to the lease payments over the period for which the asset is expected to be used. If the sale price is above fair value, the excess over fair value shall be deferred and amortised over the period for which the asset is expected to be used.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

q. Provisi

(i) Provisi kewajiban lingkungan

Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi, dan lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan area yang terganggu selama tahap produksi dibebankan sebagai beban pokok penjualan pada saat kewajiban itu timbul dari gangguan yang terjadi.

Provisi untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penarikan aset, dimana Grup merupakan pihak yang bertanggung jawab, diakui ketika:

- Grup memiliki kewajiban kini baik yang bersifat hukum maupun konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu;
- besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan
- estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi untuk pembongkaran, pemindahan dan restorasi dicatat untuk mengakui kewajiban hukum dan konstruktif berkaitan dengan penarikan aset tetap dan aset jangka panjang lainnya yang berasal dari akuisisi, konstruksi atau pengembangan dan/atau operasi normal aset tersebut.

Penarikan aset tersebut ini, termasuk penjualan, peninggalan (*abandonment*), pendaurulangan atau penghapusan dengan cara lain.

Kewajiban ini pada awalnya diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum dan konstruktif yang berkaitan dengan penarikan sebuah aset, dan kemudian diakui sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Biaya penarikan aset dalam jumlah yang setara dengan jumlah liabilitas dikapitalisasi

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Provision

(i) Provision for environmental related obligations

Restoration, rehabilitation and environmental expenditures to be incurred in relation to the remediation of disturbed areas during the production phase are charged to cost of goods sold when the obligation arising from the disturbance occurs.

Provision for environmental issues that may not involve the retirement of an asset, where the Group is a responsible party are recognised when:

- the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events;
- it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and
- the amount has been reliably estimated.

Provision for decommissioning, demobilisation and restoration provides for the legal and constructive obligations associated with the retirement of fixed assets and other long-lived assets that result from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of such assets.

The retirement of such assets is its other than temporary removal from service including its sale, abandonment, recycling or disposal in some other manner.

These obligations are recognised as liabilities when a legal and constructive obligation with respect to the retirement of an asset is incurred, with the initial and subsequent measurement of the obligation at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. An asset retirement cost equivalent to these liabilities is capitalised as part of the related asset's carrying value

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

sebagai bagian dari suatu aset terkait dan kemudian disusutkan atau dideplesi selama masa manfaat aset tersebut. Peningkatan kewajiban ini sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban tersebut yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari harga perolehan aset yang bersangkutan pada periode berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laporan laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Grup akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh.

Jika terdapat indikasi tersebut, Grup akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan mencatat kerugian dari penurunan nilai, jika ada.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi ini sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

(ii) Provisi lain-lain

Provisi biaya restrukturisasi dan tuntutan hukum diakui ketika: Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

and is subsequently depreciated or depleted over the asset's useful life. The increase in these obligations due to the passage of time is recognised as finance costs.

The changes in the measurement of these obligations that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits (e.g; cash flows) required to settle the obligation, or a change in the discount rate will be added to or deducted from the cost of the related asset in the current period. The amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess is recognised immediately in the profit or loss. If the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the Group will consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable.

If there is such an indication, the Group will test the asset for impairment by estimating its recoverable amount and will account for any impairment loss incurred, if any.

Provision is measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as finance costs.

(ii) Other provisions

Provision for restructuring costs and legal claims is recognised when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. Provisions are not recognised for future operating losses.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

Ketika terdapat beberapa kewajiban yang serupa, kemungkinan penyelesaian mengakibatkan arus keluar ditentukan dengan mempertimbangkan kelas kewajiban secara keseluruhan. Provisi diakui walaupun kemungkinan adanya arus keluar sehubungan dengan unsur manapun yang termasuk dalam kelas kewajiban yang sama mungkin kecil.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai beban keuangan.

r. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di laba komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam laba komprehensif lain atau ekuitas.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* dan pajak penghasilan tangguhan pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantial telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as finance costs.

r. Current and deferred income tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dan asosiasi dibentuk pajak penghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak penghasilan tangguhan dimana saat pembalikan perbedaan sementara dikendalikan oleh Grup dan sangat mungkin perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Selain pajak penghasilan, Grup juga mengakui bentuk retribusi yang lain yang dihitung menggunakan kriteria tertentu. Kewajiban Grup yang timbul dari ketentuan royalti tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan, sehingga diakui sebagai beban pokok penjualan.

s. Imbalan karyawan

(i) Kewajiban pensiun

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang dibayarkan, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja atau jumlah kompensasi.

Grup harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal berdasarkan Peraturan Grup ("Peraturan") atau berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 ("UU Ketenagakerjaan"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau Peraturan menentukan rumus tertentu

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax is provided on temporary differences arising on investments in subsidiaries and associates, except for deferred income tax liability where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

In addition to income tax, the Group also recognises other types of imposts that are calculated based on certain criteria. The Group's obligations arising from royalty fee arrangements are not based on taxable income and are therefore included in cost of goods sold.

s. Employee benefits

(i) Pension obligations

A defined benefit plan is a pension plan that defines the amount of pension benefits to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service and compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with the Group's regulation ("Regulation") or Labour Law No. 13, 2003 (the "Labour Law"), whichever is higher. Since the Labour Law and the Regulation set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau Peraturan adalah program imbalan pasti.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai penyesuaian atas keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

Besarnya kewajiban imbalan pasti ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan setiap tahun menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat suku bunga obligasi pemerintah (mengingat saat ini belum ada pasar yang aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Beban yang dibebankan dalam laba rugi meliputi biaya jasa kini, bunga atas kewajiban, amortisasi biaya jasa lalu, dan keuntungan/kerugian aktuarial. Liabilitas jasa lalu diamortisasi dengan garis lurus selama rata-rata periode jasa yang diestimasikan sampai imbalan menjadi vested.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman, perubahan asumsi-asumsi aktuarial, dan perubahan pada program pensiun. Jumlah keuntungan dan kerugian aktuarial yang melebihi 10% dari kewajiban imbalan pasti dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi selama rata-rata sisa masa kerja yang diharapkan dari para pekerja.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

plans under the Labour Law or the Regulation represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statements of financial position in respect of the defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of reporting period date less adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past service costs.

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering that there is currently no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Expenses charged to profit or loss include current service costs, interest on the obligation, amortisation of past service costs and actuarial gains and losses. The past service liability is amortised on a straight-line basis over the estimated average service period until the benefits become vested.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments, changes in actuarial assumptions and amendments to the pension plan, in excess of 10% of the present value of the defined benefit obligation are charged or credited to profit or loss over the employees expected average remaining working lives.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

Biaya jasa lalu diakui segera di laporan laba rugi, kecuali perubahan pada program pensiun bergantung kepada sisa masa kerja karyawan untuk jangka waktu tertentu (periode hak atau *vesting*). Dalam kasus ini, biaya jasa lalu diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama periode *vesting*.

(ii) Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika dapat ditunjukkan bahwa Grup berkomitmen untuk melakukan pemberhentian yang ditunjukkan dengan adanya perencanaan yang rinci dan formal untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

Pada tanggal 31 Desember 2017 perusahaan belum menghitung cadangan kewajiban imbalan pasca kerja pada tahun berjalan

t. Pembagian hasil produksi

Sebagaimana diatur dalam PKP2B, Pemerintah berhak atas 13,5% dari batubara yang dihasilkan dari proses produksi akhir AKT.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75/1996 tertanggal 25 September 1996, AKT membayar royalti kepada Pemerintah secara tunai.

Grup mengakui penjualan atas bagian produksi milik Pemerintah sebagai bagian dari pendapatan penjualan, dan kewajiban pembayaran ke Pemerintah sebagai beban royalti di bagian beban pokok penjualan.

u. Laba per saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

Past service costs are recognised immediately in the profit or loss, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period). In this case, the past service costs are amortised on a straight-line basis over the vesting period.

(ii) Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Group recognises termination benefits when it is demonstrably committed to a termination when the entity has a detailed formal plan to terminate the employment of current employees without possibility of withdrawal. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

On December 31, 2017 the company not yet count the employee benefit for the current year.

t. Sharing of production

As stipulated in the CCoW, the Government is entitled to receive 13.5% of total coal produced from the final production processes established by AKT.

In accordance with Presidential Decree No. 75/1996 dated 25 September 1996, AKT pays the royalty to the Government in cash.

The Group recognises the Government's share as part of sales revenue, and the obligation to make payment to the Government as royalty expense as part of cost of goods sold.

u. Earnings per share

Earnings per share are calculated by dividing the profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

v. Pelaporan segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Grup melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

w. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset ("peristiwa kerugian") dan peristiwa kerugian (atau beberapa peristiwa) tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang diestimasi (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Segment reporting

An operating segment is a component of an entity:

- a. *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to transactions between different components within the same entity);*
- b. *whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision-maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and*
- c. *for which discrete financial information is available.*

The Group segments its financial reporting based on the financial information used by the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group. All transactions between segments have been eliminated.

w. Impairment of financial assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is objective evidence that a financial asset or Group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

For the loans and receivables category, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

Nilai tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan memiliki tingkat bunga mengambang, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah tingkat bunga efektif saat ini yang ditentukan dalam kontrak. Untuk alasan praktis, Grup dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika, pada periode selanjutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitör), pemulihan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya diakui pada laporan laba rugi.

x. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

y. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

Ketika kelompok usaha dalam Grup membeli modal saham ekuitas Perusahaan (saham simpanan), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

The carrying amount of the asset is reduced and the amount of the loss is recognised in the profit or loss. If a loan has a floating interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the Group may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the reversal of the previously recognised impairment loss is recognised in the profit or loss.

x. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

y. Share capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issuance of new shares are shown in equity as deductions, net of tax, from the proceeds.

Where any entity within the Group purchases the Company's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the company's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Company's equity holders.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2017 AND 2016

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi, asumsi, dan pertimbangan akan dievaluasi secara berkelanjutan dan didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa mendatang yang memungkinkan berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut ini dimana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan secara material dapat mempengaruhi hasil keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan di periode mendatang.

Rincian lebih lanjut mengenai sifat dari asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi tersebut dapat ditemukan dalam catatan yang relevan atas laporan keuangan konsolidasian.

(i) Estimasi cadangan

Cadangan adalah estimasi jumlah produk yang dapat secara ekonomis dan sah diekstrak dari properti Grup. Grup menentukan dan melaporkan cadangan batubara berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kode Joint Ore Reserves Committees ("JORC") untuk Pelaporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih ("Kode JORC").

Dalam rangka untuk memperkirakan cadangan batubara, dibutuhkan asumsi tentang faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah produksi, teknik produksi, rasio pengupasan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar. Memperkirakan jumlah dan/atau spesifikasi kandungan kimia dalam cadangan batubara membutuhkan ukuran, bentuk dan kedalaman tubuh batubara atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Estimates, assumptions, and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following critical accounting policies under which significant judgments, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the financial position reported in future periods.

Further details of the nature of these assumptions and conditions may be found in the relevant notes to the consolidated financial statements.

(i) Reserve estimates

Reserves are estimates of the amount of product that can be economically and legally extracted from the Group's properties. The Group determines and reports its coal reserves under the principles incorporated in the Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (the "JORC Code") of the Joint Ore Reserves Committees ("JORC").

In order to estimate coal reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates. Estimating the quantity and/or chemical content specification of coal reserves requires the size, shape and depth of coal bodies or fields to be determined by analysing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgements to interpret the data.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari waktu ke waktu, dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian dapat berubah apabila beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- beban pembuangan lapisan tanah yang dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian atau dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian dapat berubah karena adanya perubahan rasio pengupasan.
- provisi untuk pembongkaran, restorasi lokasi aset, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

(ii) Biaya eksplorasi

Kebijakan akuntansi Grup untuk biaya eksplorasi menimbulkan adanya beberapa biaya yang dikapitalisasi untuk sebuah *area of interest* yang dianggap dapat dipulihkan oleh kegiatan eksplorasi di masa depan atau dijual atau di mana kegiatan belum mencapai tahap yang memperbolehkan penilaian yang wajar atas adanya cadangan. Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu untuk peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya tentang apakah operasi ekstraksi yang ekonomis dapat dilaksanakan.

Setiap perkiraan dan asumsi tersebut dapat berubah seiring tersedianya informasi baru. Jika setelah biaya dikapitalisasi berdasarkan kebijakan tidak menunjukkan adanya kemungkinan pemulihan biaya, biaya relevan yang dikapitalisasi tersebut akan dihapus dalam laporan laba rugi.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from period to period and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Group's financial results and financial position in a number of ways, including the following:

- asset carrying values may be affected due to changes in estimated future cash flows.
- depreciation and amortisation charged in the consolidated profit or loss may change where such charges are determined on an unit of production basis, or where the useful economic lives of assets change.
- overburden removal costs recorded in the consolidated statements of financial position or charged to the consolidated profit or loss may change due to changes in stripping ratios.
- decommissioning, site restoration and environmental provision may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.
- the carrying value of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likely recovery of the tax benefits.

(ii) Exploration expenditure

The Group's accounting policy for exploration expenditure results in certain items of expenditure being capitalised for an area of interest where it is considered likely to be recoverable by future exploitation or sale or where the activities have not yet reached a stage which permits a reasonable assessment of the existence of reserves. This policy requires management to make certain estimates and assumptions as to future events and circumstances, in particular whether an economically viable extraction operation can be established.

Any such estimates and assumptions may change as new information becomes available. If, after having capitalised the expenditure under the policy, a judgement is made that recovery of the expenditure is unlikely, the relevant capitalised amount will be written-off to profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

(iii) Biaya pengembangan

Kegiatan pengembangan dimulai setelah dilakukan pengesahan proyek oleh tingkat manajemen yang berwenang. Manajemen melakukan pertimbangan untuk menentukan kapan suatu proyek layak dikembangkan secara ekonomis.

Dalam melaksanakan pertimbangan tersebut, manajemen perlu membuat estimasi dan asumsi tertentu seperti yang dijelaskan di atas untuk biaya eksplorasi dan evaluasi yang dikapitalisasi. Setiap estimasi dan asumsi tersebut dapat berubah seiring tersedianya informasi baru. Jika setelah memulai kegiatan pengembangan terdapat penilaian bahwa terdapat penurunan nilai biaya pengembangan, jumlah yang sesuai akan dihapus di dalam laporan laba rugi.

(iv) Penurunan nilai *goodwill*, aset nonkeuangan dan investasi pada pengendalian bersama entitas

Grup melakukan pengujian setiap tahun atas *goodwill* yang telah mengalami penurunan nilai, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dinyatakan dalam (Catatan 2k). Grup juga melakukan pengujian atas aset nonkeuangan yang diamortisasi ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya melebihi jumlah yang terpulihkan (Catatan 2l). Jumlah terpulihkan unit penghasil kas telah ditentukan dengan perhitungan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Perhitungan ini memerlukan penggunaan estimasi.

Investasi pada pengendalian bersama entitas diuji untuk penurunan nilai setiap ada indikasi selain penurunan sementara dari nilai investasi.

Penentuan nilai terpulihkan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi produksi dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan (lihat Estimasi cadangan di atas), biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi serta belanja modal di masa depan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

(iii) Development expenditure

Development activities commence after project sanctioning by the appropriate level of management. Judgement is applied by management in determining when a project is economically viable.

In exercising this judgement, management is required to make certain estimates and assumptions similar to those described above for capitalised exploration and evaluation expenditure. Any such estimates and assumptions may change as new information becomes available. If, after having commenced the development activity, a judgement is made that a development asset is impaired, the appropriate amount will be written off to profit or loss.

(iv) Impairment of goodwill, non-financial assets and investment in jointly controlled entities

The Group tests annually whether goodwill has suffered any impairment, in accordance with the accounting policy stated in (Note 2k). The Group also reviews the impairment testing for its non-financial assets that are subject to amortisation whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable (Note 2l). The recoverable amounts of CGUs have been determined based on fair value less cost to sell calculations. These calculations require the use of estimates.

Investment in jointly controlled entities is tested for impairment whenever there is an indication of other than temporary decline in the investment's value.

The determination of recoverable amount requires management to make estimates and assumptions about expected production and sales volumes, commodity prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see Reserve estimates above), operating costs, closure and rehabilitation costs and future capital expenditure.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi.

(v) Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan beban tertentu selama estimasi penyisihan pajak penghasilan untuk setiap perusahaan dalam Grup. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan dimana penentuan pajak akhir menjadi tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Dimana perhitungan pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada penetapan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang ditangguhkan dalam periode penentuan pajak tersebut.

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan yang berlaku termasuk PKP2B AKT. Resolusi dari posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan atau auditor Pemerintah dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kerugian pajak yang dapat dikompensasikan kembali, penyisihan modal, dan perbedaan temporer diakui hanya ketika hal-hal tersebut diperhitungkan untuk dapat dipulihkan, yang tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi dimasa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak dimasa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi produksi, jumlah penjualan barang atau jasa, harga komoditas, cadangan, biaya operasi, biaya penutupan tambang dan rehabilitasi, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen modal lainnya dimasa depan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired with the impact recorded in profit or loss.

(v) Income taxes

Judgement and assumptions are required in determining the capital allowances and deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for each company within the Group. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provisions in the period in which such determination is made.

The calculation of the Group's income tax expense involves the interpretation of applicable tax laws and regulations including AKT's CCoW. The resolution of tax positions taken by the Group through negotiations with relevant tax authorities or the Government's auditor can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome.

Deferred tax assets, including those arising from unrecouped tax losses, capital allowances and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future production, sales volumes or sales of services, commodity prices, reserves, operating costs, closure and rehabilitation costs, capital expenditure, dividends and other capital management transactions.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2017	2016	
Kas:			
Rupiah	1,626,833	340,516	Cash: Rupiah
Jumlah kas	<u>1,626,833</u>	<u>340,516</u>	Total cash
Kas di bank:			Cash in bank
Rupiah			Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	130,663	141,582	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	230,814	25,586	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Artha Graha	98,868	-	PT Bank Artha Graha
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	9,865	13,685	PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
PT Bank Mandiri	8,587	-	PT Bank Mandiri
Lainnya, masing-masing dibawah AS\$5.000	6,369	220,988	Other, each below US\$5,000
Jumlah rekening rupiah	<u>485,166</u>	<u>401,841</u>	Total Rupiah accounts
Dolar AS			US Dollar
First Gulf Bank cabang Singapura ("FGB")	7,924,547	998,498	First Gulf Bank Singapore branch ("FGB")
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	29,478	329,101	PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
PT Bank Artha Graha	553,336	-	PT Bank Artha Graha
PT Bank Citibank Indonesia Tbk	5,029,531	583,155	PT Bank Citibank Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1,585,477	77,724	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	11,082	9,854	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Standard Chartered Bank	16,179	7,435	Standard Chartered Bank
Lainnya	6,988	9,856	Other
Jumlah rekening Dolar AS	<u>15,156,618</u>	<u>2,015,623</u>	Total US Dollar account
Euro			Euro
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	31,317	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Citibank Indonesia Tbk	7,757,982	-	PT Bank Citibank Indonesia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	2	60	PT Bank ANZ Indonesia
Standard Chartered Bank	888	794	Standard Chartered Bank
Lainnya	-	-	Other
Jumlah rekening Euro	<u>7,790,189</u>	<u>854</u>	Total Euro account
Dolar Australia			Australian Dollar
PT Bank ANZ Indonesia	2	26	PT Bank ANZ Indonesia
Jumlah rekening Dolar Australia	<u>2</u>	<u>26</u>	Total Australian dollar account
Dolar Singapura			Singapore Dollar
PT Bank ANZ Indonesia	2	50	PT Bank ANZ Indonesia
Lainnya	-	-	Other
Jumlah rekening Dolar Singapura	<u>2</u>	<u>50</u>	Total Singapore Dollar account
Jumlah kas di bank	23,431,977	2,418,394	Total cash in bank

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	2017	2016	
Deposito berjangka :			Time deposit:
Rupiah	1,582,878	1,895,258	Rupiah
Dolar US	250,000	-	US Dollar
Jumlah deposito berjangka	<u>1,832,878</u>	<u>1,895,258</u>	Total time deposit
Jumlah kas dan setara kas	<u>26,891,688</u>	<u>4,654,168</u>	Total cash and cash equivalents

Tidak ada kas dan setara kas dengan pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalents with related parties.

5. KAS DI BANK YANG DIBATASI PENGUNAANNYA

5. RESTRICTED CASH IN BANK

	2017	2016	
Dolar AS			US Dollar
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	19,863	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	2,496	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Standard Chartered Bank	516	23,152	Standard Chartered Bank
Jumlah Rekening Dolar AS	<u>22,875</u>	<u>23,152</u>	Total US Dollar Account
Jumlah kas di bank yang dibatasi penggunaannya	<u>22,875</u>	<u>23,152</u>	Total restricted cash in bank

Kas di bank yang dibatasi penggunaannya adalah kas yang dibekukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

Restricted cash is cash frozen by the Directorate General of Taxes of the Republic of Indonesia.

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

	2017	2016	
Pihak ketiga:			Third Party:
Noble Resourcess International Pte Ltd	-	50,771,691	Noble Resourcess International Pte Ltd
Rescom Mineral Trading FZE	55,537,807	-	Rescom Mineral Trading FZE
PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy	3,117,883	-	PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy
Krakatau Steel	1,104,064	-	Krakatau Steel
Dikurangi: Penyisihan atas penurunan nilai	<u>(2,076,684)</u>	<u>(2,076,684)</u>	<i>Less: Provision for impairment</i>
	<u>57,683,070</u>	<u>48,695,007</u>	

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Semua piutang usaha masih lancar.

Manajemen berpendapat bahwa nilai penyisihan dapat menutupi segala kemungkinan atas nilai piutang usaha yang belum tertagih.

Pada tanggal 31 Desember 2017, piutang usaha sejumlah AS\$59,759,754 (2016: AS\$50,771,091) dijaminkan untuk fasilitas pinjaman (Catatan 14b).

7. UANG MUKA DAN PEMBAYARAN DIMUKA

Pembayaran dimuka merupakan sewa ruang kantor dan premi asuransi. Lihat (Catatan 28) untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

All of the trade receivables are current.

Management is of the opinion that the provision is sufficient to cover any possible loss from the outstanding trade receivables.

As at 31 December 2017, trade receivables amounting to US\$59,759,754 (2016: US\$50,771,091) were pledged against a loan (Note 14b).

7. ADVANCES AND PREPAYMENTS

Prepayments represent prepaid office rental and insurances. Refer to (Note 28) for details of related party balances and transactions.

	2017	2016	
Bagian lancar:			Current portion:
Pengangkutan dan logistik	71,349,848	55,415,541	Barging and logistics
Bahan bakar dan mobilisasi	-	-	Fuel and mobilisation
Pembayaran di muka	8,324,710	(9,583,707)	Prepayments
Lain-lain	54,651	105,651	Others
	<u>79,729,209</u>	<u>45,937,485</u>	
Bagian tidak lancar:			Non-current portion:
Pihak ketiga:			Third parties:
Pembelian peralatan tambang	-	-	Purchase of mining equipment
Pembangunan infrastruktur	-	-	Infrastructure construction
Dikurangi : penyisihan	(3,986,274)	(3,986,274)	Less: provision
	<u>75,742,935</u>	<u>41,951,211</u>	

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

8. PERSEDIAAN

8. INVENTORIES

	2017	2016	
Persediaan batubara	104,892,110	109,490,820	<i>Coal inventory</i>
Suku cadangan dan material	12,264,410	7,903,190	<i>Spare parts and materials</i>
Bahan bakar	11,585,441	2,305,260	<i>Fuels</i>
Bahan peledak	1,147,161	980,586	<i>Explosives</i>
	<u>129,889,122</u>	<u>120,679,856</u>	

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Grup telah mencatat persediaan batubara pada biaya perolehan (2016: biaya perolehan).

Manajemen berpendapat bahwa semua persediaan pada tanggal pelaporan keuangan dapat digunakan atau dijual dan dalam kondisi baik, sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk persediaan usang. Persediaan batubara dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 14b).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, persediaan tidak diasuransikan karena manajemen Grup berpendapat bahwa biaya premi asuransi yang berlaku tidak sepadan dengan manfaat yang dapat diperoleh. Manajemen Grup menyadari risiko yang dapat timbul akibat tidak adanya asuransi yang bersangkutan.

For the year ended 31 December 2017, the Group has recorded coal inventory at cost (2016: cost).

Management is of the opinion that the inventories at financial reporting date could be either used or sold and were in good condition and, as a result, a provision for obsolete inventories was not considered necessary. The coal inventory is pledged as collateral against a loan as at 31 December 2017 and 2016 (Note 14b).

As at 31 December 2017 and 2016, inventories were not insured as the Group's management believed the insurance premium cost was not worth the benefit thereof. The Group's management is aware of the risks associated with non-insurance.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**9. BIAYA EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN
YANG DITANGGUHKAN**

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, beban amortisasi sejumlah AS\$3.995.964 (2016: AS\$3.995.964) dibebankan ke laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 manajemen berpendapat tidak terdapat penurunan nilai pada biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan.

**9. DEFERRED EXPLORATION AND DEVELOPMENT
EXPENDITURE**

During the year ended 31 December 2017, amortisation amounting to US\$3,995,964 (2016: US\$3,995,964) was charged to profit or loss.

As at 31 December 2017 and 2016, management believes that there is no impairment of deferred exploration and development expenditure.

	2017	2016	
Biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan sehubungan dengan area yang telah mencapai tahap produksi komersial-Blok Kohong:			Deferred exploration and development expenditure related to commercially producing area Kohong Block:
Nilai tercatat	124,531,549	124,512,269	Carrying amount
Dikurangi:			Less:
Akumulasi amortisasi	<u>(32,945,242)</u>	<u>(28,949,278)</u>	Accumulated amortisation
Nilai tercatat	91,586,307	95,562,991	Carrying amount
Biaya eksplorasi yang ditangguhkan sehubungan dengan area yang belum mencapai tahap produksi secara komersial:			Deferred exploration expenditure incurred for areas which have not reached the stage of commercial production:
Nilai tercatat - saldo awal:			Carrying amount – beginning balance:
Blok New Kohong	15,312,836	15,312,836	New Kohong block
Blok Telakon	5,303,525	5,303,525	Telakon block
Penambahan:			Additions:
Blok New Kohong	-	-	New Kohong block
Blok Telakon	-	-	Telakon block
Nilai tercatat - saldo akhir:			Carrying amount - ending balance:
Blok New Kohong	15,312,836	15,312,836	New Kohong block
Blok Telakon	<u>5,303,525</u>	<u>5,303,525</u>	Telakon block
	<u>20,616,361</u>	<u>20,616,361</u>	
	<u>112,202,668</u>	<u>116,179,352</u>	

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

					2017
	<i>Saldo awal/ Beginning Balance</i>	<i>Penambahan/ Additions</i>	<i>Pengurangan/ Disposals</i>	<i>Transfer/ Transfer</i>	<i>Saldo akhir/ Ending Balance</i>
Harga perolehan					
<i>Kepemilikan langsung:</i>					
Bangunan	5,111,663	-	-	-	5,111,663
Infrastruktur	222,922,430	65,617,619	-	-	288,540,049
Peralatan dan perlengkapan kantor	5,115,268	9,795	-	-	5,125,063
Kendaraan	697,243	-	-	-	697,241
Alat berat	245,240,938	12,330,318	-	-	257,571,258
	479,087,542	77,957,732	-	-	557,045,274
<i>Aset sewa pembiayaan:</i>					
Alat berat	155,178,803	-	-	-	155,178,803
Aset dalam penyelesaian	46,404,059	-	-	(46,404,059)	-
	680,670,404	77,957,732	-	(46,404,059)	712,224,077
Akumulasi penyusutan					
<i>Kepemilikan langsung:</i>					
Bangunan	(5,099,423)	(12,240)	-	-	(5,111,663)
Infrastruktur	(65,698,283)	(18,160,637)	-	-	(83,858,920)
Peralatan dan perlengkapan kantor	(10,365,343)	-	5,338,350	-	(5,026,993)
Kendaraan	(653,221)	(13,022)	-	-	(666,243)
Alat berat	(199,673,120)	(8,825,912)	-	-	(208,499,032)
	(281,489,390)	(27,011,811)	5,338,350	-	(303,162,851)
<i>Aset sewa pembiayaan:</i>					
Alat berat	(131,726,682)	(6,686,757)	-	-	(138,413,439)
	(413,216,072)	(33,698,568)	5,338,350	-	(441,576,290)
Nilai buku bersih	267,454,332				270,647,787
<i>Net book value</i>					

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

	2016				
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan /Disposals	Transfer/ Transfer	Saldo akhir/ Ending balance
Harga perolehan					
<i>Kepemilikan langsung:</i>					
Bangunan	5,111,663	-	-	-	5,111,663
Infrastruktur	222,922,430	-	-	-	222,922,430
Peralatan dan perlengkapan kantor	5,110,502	4,766	-	-	5,115,268
Kendaraan	657,813	39,430	-	-	697,243
Alat berat	<u>255,748,523</u>	-	<u>(10,507,585)</u>	-	<u>245,240,938</u>
	489,550,931	44,196	(10,507,585)	-	479,087,542
<i>Aset sewa pembiayaan:</i>					
Alat berat	155,178,803	-	-	-	155,178,803
Kendaraan	-	-	-	-	-
Aset dalam penyelesaian	<u>46,404,059</u>	-	-	-	<u>46,404,059</u>
	691,133,793	44,196	(10,507,585)	-	680,670,404
Akumulasi penyusutan					
<i>Kepemilikan langsung:</i>					
Bangunan	(5,099,423)	-	-	-	(5,099,423)
Infrastruktur	(60,123,916)	(5,574,367)	-	-	(65,698,283)
Peralatan dan perlengkapan kantor	(4,899,572)	(5,465,771)	-	-	(10,365,343)
Kendaraan	(644,853)	(8,369)	-	-	(653,221)
Alat berat	<u>(201,941,231)</u>	<u>(8,618,026)</u>	<u>10,886,138</u>	-	<u>(199,673,120)</u>
	(272,708,995)	(19,666,533)	10,886,138	-	(281,489,390)
<i>Aset sewa pembiayaan:</i>					
Alat berat	(124,869,405)	(6,857,277)	-	-	(131,726,682)
Kendaraan	-	-	-	-	-
	<u>(397,578,400)</u>	<u>(26,523,809)</u>	<u>10,886,138</u>	-	<u>(413,216,072)</u>
Nilai buku bersih	<u>293,555,393</u>				<u>267,454,332</u>
					Net book value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses were allocated as follows:

	2017	2016
Beban pokok penjualan	28,339,382	26,497,646
Beban umum dan administrasi	20,837	26,163
	<u>28,360,219</u>	<u>26,523,809</u>

*Cost of goods sold
General and administrative
expenses*

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Manajemen telah melakukan pengkajian kembali atas estimasi umur ekonomis dan nilai sisa di akhir tahun. Tidak ada perubahan yang signifikan diperlukan dari pengkajian ini.

Perhitungan kerugian atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

10. FIXED ASSETS (continued)

Management has reassessed the estimated economic lives and residual values at year-end. There is no significant change necessary from this review.

The calculation of losses on disposals of fixed assets was as follows:

	2017	2016	
Harga perolehan	-	10,507,583	<i>Acquisition costs</i>
Akumulasi penyusutan	-	(10,507,583)	<i>Accumulated depreciation</i>
Nilai buku aset tetap	-	-	<i>Carrying value of fixed assets</i>
Penerimaan dari pelepasan aset tetap	-	526,938	<i>Proceeds from disposal of fixed assets</i>
Keuntungan atas pelepasan aset tetap	-	526,938	<i>Profit on disposal of fixed assets</i>

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek-proyek yang masih dalam tahap konstruksi pada akhir periode pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Construction-in-progress represents projects which were still under construction at the end of the reporting period as follows:

	2016	Percentase penyelesaian/ % of completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated completion date
Tempat tinggal, kantor dan prasarana/ <i>Mine camp, offices and facilities</i>	18,932,857	99%	<i>Desember/December 2016</i>
Pelabuhan dan lapangan terbang/ <i>Port and airstrip</i>	5,290,062	99%	<i>Desember/December 2016</i>
Alat berat/Heavy equipment	<u>22,181,141</u> <u>46,404,060</u>	97%	<i>Desember/December 2016</i>

Proyek-proyek tersebut dimulai di periode sebelumnya sebagai fasilitas pendukung terkait peningkatan kapasitas produksi, dan saat ini semua proyek tersebut telah selesai proses pembangunannya. Di tahun 2017 aset dalam proses tersebut direklasifikasi kedalam masing-masing kelompok aset terkait.

These projects were initiated during past periods as supporting facilities in order to increase the production capacity, and now all projects have been completed. In 2017 management reclassified those constructions-in-progress into assets based on their asset group.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal dan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016	
Alat berat	121,444,956	121,444,956	Heavy equipment
Bangunan	19,081,054	19,081,054	Buildings
Kendaraan	703,925	703,925	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan			
Kantor	3,177,775	3,177,775	Office furniture and equipment
	<u>144,407,710</u>	<u>144,407,710</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh aset tetap Grup telah diasuransikan sesuai dengan keadaan perusahaan, lokasi serta penggunaan aset.

Semua aset tetap di atas dimiliki Grup secara sah dan didukung bukti kepemilikan yang memadai. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, sebagian dari aset tetap dijaminkan untuk fasilitas pinjaman jangka panjang (Catatan 14a).

10. FIXED ASSETS (continued)

Fixed assets acquisition costs which have been fully depreciated and still in use as at 31 December 2017 and 2016 are as follows:

	2017	2016	
Alat berat	121,444,956	121,444,956	Heavy equipment
Bangunan	19,081,054	19,081,054	Buildings
Kendaraan	703,925	703,925	Vehicles
Peralatan dan perlengkapan			
Kantor	3,177,775	3,177,775	Office furniture and equipment
	<u>144,407,710</u>	<u>144,407,710</u>	

As at 31 December 2017 and 2016, the Group's fixed assets were insured as deemed appropriate for the circumstances of the Company and the location and utility of the assets.

All assets are owned by the Group legally and supported by sufficient evidence of ownership. As at 31 December 2017 and 2016, certain of the fixed assets were pledged to a long-term borrowing facility (Note 14a).

11. PROPERTI PERTAMBANGAN**11. MINING PROPERTIES**

	2017	2016	
Harga perolehan	172,925,459	172,925,459	Acquisition costs
Akumulasi amortisasi			Accumulated amortisation
Saldo awal	(33,180,350)	(29,748,096)	Beginning balance
Amortisasi	(3,432,254)	(3,432,254)	Amortisation
Nilai tercatat	<u>136,312,855</u>	<u>139,745,109</u>	Carrying Value

Properti pertambangan merupakan penyesuaian nilai wajar yang diperoleh dari akuisisi AKT.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai inti properti pertambangan.

Mining properties represent the fair value adjustments derived from AKT's acquisition.

As at 31 December 2017 and 2016 value of management believes that there is no impairment of the intrinsic value of mining properties.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

12. UTANG USAHA

12. TRADE PAYABLES

	2017	2016	
Pihak ketiga:			Third parties:
Dolar AS	729,643	4,643,779	US Dollars
Rupiah	8,689,216	-	Rupiah
Lain-lain	2,794,085	-	Others
	12,212,944	4,643,779	

Utang usaha berasal dari pembelian barang dan jasa.

Trade payables are from purchases of supplies and services.

Seluruh saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 timbul dari transaksi dengan pihak ketiga.

All trade payables balances as at 31 December 2017 and 2016 arise from transactions with third parties.

13. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

13. ACCRUED EXPENSES

	2017	2016	
Bunga dan beban keuangan lainnya	-	34,977	<i>Interest and other finance costs</i>
Lain-lain	13,031,634	13,351,726	<i>Others</i>
	13,031,634	13,386,703	

14. PINJAMAN

a. Pinjaman jangka panjang

14. BORROWINGS

a. Long-term borrowings

	2017	2016	
Dolar AS			US Dollars
Standard Chartered Bank	770,990,543	770,990,543	Standard Chartered Bank
	770,990,543	770,990,543	
Dikurangi: Biaya keuangan yang belum diamortisasi	(8,170,228)	(10,170,230)	<i>Less: Unamortised financing cost</i>
	762,820,315	760,820,313	
Dikurangi: Bagian lancar Bagian jangka panjang	762,820,315	760,820,313	<i>Less: Current portion Non-current portion</i>
	-	-	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

14. PINJAMAN (lanjutan)**SCB**

Pada tanggal 11 Januari 2012, Perusahaan menandatangani fasilitas pinjaman berjangka dengan SCB senilai AS\$1 miliar untuk pendanaan akuisisi tidak langsung atas 23,8% ARM plc melalui akuisisi saham Borneo Bumi dan Bumi Borneo.

Transaksi berikutnya mengakibatkan Borneo Bumi menjadi 100% anak Perusahaan dan memegang langsung 23,8% (57,235,656 saham) di ARM plc.

Pada tanggal 15 Juli 2015, Perusahaan (bersama dengan pemegang saham lainnya) menerima penawaran tunai terbuka dari Asia Coal Energy Ventures Limited (perusahaan yang terkait dengan Grup Sinarmas) dan menjual seluruh saham yang dimilikinya di ARM plc (57,235,656 saham biasa) untuk 56 sen per saham. Saham ARM plc sebenarnya telah diagunkan ke SCB berdasarkan perjanjian pinjaman Perusahaan dengan SCB, dan hasil penjualan (£32.051.967) dan dana tersebut ditarik oleh SCB sebagai pembayaran wajib pinjaman SCB Perusahaan (sama dengan £45,942,685).

Fasilitas ini bertenor 60 bulan, dengan jadwal pembayaran kembali secara triwulan dimulai sejak 30 September 2012. Tingkat bunga atas fasilitas ini adalah 5,65% di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri dan 6,15% di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri.

Fasilitas pinjaman ini dijamin, antara lain, dengan saham-saham entitas anak yang dimiliki Perusahaan dan aset-aset AKT dan BMS ("Penjamin").

Pinjaman ini memiliki persyaratan antara lain:

- Rasio utang terhadap EBITDA tidak lebih dari 2,5 kali mulai 1 Januari 2014;
- Rasio arus kas terhadap pembayaran bunga dan pokok tiap tahunnya tidak kurang dari 1,3 kali;
- Nilai kekayaan bersih berwujud tidak kurang dari AS\$800 juta; dan
- Total pengeluaran untuk belanja modal Grup, yang dananya diperoleh dari arus kas, tiap tahunnya tidak boleh melebihi AS\$35 juta, kecuali ketika menggunakan kas yang diperoleh dari 50% sisa kas yang menjadi bagian Grup.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

14. BORROWINGS (continued)**SCB**

On 11 January 2012, the Company signed a term facility agreement with SCB amounting to US\$1 billion for the purpose of funding the indirect acquisition of 23,8% of ARM plc through the acquisition the equity shares of Borneo Bumi and Bumi Borneo.

Subsequent transactions resulted in Borneo Bumi becoming a 100% subsidiary of the Company and holding directly 23,8% (57,235,656 shares) in ARM plc.

On 15 July 2015, the Company (along with all other shareholders) accepted the open cash offer of Asia Coal Energy Ventures Limited (a company associated with the Sinarmas Group) and sold all of the shares it held in ARM plc (57,235,656 ordinary shares) for 56 pence per share. The ARM plc shares were in fact pledged to SCB under the Company's loan agreement with SCB, and the proceeds from the sale (£32,051,967) were subsequently swept away by SCB as a mandatory prepayment of the Company's SCB loan (then equivalent to £45,942,685).

This facility has a tenor of 60 months, and is repayable on a quarterly basis commencing from 30 September 2012. The loan bears interest at 5.65% above LIBOR for offshore lenders and 6.15% above LIBOR for onshore lenders.

This loan facility was collateralised by, among others, the Company's shares in subsidiaries and AKT's and BMS' assets (the "Guarantors").

This borrowing imposes covenants such as:

- Debt to EBITDA ratio shall not exceed 2.5 times from 1 January 2014;
- The ratio of cash flows to the payment of interest and principal each year not to be less than 1.3;
- Tangible net worth of at least US\$800 million; and
- The aggregate capital expenditure of the Group that is funded from cash flows, in each year shall not exceed US\$35 million, except when utilising cash from the Group's 50% share of any excess cash.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

14. PINJAMAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan tidak memenuhi beberapa persyaratan keuangan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pinjaman, khususnya nilai kekayaan bersih berwujud Grup dibawah saldo minimum, dan rasio utang terhadap EBITDA.

Karena pelanggaran klausul perjanjian ini, Standard Chartered Bank memiliki hak secara hukum untuk meminta pembayaran dari jumlah pinjaman yang masih belum dibayar.

Karena Perusahaan belum menerima pernyataan pembebasan dari kreditur pada tanggal atau sebelum 31 Desember 2017, saldo yang masih belum dibayar disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

ARM plc delisting pada bulan Agustus 2015 dan Perusahaan sudah tidak memiliki kepentingan lagi (Lihat catatan 37a).

b. Pinjaman jangka pendek

Pada tanggal 14 Desember 2011, AKT dan FGB menandatangani perjanjian fasilitas pre-ekspor yang kemudian diubah dengan perjanjian tertanggal 19 Desember 2011 dimana FGB menyediakan pinjaman pra-ekspor dengan nilai maksimum mencapai AS\$350 juta atau 85% dari nilai kontrak penjualan batubara ke Noble, mana yang lebih rendah. Fasilitas ini tersedia untuk ditarik selama tiga bulan sejak tanggal perjanjian. Tingkat bunga untuk fasilitas ini adalah sebesar LIBOR ditambah 2,75%.

Fasilitas ini dijaminkan dengan piutang usaha, persediaan batubara dan kontrak penjualan dengan Noble.

Pada tanggal 23 April 2013, AKT mengadakan perjanjian fasilitas *letter of credit* (L/C) dan *trust receipt* (T/R) dengan FGB. Jumlah maksimum keseluruhan pokok untuk masing-masing fasilitas tersebut adalah AS\$15 juta dan untuk setiap waktunya jumlah ini tidak boleh melebihi AS\$15 juta. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, fasilitas tersebut telah sepenuhnya dicairkan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

14. BORROWINGS (continued)

As at 31 December 2017, the Company did not comply with certain of the financial covenants as set out in the loan agreement, in particular the Group's tangible net worth position was below the minimum required balance, and the debt to EBITDA ratio.

Due to this covenant breach, Standard Chartered Bank was contractually entitled to request repayment of the outstanding loan amount.

As the Company had not receive any statement from the lenders regarding a waiver of the covenants at or before 31 December 2017, the outstanding balance was presented as a current liability.

ARM plc delisted in August 2015 and the Company has no further interest therein (See also note 37a).

b. Short-term loan

On 14 December 2011, AKT and FGB entered into a pre-export facility agreement which was amended on 19 December 2011 where FGB provided pre-export financing with a maximum value of US\$350 million or 85% of the sales contract with Noble, whichever is lower. This facility is available for drawdown within three months starting from the date of the agreement. The interest rate for this facility is LIBOR plus 2.75%.

The facility is collateralised by trade receivables, coal inventory and the sales contract with Noble.

On 23 April 2013, AKT entered into letter of credit (L/C) and trust receipt (T/R) facility agreement with FGB. The maximum aggregate principal amount of L/C facility and T/R facility was US\$15 million and at any given time the aggregate of the loan and the amount under all outstanding L/Cs shall not exceed US\$15 million. As at 31 December 2017 and 2016 the facility was fully drawn.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/51 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN (lanjutan)

Perjanjian pinjaman AS\$350 juta dari FGB (yang telah berubah nama menjadi Bank Abu Dhabi Pertama sejak Agustus 2017) telah disajikan kembali dan direvisi beberapa kali yang terakhir ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2017 dimana jangka waktu dan syarat perjanjian fasilitas (termasuk bunga belum bayar) diubah sesuai dengan PKPU Settlement Agreement. FAB telah mempertahankan dan menyajikan kembali keamanannya termasuk fidusia atas persediaan batubara dan piutang usaha.

Demikian pula fasilitas AS\$15 juta Fasilitas Perdagangan Tanpa Kontrak juga diubah pada tanggal 19 Juli 2017 untuk mematuhi Perjanjian Penyelesaian PKPU.

Pinjaman dari FAB saat ini telah menjadi kewajiban yang direstrukturasi sesuai dengan perjanjian Kesepakatan Penyelesaian PKPU AKT (Lihat catatan 16).

15. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

14. BORROWINGS (continued)

The US\$350 million loan agreement from FGB (which has changed its name to First Abu Dhabi Bank since August 2017) has been restated and revised several times the most recent being signed on 19 July 2017 wherein the tenor and terms of the facility agreement (including unpaid interest) were amended to accord with the PKPU Settlement Agreement. FAB has retained and restated its security including fiducia over coal stockpiles and accounts receivable.

Similarly the US\$15 million Uncommitted Trade Finance facility was also amended on 19 July 2017 to comply with the PKPU Settlement Agreement.

The amounts due to FAB have now become restructured obligations pursuant to the AKT PKPU Settlement Agreement (See also note 16).

15. FINANCE LEASE PAYABLES

	2017	2016	
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Mitra Pinasthika Mustika			PT Mitra Pinasthika
Finance	1,021,808	1,493,553	Mustika Finance
Shinhan Indo Finance	1,637,924	-	Shinhan Indo Finance
Lain-lain	<u>561,817</u>	<u>2,881,232</u>	Other
Jumlah utang sewa pembiayaan	3,221,549	4,374,785	<i>Total finance lease payables</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Bagian lancar	-	(1,493,553)	<i>Current portion</i>
Bagian tidak lancar	<u>3,221,549</u>	<u>2,881,232</u>	<i>Non-current portion</i>

Utang sewa pembiayaan tersebut di atas semuanya timbul akibat kontrak sewa pembiayaan untuk pengadaan alat-alat berat pertambangan oleh PT Borneo Mining Services.

The lease payables as set out above arose from the financial leases of new mining heavy equipment by PT Borneo Mining Services.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/52 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

15. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Syarat-syarat dan ketentuan utama sewa pembiayaan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Grup tidak dibenarkan untuk menjual, meminjamkan, menyewakan, menghapus, atau menghentikan pengendalian langsung atas aset sewa pembiayaan;
- Grup diwajibkan untuk mengasuransikan aset sewa pembiayaan selama jangka waktu sewa pembiayaan; dan
- Semua aset sewa pembiayaan dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan sewa pembiayaan yang bersangkutan.

Kewajiban pembayaran minimum dimasa akan datang atas sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian yang berlaku pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	2017	2016	
Telah jatuh tempo	3,221,549	1,578,213	Payable due
Jatuh tempo kurang dari satu tahun	-	970,660	Payable within one year
Jatuh tempo lebih dari satu tahun namun kurang dari dua tahun	-	<u>2,145,325</u>	Payable later than one year but less than two years
Dikurangi:			Less:
Beban bunga yang telah jatuh tempo	(371,227)	(203,446)	Interest due
Beban bunga yang belum jatuh tempo	-	<u>(115,967)</u>	Future financing charges
Nilai kini pembayaran minimum utang sewa pembiayaan	<u>2,850,322</u>	<u>4,374,785</u>	Present value of minimum finance lease payments

Saldo yang ditanggung pada saat komitmen PKPU AKT kini telah menjadi kewajiban yang direstrukturisasi sesuai dengan Kesepakatan Penyelesaian PKPU (lihat juga catatan 16).

15. FINANCE LEASE PAYABLES (continued)

The significant general terms and conditions of the finance leases are as follows:

- the Group is restricted from selling, lending, leasing, or otherwise disposing of or ceasing to exercise direct control over the leased assets;
- the Group is required to insure the finance lease assets during the leasing period; and
- all leased assets are pledged as collateral for the underlying finance leases.

The future minimum lease payments under the finance lease agreements outstanding at the reporting dates were as follows:

The balances due under lease commitments at the time of the AKT PKPU have now become restructured obligations pursuant to the PKPU Settlement Agreement (see also note 16).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**16. PENJADWALAN KEMBALI PEMBAYARAN
UTANG PT ASMIN KOALINDO TUHUP**

Pada bulan Januari 2016 AKT secara sukarela mengadakan suatu kegiatan restrukturisasi hutang secara formal (PKPU). Proses hukum tersebut menghasilkan Kesepakatan Penyelesaian Persetujuan Pengadilan yang menyetujui AKT untuk merestrukturisasi hutangnya:

- Masa tenggang dari pembayaran kembali diberikan antara 6 bulan dan 3 tahun sesuai dengan kelas kreditur yang berbeda (kecil sampai besar).
- Pelunasan hutang dan pembayaran kepada kreditur perdagangan ditangguhkan selama 1 sampai 9 tahun sesuai dengan kelas kreditur yang berbeda.
- Dikenakan bunga dengan tenggang waktu 2-4 tahun.
- Sejumlah AS\$60 juta dari hutang PT Artha Contractors disetujui untuk dikonversi menjadi 80% kepemilikan saham PT Asmin Koalindo Tuhup.

Kesepakatan Penyelesaian ini telah disetujui oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada tanggal 4 April 2016 namun gugatan selanjutnya atas keputusan Pengadilan diluncurkan oleh Noble Resource International Pte. Ltd dan Standard Chartered Bank. Gugatan Noble Resource International Pte. Ltd ditarik pada bulan Juni 2016, dan gugatan Standard Chartered Bank diputuskan secara formal

Keputusan tertulis yang formal masih dalam proses pelepasan oleh Pengadilan, Administrator akan menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan legalisasi (hukum tetap). Kesepakatan Penyelesaian (periklanan di 2 surat kabar nasional dan pengumuman dalam Lembaran Negara).

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**16. RESCHEDULING OF PT ASMIN KOALINDO
TUHUP'S DEBT PAYMENT**

In January 2016, AKT voluntarily entered into a formal debt restructuring (PKPU) activity. The legal process resulted in a Court Approved Settlement Agreement which allowed AKT to restructure its debt:

- A grace period from any repayments was granted of between 6 months and 3 years according to the different classes of creditors (small to large).
- creditors were deferred over 1 to 9 years according to the different classes of creditors.
- Interest grace periods of 2-4 years were granted.
- Some US\$60 million of PT Artha Contractors debt was approved to be converted into 80% ownership of the share capital of PT Asmin Koalindo Tuhup.

The Settlement Agreement was approved by the Commercial Court of Jakarta on 4 April 2016 however subsequent challenges to the Court's decision were launched by Noble Resources International Pte. Ltd and Standard Chartered Bank. Noble's challenge was withdrawn in June 2016, and the SCB challenge was formally rejected in October 2017.

The formal written decision by the Court has been received and the Administrator has completed the steps required to finalise the legalisation (hukum tetap) of the Settlement Agreement (advertising in 2 national newspapers and announcement in the State Gazette).

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/54 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**16. PENJADWALAN KEMBALI PEMBAYARAN
UTANG PT ASMIN KOALINDO TUHUP
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 saldo kewajiban restrukturisasi PKPU sebagai berikut :

	2017	2016	
First Abu Dhabi Bank Cabang Singapura	376,412,498	376,412,498	First Abu Dhabi Bank Singapura Branch
PT Samudra Pasific Marine	98,542,650	98,542,650	PT Samudra Pasific Marine
Artha Contractor	87,352,370	87,352,370	PT Artha Contractor
PT Komatsu Astra Finance	36,180,297	36,180,297	PT Komatsu Astra Finance
Marubeni Corporation	13,206,153	13,206,153	Marubeni Corporation
PT Marubeni Indonesia	7,734,834	7,734,834	PT Marubeni Indonesia
Mitra Pinastika Mustika Finance/ANZ	7,573,470	7,573,470	Mitra Pinastika Mustika Finance/ANZ
Graha Lintas Property	6,172,807	6,172,807	Graha Lintas Property
PT Caterpillar Finance Indonesia	5,399,458	5,399,458	PT Caterpillar Finance Indonesia
PT Indomobil Finance Indonesia	1,733,835	1,733,835	PT Indomobil Finance Indonesia
Pihak ketiga	173,509,160	173,509,160	Third parties
Jumlah	<u>813,817,532</u>	<u>813,817,532</u>	Total

17. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	2017	2016	
Perusahaan			The Company
Pajak penghasilan badan	-	-	Corporate income tax
Pajak Pertambahan Nilai	131,954	90,404	Value Added Tax
	<u>131,954</u>	<u>90,404</u>	
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai	8,418,196	10,925	Value Added Tax
Pajak penghasilan badan	324,120	-	Corporate income tax
	<u>8,418,196</u>	<u>10,925</u>	
Pajak dibayar dimuka untuk naik banding atas surat ketetapan pajak	45,519,628	46,346,589	Prepaid tax from tax Assessment
	<u>45,519,628</u>	<u>46,346,589</u>	
	<u>54,261,944</u>	<u>46,357,514</u>	
Jumlah	<u>54,393,898</u>	<u>46,447,918</u>	Total
Dikurangi:			Less:
Pajak Pertambahan Nilai	8,550,150	-	Value Added Tax
Bagian lancar			Current portion
Pajak Penghasilan Badan	324,120	-	Corporate income tax
Pajak dibayar dimuka untuk naik banding atas surat ketetapan pajak	45,519,628	46,447,918	Prepaid tax from tax assessment appeal
	<u>45,519,628</u>	<u>46,447,918</u>	
Bagian tidak lancar	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Non-current portion</i>

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/55 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	2017	2016	
Utang pajak penghasilan			
Badan			Corporate income taxes payable
Perusahaan	-	-	The Company
Entitas anak	-	-	Subsidiaries
Utang pajak lainnya			Other taxes payable
Perusahaan			The Company
Pasal 4(2)	-	7,592	Article 4(2)
Pasal 21	-	7	Article 21
Pasal 23/26	-	227	Article 23/26
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	Value Added Tax
	<hr/>	<hr/>	
	-	7,826	
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	Value Added Tax
Pasal 4(2)	-	-	Article 4(2)
Pasal 21	-	-	Article 21
Pasal 23/26	-	-	Article 23/26
Pasal 25	-	-	Article 25
	<hr/>	<hr/>	
	-	7,826	

c. (Manfaat)/beban pajak penghasilan

c. Income tax (benefit)/expense

	2017	2016	
Perusahaan			The Company
Kini	-	-	Current
Tangguhan	805,655	1,389,383	Deferred
	<hr/>	<hr/>	
	805,655	1,389,383	
Entitas anak			Subsidiaries
Kini	-	-	Current
Tangguhan	20,074,290	23,736,756	Deferred
	<hr/>	<hr/>	
	20,074,290	23,736,756	
Konsolidasi			Consolidated
Kini	-	-	Current
Tangguhan	19,268,635	25,126,139	Deferred
	<hr/>	<hr/>	
	19,268,635	25,126,139	

Perhitungan atas (manfaat)/beban pajak penghasilan badan kini adalah sebagai berikut:

The calculation of current corporate income tax (benefit)/expense is as follows:

	2017	2016	
Laba/(rugi) konsolidasian sebelum pajak penghasilan	53,592,195	184,061,313	<i>Consolidated profit /(loss)before income tax</i>
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan – entitas anak	(60,329,377)	(184,451,597)	<i>Profit/(loss) before income tax subsidiaries</i>
Penyesuaian akibat eliminasi konsolidasian	43,685,883	31,380,990	<i>Adjusted for consolidation eliminations</i>
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan – Perusahaan	36,948,701	30,990,706	<i>Profit/(loss) before income tax - the Company</i>

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/56 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

	2017	2016	
Perbedaan tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final	(15,183)	(675)	<i>Income subject to final income tax</i>
Rugi/(laba) dari investasi pada anak perusahaan	(40,253,629)	(27,948,736)	<i>Loss/(income) from investment in subsidiaries</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	97,492	2,444,872	<i>Non-deductible expenses</i>
Perbedaan temporer:			<i>Temporary differences:</i>
Perbedaan antara nilai buku aset tetap akuntasi dan pajak	(41,322)	(41,322)	<i>Difference between commercial and tax value of fixed assets</i>
Perbedaan antara nilai buku biaya keuangan yang ditangguhkan akuntansi dan pajak	(5,687,953)	(5,687,953)	<i>Difference between commercial and tax net book value of deferred financing costs</i>
Penyisihan imbalan karyawan	12	171,738	<i>Provision for employee benefits</i>
	<u>(45,900,583)</u>	<u>(31,062,076)</u>	
Rugi/(laba) pajak - Perusahaan	(8,951,882)	(71,370)	<i>Fiscal loss/(profit) - the Company</i>
Rugi/(laba) pajak yang dikompensasi dari masa pajak sebelumnya	-	-	<i>Tax loss/(profit) carried forward</i>
Pajak penghasilan kini	<u>(8,951,882)</u>	<u>(71,370)</u>	
- Perusahaan	-	-	<i>Current income tax - Company -</i>
- Entitas anak	-	-	<i>Subsidiaries -</i>
Pajak penghasilan kini-konsolidasian	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Consolidated current income tax expense</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pembayaran pajak dimuka	-	-	<i>Prepaid taxes</i>
- Entitas anak	-	-	<i>Subsidiaries -</i>
Kurang bayar pajak penghasilan badan konsolidasi	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Consolidated income tax under payment</i>

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/57 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pajak atas laba/rugi Grup konsolidasi sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang mungkin muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas rugi/laba masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi dalam jumlah sebagai berikut:

	2017	2016	
Laba/rugi konsolidasian sebelum pajak penghasilan	53,592,195	184,061,313	<i>Consolidated profit/loss before income tax</i>
Pajak dihitung dengan tarif pajak efektif	24,319,519	46,015,328	<i>Tax calculated at effective tax rate</i>
Dampak pajak penghasilan dari:			<i>Income tax effects from:</i>
- Penghasilan tidak kena pajak	(8,782)	(30,655,569)	<i>Income not subject to tax-</i>
- Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak	(5,042,102)	(1,903,290)	<i>Non-deductible expenses- Adjustment to deferred tax assets</i>
- Penyesuaian aset pajak tangguhan	-	11,669,670	<i>Income tax (benefit)/expenses</i>
(Manfaat)/beban pajak penghasilan	19,268,635	25,126,139	

Pajak penghasilan kini untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dihitung berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak ("SPT") pada saat SPT selesai disusun dan dilaporkan kepada Direktorat Jendral Pajak ("DJP"), atau ketika keberatan/banding diputuskan.

d. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Seluruh aset pajak tangguhan diperkirakan hanya akan dapat dipulihkan setelah dua belas bulan.

Analisis liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	2017	2016	
Liabilitas pajak tangguhan:			<i>Deferred tax liabilities:</i>
- Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan setelah 12 bulan	(585,338)	(1,390,993)	<i>Deferred tax liabilities- to be recovered after more than 12 month</i>
- Liabilitas pajak tangguhan yang akan dipulihkan dalam 12 bulan	-	-	<i>Deferred tax liabilities - to be recovered within 12 months</i>
	(585,338)	(1,390,993)	

Rincian dan mutasi aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

17. TAXATION (continued)

The tax on the Group's consolidated profit/loss before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to the loss/profit of the consolidated entities follows:

Consolidated profit/loss before income tax
Tax calculated at effective tax rate
Income tax effects from:
Income not subject to tax-
Non-deductible expenses- Adjustment to deferred tax assets
Income tax (benefit)/expenses

The current income tax for the years ended 31 December 2017 and 2016 was based on estimated taxable income. The amount may be subject to adjustments to conform with the related annual tax return when it is prepared and filed with the Directorate General of Taxation ("DGR"), or when an assessment by the DGT is received, or if an objection/appeal is decided.

d. Deferred tax assets and liabilities

All of the deferred tax assets are only expected to be recovered after more than twelve months.

The analysis of deferred tax liabilities is as follows:

The detail and movement in deferred income tax assets and liabilities during the years is as follows:

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

	2017	2016	
Laba/Rugi fiskal yang diakui	125,187,164	142,048,476	<i>Fiscal profit/loss recognized</i>
Penyisihan imbalan karyawan	487,434	584,326	<i>Provision for employee benefits</i>
Penyisihan reklamasi tambang dan penutupan tambang	517,652	517,652	<i>Provision for mine reclamation and mine closure</i>
Perbedaan antara nilai buku aset tetap akuntansi dan pajak	(13,999,407)	(11,186,413)	<i>Difference between accounting and tax net book value of fixed assets</i>
Perbedaan aset tetap sewa pembiayaan dan ansuran sewa	31,276,030	29,583,695	<i>Difference in fixed assets under leases and lease instalments</i>
Perbedaan nilai buku biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan antara akuntansi dan pajak	(17,756,673)	(15,761,249)	<i>Difference between accounting and tax net book value of deferred exploration and development expenditure</i>
Lain-lain	(419,081)	(419,079)	<i>Other</i>
	125,293,119	145,367,408	
Aset pajak tangguhan pada awal tahun	145,367,408	169,104,162	<i>Deferred tax assets at the beginning of the year</i>
Dikreditkan pada laporan laba rugi	(20,074,289)	(23,736,754)	<i>Credited to the profit or loss</i>
Aset pajak tangguhan pada akhir tahun	125,293,119	145,367,408	<i>Deferred tax assets at the end of the year</i>
 Liabilitas pajak tangguhan			
	2017	2016	Deferred tax liabilities
Penyisihan imbalan karyawan	-	(133,588)	<i>Provision for employee benefits</i>
Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	(2,237,970)	-	<i>Tax loss carried for forward</i>
Penyisihan imbalan karyawan	(133,591)	-	<i>Provision for employee benefits</i>
Penyisihan reklamasi tambang dan penutupan tambang	-	-	<i>Provision for mine reclamation and mine closure</i>
Perbedaan nilai buku akuntansi dan pajak atas aset tetap	(19,786)	(30,116)	<i>Difference between accounting and tax net book value of fixed assets</i>
Perbedaan nilai buku akuntansi dan pajak atas biaya keuangan yang ditangguhkan	2,976,686	1,554,697	<i>Difference between accounting and tax net book value of deferred financing costs</i>
Lain-lain	-	-	<i>Others</i>
	585,339	1,390,993	
Liabilitas pajak tangguhan pada awal tahun	1,390,993	1,609	<i>Deferred tax liabilities at the beginning of the year</i>
(Dikreditkan)/dibebankan pada laporan laba rugi	(805,654)	1,389,384	<i>(Credited)/charged to the profit or loss</i>
Liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun	585,339	1,390,993	<i>Deferred tax liabilities at the end of the year</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rugi fiskal Grup yang dibawa ke masa depan, yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di masa mendatang selama delapan tahun, untuk AKT, terjadi di tahun fiskal berikut:

Entitas/ <i>Entity</i>	Tahun Fiskal/ <i>Fiscal year</i>	Tahun terakhir berlaku/ <i>Expiration year</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>
AKT	2013	2021	15,116,043
	2014	2022	194,701,384
	2015	2023	286,695,859
BMS	2016	2021	4,191,550
BLEM	2017	2022	8,951,882

e. Surat ketetapan pajak

Pada 2015, BLEM menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terkait Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) untuk tahun fiskal 2012. Tuntutan BLEM ditolak dan banding diajukan ke Pengadilan Pajak. BLEM mengajukan banding dikarenakan lebih bayar sebesar Rp16.945.876.703 atau setara dengan AS\$1.278.194. DJP telah mengajukan peninjauan atas putusan Pengadilan Pajak dan menunggu hasil keputusan tersebut.

DJP mengeluarkan perintah pemeriksaan untuk tahun pajak 2011 dan pemeriksaan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas beberapa pajak, sebagai berikut:

- hutang pajak penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2011 sebesar AS\$43.078.625;
- hutang pajak penghasilan Pasal 4 (2) untuk tahun fiskal 2011 sebesar Rp6.286.048.448;
- hutang pajak penghasilan Pasal 15 untuk tahun fiskal 2011 sebesar Rp2.423.651.611;
- hutang pajak penghasilan Pasal 23 untuk tahun fiskal 2011 sebesar Rp121.542.484.096;
- 26 liabilitas pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2011 sebesar Rp87.000.504.026;
- hutang pajak pertambahan nilai (pajak) untuk tahun pajak 2011 sebesar Rp104.803.546.996;
- hutang pajak pertambahan nilai (WABA) untuk tahun fiskal 2011 sebesar Rp400.836.598.137; dan
- hutang pajak pertambahan nilai (JLN) untuk tahun fiskal 2011 sebesar Rp40.312.868.561.

17. TAXATION (continued)

The Group's tax losses carried forward, which can be offset against future taxable income for up to eight years, in the case of AKT, were incurred in the following fiscal years:

Entitas/ <i>Entity</i>	Tahun Fiskal/ <i>Fiscal year</i>	Tahun terakhir berlaku/ <i>Expiration year</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>
AKT	2013	2021	15,116,043
	2014	2022	194,701,384
	2015	2023	286,695,859
BMS	2016	2021	4,191,550
BLEM	2017	2022	8,951,882

e. Tax assessment letters

In 2015, BLEM received a Notice of Underpaid Tax Assessment (SKPKB) related to Corporate Income Tax (PPh Badan) for the 2012 fiscal year. The BLEM objection was rejected and an appeal was lodged to the Tax Court. The BLEM appeal was partially granted resulting in an overpayment of Rp16,945,876,703 or equivalent to US\$1,278,194. The DGT has filed for a review of the Tax Court ruling and a decision is awaited.

the DGT issued an inspection order for the 2011 tax year and the examination resulted in an Underpayment Tax Assessment Letter on several taxes, as follows:

- *Corporate income tax payable for fiscal year 2011 amounting to US\$43,078,625;*
- *income tax payable Article 4 (2) for fiscal year 2011 amounting to Rp6,286,048,448;*
- *income tax payable Article 15 for fiscal year 2011 amounting to Rp2,423,651,611;*
- *income tax payable Article 23 for fiscal year 2011 amounting to Rp121,542,484,096;*
- *26 income tax liabilities for fiscal year 2011 amounting to Rp87,000,504,026;*
- *value added tax (tax) payable for tax year 2011 amounting to Rp104,803,546,996;*
- *value added tax payable (WABA) for fiscal year 2011 amounting to Rp400,836,598,137; and*
- *Value Added Tax (JLN) for tax year 2011 amounting to Rp40,312,868,561.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pada bulan Mei 2016, AKT mengajukan keberatan terhadap penilaian pajak, yang sebagian besar ditolak. Pada tahun 2017 AKT mengajukan banding hukum ke Pengadilan Pajak, dimana keputusan tersebut masih ditunda.

Pada tahun 2015, DJP mengeluarkan perintah pemeriksaan lapangan untuk tahun fiskal 2012 dan pemeriksaan tersebut menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas beberapa pajak, sebagai berikut:

- hutang pajak penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2012 sebesar AS\$6.043.278;
- hutang pajak penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp2.379.776.595;
- hutang pajak penghasilan Pasal 15 untuk tahun fiskal 2012 senilai Rp1.453.691.844;
- hutang pajak penghasilan Pasal 23 untuk tahun fiskal 2012 sebesar Rp108.268.166.334;
- 26 liabilitas pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2012 sebesar Rp97.374.385.757;
- hutang pajak pertambahan nilai (WAPU) penghasilan untuk tahun fiskal 2012 sebesar Rp404.656.907.700;
- hutang pajak pertambahan nilai (WABA) penghasilan untuk tahun fiskal 2012 sebesar Rp430.279.933.595; dan
- hutang pajak pertambahan nilai (JLN) penghasilan untuk tahun fiskal 2012 sebesar Rp46.379.191.219.

Pada bulan Mei 2016, AKT mengajukan banding terhadap penilaian pajak, yang kebanyakan ditolak, tetapi prosesnya masih berjalan.

Pada tahun 2017, DJP mengeluarkan Surat Keterangan Perintah Pemeriksaan Awal untuk TF 2014 AKT yang mengakibatkan total utang pajak pertambahan nilai (WAPU) untuk tahun pajak 2014 sebesar Rp82.106.061.910 dan jumlah tersebut telah dibayarkan seluruhnya pada tahun 2017. Proses pemeriksaan masih berlangsung terkait dengan kewajiban pajak lainnya untuk tahun fiskal 2014.

Pada Bulan April 2017 Perusahaan menerima surat keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00464/KEB/WPJ.19/2017 sehubungan dengan pajak penghasilan tahun 2011. Berdasarkan surat tersebut, DJP meyetujui kredit pajak Perusahaan untuk tahun pajak 2011 sebesar AS\$51.574.966.

17. TAXATION (continued)

In May 2016, AKT filed objections against the tax assessments, which were mostly rejected and in 2017 AKT filed legal appeals to the Tax Court, the decisions on which are pending.

In 2015, the DGT issued a field inspection order for the 2012 fiscal year And the examination resulted in an Underpayment Tax Assessment Letter on several taxes, as follows:

- Corporate income tax payable for fiscal year 2012 amounting to US\$6,043,278;
- income tax payable Article 4 (2) for fiscal year 2012 amounting to Rp2,379,776,595;
- income tax payable Article 15 for fiscal year 2012 to totalling at Rp1,453,691,844;
- income tax payable Article 23 for fiscal year 2012 amounting to Rp108,268,166,334;
- 26 income tax liabilities for fiscal year 2012 amounting to Rp97,374,385,757;
- Value added tax debt (WAPU) for fiscal year 2012 amounting to Rp404,656,907,700;
- Value added tax payable (WABA) for fiscal year 2012 amounting to Rp430,279,933,595; and
- Value Added Tax (JLN) for the 2012 tax year amounting to Rp46,379,191,219.

In May 2016, AKT filed appeals against the tax assessments, which were mostly rejected and the process is on going.

In 2017, the DGT issued an Initial Inspection Examination Order Letter for FY 2014 of AKT which resulted in total debt of value added tax (WAPU) for tax year 2014 amounting to Rp82,106,061,910 and this has been paid entirely in 2017. The inspection process is on going related to other tax obligations for fiscal year 2014.

In April 2017, the Company received Decision Letter No. DGT. KEP-00464 / KEB / WPJ.19 / 2017 with respect to 2011 income tax. Based on the letter, the DGT approved the 2011 tax credit for US\$51,574,966.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pembayaran tahun 2011	18,274,732
Pembayaran tahun 2012	31,300,234
Pembayaran tahun 2013	2,000,000
	<hr/>
	51,574,966

Berdasarkan S-KEP DJP di atas maka, Perusahaan seharusnya mengakui lebih bayar bersih atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2011 sebesar AS\$45.570.095.

f. Amnesti pajak

Pada tanggal 31 Maret 2017 (tetapi pada 31 Desember 2015) BLEM dan BMS telah berpartisipasi dalam program pengampunan pajak dan melunasi hutang pajak untuk tahun fiskal 2015 dan tahun sebelumnya.

Partisipasi tersebut mensyaratkan pembayaran kewajiban perpajakan, penarikan atau pembatalan keberatan dan banding yang terhadap keputusan pajak yang beredar, pembayaran pajak final atas aset bersih yang tidak didepositkan pada berbagai tingkat dari 2%-10% dan penyisihan penghapusan pajak yang dibawa. Selain itu, akumulasi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai dan kredit pajak penghasilan hingga tahun pajak 2015 yang dihitung dalam tahun fiskal 2016 telah dihapuskan/dihilangkan.

Amnesti Pajak menghasilkan:

	BMS
Dasar pengenaan uang tebusan	226,398
Uang tebusan amnesti pajak	11,320

AKT tidak mengikuti program tax amnesty karena; (i) AKT tidak memiliki akses dana langsung untuk menyelesaikan semua hutang pajak yang terutang, (ii) penarikan keberatan pajak yang tertunda dan permohonan banding di pengadilan akan menghasilkan hutang pajak tambahan yang material apabila AKT menang, (iii) potensi pembatalan kerugian pajak carried forward melebihi manfaat jika AKT mengikuti program tax amnesty.

g. Administrasi perpajakan

Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing entitas dalam Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DJP dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

17. TAXATION (continued)

*Paid in 2011
Paid in 2012
Paid in 2013*

Based on the above, the Company should recognize net overpayment of corporate income tax for fiscal year 2011 amounting to US\$45,570,095.

f. Tax amnesty

At 31 March 2017 (but as at 31 December 2015) BLEM and BMS participated in the tax amnesty program that eliminates taxes payable for fiscal year 2015 and earlier.

Such participation required payment of outstanding tax liabilities, withdrawal or cancellation of objections and appeals against outstanding tax decisions, a final tax payment for net undeclared assets at various rates from 2%-10% and forfeiture of tax losses carried forward. In addition, the accumulated overpayment of value added tax and income tax credit up to the 2015 tax year calculated in fiscal year 2016 was written off/lost.

The Tax Amnesty resulted in:

BLE		
994,502		Additional assets base
49,725		Applicable amnesty tax

AKT did not participate in the Tax Amnesty program as (i) AKT did not have access to immediate funds to settle all outstanding taxes payable, (ii) the withdrawal of pending tax objections and tax court appeals would result in material additional taxes payable for cases AKT expects to win, and (iii) the potential cancellation of tax losses carried forward far outweighed perceived benefits of participation when AKT did not have any undeclared assets.

g. Tax administration

The taxation laws of Indonesia require that each company in the Group within Indonesia submits individual tax returns on the basis of self-assessment. Under prevailing regulations the DGT may assess or amend taxes within a certain period. For the fiscal years of 2008 and onwards, the period is within five years of the time the tax becomes due.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/62 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM

Struktur pemegang saham Perusahaan, 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan pencatatan yang dibuat oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL

The Company's shareholders at 31 December 2017 and 2016 based on the records maintained by Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), were as follows:

Pemegang saham/Shareholders	2017		
	Jumlah lembar saham/ number of shares issued	Percentase kepemilikan/ Percentange of ownership	Jumlah/ Total
PT Republik Energi & Metal	10,527,564,448	59.5013%	115,961,374
PT Muara Kencana Abadi	12,500	0.0001%	135
Masyarakat/Public	7,001,258,052	40.4986%	78,927,305
	17,528,835,000	100%	194,888,815
Saham simpanan/Treasury shares	164,165,000	1%	1,825,217
	17,693,000,000	100%	196,714,032

Pemegang saham/Shareholders	2016		
	Jumlah lembar saham/ number of shares issued	Percentase kepemilikan/ Percentange of ownership	Jumlah/ Total
REM	10,527,564,448	59.5013%	115,961,374
PT Muara Kencana Abadi	12,500	0.0001%	135
Masyarakat/Public	7,001,258,052	40.4986%	78,927,305
	17,528,835,000	100%	194,888,815
Saham simpanan/Treasury shares	164,165,000	1%	1,825,217
	17,693,000,000	100%	196,714,032

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan mempunyai 164.165.000 lembar saham simpanan yang dibeli kembali selama tahun 2013 dan 2012 dengan total biaya sebesar Rp80,3 miliar (setara dengan AS\$8.380.461).

As at 31 December 2017, the Company had 164,165,000 treasury shares which were repurchased during 2013 and 2012 with total costs of Rp80,3 billion (equivalent to US\$8,380,461).

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Komisaris maupun Direksi Perusahaan yang secara individu memiliki saham Perusahaan adalah Nenie Afwani yang memiliki 100.000 lembar saham.

At 31 December 2017 and 2016, individual Commissioners and Directors of the Company who owned the Company's shares was Nenie Afwani, who owned 100,000 shares.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak ada kepemilikan saham oleh masyarakat yang masing-masing sebesar 5% atau lebih.

At 31 December 2017 and 2016, no public shareholder held 5% or more of the Company's shares.

19. PREMI SAHAM

	2017	2016	
Selisih antara pembayaran yang diterima dengan nilai nominal saham	538,149,979	538,149,979	<i>Excess of proceeds over par value</i>
Biaya emisi saham	(20,470,246)	(20,470,246)	<i>Share issuance costs</i>
Premi saham	517,679,733	517,679,733	<i>Share premium</i>

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/63 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

19. PREMI SAHAM (lanjutan)

Biaya emisi saham merupakan biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan penerbitan saham baru Perusahaan yang dilakukan melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perusahaan (Catatan 1b).

20. CADANGAN WAJIB

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 1/1995 yang diterbitkan pada Maret 1995, sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No. 40/2007 pada bulan Agustus 2007, mewajibkan perseroan terbatas membentuk cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimum 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu yang diberlakukan untuk pembentukan cadangan yang dimaksud. Besarnya cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diaktakan dengan akta notaris No. 32, tanggal 10 Juni 2011 oleh Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham menyetujui pembentukan cadangan saldo laba sebesar Rp70 miliar (setara dengan AS\$8.217.892).

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diaktakan dengan akta notaris No. 2, tanggal 1 Juni 2012 oleh Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham menyetujui penambahan cadangan saldo laba sebesar Rp1.212 miliar (setara dengan AS\$129.861.780).

Tidak ada penambahan cadangan wajib selama periode 2017 dan 2016.

21. PENJUALAN BERSIH

	2017	2016
Pihak ketiga:		
Penjualan batubara ekspor	232,087,974	129,819,278
Penjualan batubara lokal	9,686,095	3,797,389
	<u>241,774,069</u>	<u>133,616,667</u>

Seluruh penjualan batubara dilakukan kepada pihak ketiga.

Lihat (Catatan 34) untuk penjelasan mengenai konsentrasi risiko pada Grup.

Penjualan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari nilai penjualan bersih adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Noble Resources International Pte.Ltd.	118,486,567	133,616,667
Rescom Mineral Trading FZE	<u>103,485,808</u>	-

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

19. SHARE PREMIUM (continued)

Share issuance costs represent costs directly attributable to the issuance of new shares of the Company in respect of the Initial Public Offering of the Company's shares (Note 1b).

20. GENERAL RESERVE

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 1/1995 introduced in March 1995, and amended by Law No. 40/2007 in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a company's issued and paid up capital. There is no time limit on the establishment of such reserve. The general reserve is determined by the General Meeting of Shareholders.

Based on the Annual General Meeting of Shareholders which was notarised by Deed No. 32 dated 10 June 2011 by Fathiah Helmi, S.H., the shareholders approved the forming of a retained earnings reserve amounting to Rp70 billion (equivalent to US\$8,217,892).

Based on the Annual General Meeting of Shareholders which was notarised by Deed No. 2 dated 1 June 2012 by Fathiah Helmi, S.H., the shareholders approved an addition to the retained earnings reserve amounting to Rp1,212 billion (equivalent to US\$129,861,780).

There has been no addition to general reserve during 2017 or 2016.

21. NET SALES

	2017	2016	
Third parties: Export coal sales			
Local coal sales			
	<u>241,774,069</u>	<u>133,616,667</u>	

All coal sales are made to third parties.

Refer to (Note 34) for explanation regarding concentration of risk in the Group.

Sales transactions with customers which exceed 10% of total net sales were as follows:

	2017	2016	
Noble Resources International Pte.Ltd.	118,486,567	133,616,667	
Rescom Mineral Trading FZE	<u>103,485,808</u>	-	

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/64 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

22. BEBAN POKOK PENJUALAN

22. COST OF GOODS SOLD

	2017	2016	
Overburden dan pemrosesan batubara	88,643,212	56,062,099	Overburden and coal processing
Penyusutan dan amortisasi	35,767,599	33,925,864	Depreciation and amortisation
Royalti kepada Pemerintah	17,506,704	8,223,611	Royalty to Government
Penurunan/(kenaikan) persediaan batubara	8,962,023	(54,571,078)	Decrease/(increase) in coal inventory
Lainnya	219,847	168,317	Other
	151,099,385	43,808,813	

Pemasok yang memiliki transaksi pembelian barang dan jasa melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah sebagai berikut:

Suppliers having transactions for purchases of goods and services of more than 10% of total net sales are the following:

	2017	2016	
Pihak Ketiga: PT AKR Corporindo Tbk.	-	-	Third party: PT AKR Corporindo Tbk.
	-	-	

23. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

23. SELLING AND MARKETING EXPENSES

	2017	2016	
Pengangkutan dan logistik	9,026,741	6,495,698	Barging and logistics
	9,026,741	6,495,698	

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2017	2016	
Jasa Manajemen	-	34,088	Management fee
Karyawan	1,299,019	1,257,345	Employees
Perlengkapan kantor dan sewa gedung	19,282,546	4,320,391	Office supplies and rental
Transportasi dan perjalanan dinas	26,500	209,677	Transportation and travel
Jasa profesional	1,098,343	3,302,193	Professional fees
Penyusutan (Catatan 11)	20,837	26,164	Depreciation (Note 11)
Lain-lain	158,538	566,185	Others
	21,885,783	9,716,043	

25. BEBAN KEUANGAN

25. FINANCE COSTS

	2017	2016	
Biaya bunga	-	-	Interest expenses
Biaya transaksi pinjaman	2,000,000	6,000,000	Debt transaction costs
	2,000,000	6,000,000	

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/65 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

26. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN, BERSIH

	2017	2016	
Penyisihan dan beban untuk denda	4,075,269	1,323,143	<i>Provision for penalties and penalty expenses</i>
(Keuntungan)/kerugian selisih kurs, bersih	(409,441)	63,909	<i>(Gain)/loss on foreign exchange, net</i>
Lain-lain, bersih	504,137	(117,852,252)	<i>Others, net</i>
	4,169,965	(116,465,200)	

Pendapatan lain-lain pada periode 2016 mencakup pemulihan pajak dari tahun-tahun sebelumnya dan keuntungan penjualan asset tetap.

Other income in 2016 includes tax recovery from prior years and gain from sale of fixed assets.

27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Grup tidak terhindar dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi terutama dalam hal transaksi rekening koran.

27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

In the normal course of business, the Group unavoidability engages in transactions with related parties particulary in respect of current-account transactions.

a. Saldo transaksi rekening koran pihak berelasi

	2017	2016	
Tn. Samin Tan	47,908,521	47,908,521	<i>Mr. Samin Tan</i>
Lain-lain	46,874,265	30,190,119	<i>Others</i>
	94,782,786	78,098,640	

b. Kompensasi manajemen inti

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan personil manajemen inti. Kompensasi yang dibayar atau terutang pada Dewan Komisaris dan Direksi Grup atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

a. Related-party current account balance

b. Key management compensation

The Boards of Commissioners and Directors of the Company are considered as the key management personnel. The compensation paid or payable to in relation there to follows:

	2017	2016	
Gaji dan imbalan jangka pendek	348,288	348,545	<i>Salary and other short-term employee benefits</i>

c. Pihak berelasi

Kebijakan Grup terkait penetapan harga untuk transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- uang muka operasi diberikan pada harga perolehan, tanpa bunga dan dalam jangka pendek.

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

c. Related parties

The Group's pricing policies related to the transactions with related parties are as follows:

- *operational advances are provided at cost, non-interest bearing and short-term.*

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/66 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**27. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Entitas/Entities	Hubungan/Relationships	Transaksi/Transactions
PT Samudra Pasific Marine	Entitas dibawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Jasa pengangkutan batubara/ <i>Coal transport services</i>
PT Artha Contractors	Entitas dibawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Jasa loading-unloading batubara/ <i>Coal loading-unloading services</i>
Samin Tan	Manfaat pemilik/ <i>Beneficial owner</i>	Manfaat pemilik/ <i>Beneficial owner</i>
PT Grahalintas Property	Entitas dibawah pengendalian yang sama/ <i>Entity under common control</i>	Uang muka untuk sewa gedung/ <i>Advance for building rent</i>

28. LABA/(RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR

Laba/(rugi) per saham dihitung dengan membagi rugi atau laba bersih komprehensif dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang telah dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

28. BASIC PROFIT/(LOSS) PER SHARE

Profit/(loss) per share is calculated by dividing comprehensive net profit or loss attributable to shareholders by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the relevant year.

	2017	2016	
Laba/(rugi) bersih yang diatribusikan bagi pemegang saham	34,323,560	158,891,258	<i>Net profit/(loss) attributable to the shareholders</i>
Rata-rata pertimbangan jumlah saham biasa yang beredar	<u>17,693,000,000</u>	<u>17,693,000,000</u>	<i>Weighted average number of ordinary sharres outstanding</i>
Laba (rugi) bersih per saham dasar (nilai penuh)	0.002	0.009	<i>Basic profit (loss) per share (full amount)</i>

Grup tidak memiliki saham biasa yang bersifat dilutif selama tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016.

The Group did not have any dilutive ordinary shares during the years ended 31 December 2017 and 2016.

29. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING

a. Perjanjian penambangan, pengangkutan, pemindahan batubara dan lainnya

AKT, sebagai produsen batubara, mengadakan sejumlah perjanjian terkait dengan proses penambangan. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, AKT diharuskan membayar biaya sewa atas peralatan, mesin, perlengkapan dan barang-barang lain yang diperlukan untuk proses penambangan.

29. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Coal mining, transportation, barging, transhipment and other related agreements

AKT, as a coal producer, has entered into a number of mining services agreements to support its owner-mining activities. Under the agreements, AKT is required to pay a rental fee relating to rental of equipment, machinery, appliances and other supplies necessary for performing the mining process.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/67 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**29. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING 29. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (continued) SIGNIFICANT
(lanjutan)**

AKT juga mengadakan perjanjian pengangkutan, transportasi dan pemindahan batubara dengan kontraktor untuk menyediakan jasa transportasi dari area pertambangan AKT ke pelabuhan tujuan ataupun lokasi penumpukan batubara yang telah ditentukan. AKT diharuskan membayar biaya sewa kepada kontraktor, yang dihitung secara bulanan, berdasarkan formulae sesuai dengan jumlah batubara yang diangkut.

AKT has also entered into coal barging, transport and transhipment agreements with contractors to provide coal transportation services from AKT's mining area to certain port destinations or stockpile areas. AKT is required to pay contractors a rental fee, calculated on a monthly basis, based on formulae which includes the amount of coal transported.

Kontraktor/ Contractor	Tipe perjanjian/ Agreement type	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Akhir periode perjanjian/ Contract period end
PT Sinar Bintang Samudra	Pengangkutan batubara/ <i>Coal barge</i>	2016	Dapat diperpanjang untuk jangka waktu satu bulan-satu tahun/Various <i>renewable terms from one month-one year</i>
PT Samudra Pacific Marine	Pengangkutan batubara/ <i>Coal barge</i>	2016	31 Desember/December <i>2018 (shipment by shipment)</i>
PT AKR Corporindo Tbk.	Jual beli bahan bakar/ <i>Fuel Supply and delivery</i>	21 Desember/ December 2012	Sekarang/ <i>Ongoing</i>

b. Perjanjian penggunaan alur pelayaran

Pada tanggal 28 Juli 2011, AKT mengadakan perjanjian penggunaan alur pelayaran pada muara selatan sungai Barito dengan PT Ambang Barito Nusapersada ("ABN").

Perjanjian ini diperbaharui kembali pada tanggal 1 Februari 2017 dan berlaku hingga 31 Januari 2019.

Berdasarkan perjanjian ini, AKT membayarkan imbalan tertentu untuk setiap metrik ton batubara yang dikapalkan melalui muara selatan sungai Barito atas jasa pemeliharaan alur pelayaran tersebut oleh ABN.

b. Channel fee service agreement

On 28 July 2011, AKT entered into a service agreement for the use of shipping lanes at the southern end of the Barito river with PT Ambang Barito Nusapersada ("ABN").

This Agreement was renewed on 1 February 2017 and runs until 31 January 2019.

This agreement requires AKT to pay a fee per metric tonne of coal barged via the southern end of the Barito river for the services of ABN to maintain the shipping channel.

c. Perjanjian Penggunaan Sarana Penumpukan Batubara dengan PT Artha Contractors

Pada tanggal 29 September 2014, telah ditandatangani amandemen 1 terhadap perjanjian ini yang memperpanjang masa berlaku perjanjian sampai dengan 4 Januari 2019. Pada tanggal 13 Januari 2015 ditandatangani amandemen 2 yang mengubah ketentuan mengenai nilai jasa minimum yang harus dibayarkan oleh AKT.

c. Intermediate Stockpile Agreement with PT Artha Contractors

On 29 September 2014, amendment 1 to this agreement has been signed which extends the term of agreement up to 4 January 2019. On 13 January 2015, amendment 2 was signed to amend the provisions concerning the minimum value of services to be paid by AKT.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**29. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING
(lanjutan)**

d. Perjanjian Penjualan dan Jasa Perbaikan Suku Cadang dengan PT United Tractors Tbk.

Pada tanggal 30 Agustus 2013, AKT menandatangani perjanjian dengan PT United Tractors Tbk. untuk penyediaan suku cadang dan jasa perbaikan secara kredit yang dapat dilakukan secara berulang dengan batas maksimum sebesar AS\$12.000.000. Perjanjian ini masih berlaku dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.

e. Perjanjian dengan Noble Resources International Pte.Ltd.

Pada tanggal 16 Agustus 2012, AKT dan Noble melakukan perubahan terhadap perjanjian jual beli coking coal.

Harga jual berdasarkan mekanisme yang mengacu pada harga pasar, indeks dan diratakan dengan harga sementara dan akhir. Perjanjian ini berlaku selama tujuh tahun, mulai dari 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian ini, AKT diharuskan untuk menawarkan harga jual dengan potongan harga tertentu.

Sebagai bagian dari proses PKPU pada tahun 2016, produsen batubara AKT, Noble, mengajukan klaim kreditur untuk pembayaran di muka batubara, namun Administrator untuk PKPU menganggap bahwa kontrak yang relevan di tempat terlalu berat terhadap AKT dan, sesuai dengan ketentuan undang-undang PKPU, Administrator menyatakan bahwa kontrak tersebut batal demi hukum. Pada bulan Juni 2016, AKT menandatangani Perjanjian Kerangka, Perjanjian Stockpile, Perjanjian Offtake ditambah Perjanjian Pengelolaan Saham (Damparan dan Muara Tuhup) dengan Noble.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**29. COMMITMENTS AND SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

d. Spare Parts Sales and Services with PT United Tractors Tbk.

On 30 August 2013, AKT signed an agreement with PT United Tractors Tbk. for providing spare parts and services on revolving credit terms with a maximum amount of US\$12,000,000. This agreement is ongoing and can be renewed as agreed by both parties.

e. Agreements with Noble Resources International Pte. Ltd.

On 16 August 2012, AKT and Noble entered into a coking coal sale and purchase agreement.

Sales prices were based on a mechanism referenced to international market prices, indices and averages with provisional and final pricing. This agreement is valid for seven years from 1 January 2012 until 31 December 2018. Under the agreement and its subsequent amendments, AKT is required to offer selling prices at a certain discount.

As part of the PKPU process in 2016, AKT's then coal offtaker, Noble, submitted creditor claims for coal prepayments, however the Administrator for the PKPU deemed the relevant contracts in place to be too onerous for AKT and, pursuant to the provisions of the PKPU laws, the Administrator declared those contracts null and void in law. In June 2016 AKT entered into a Framework Agreement, Stockpile Agreement, Offtake Agreement plus Stockpile Management Agreements (Damparan and Muara Tuhup) with Noble.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/69 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**29. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING
(lanjutan)**

Pada tanggal 1 Juni 2016 perjanjian dengan Perjanjian No. NRIPL-15714IP yang berlaku sampai dengan lebih lama 31 Desember 2018 atau penjualan sebanyak 57.645 ton coking coal, dan Perjanjian No. NRIPL-15716IP mengenai penjualan batubara sebanyak 760.000 ton *coking coal* perjanjian ini berlaku selama 3 bulan sejak ditandatangani.

Pada bulan April 2017 AKT menghentikan perjanjian yang relevan dan telah memilih untuk menjual/memasarkan batubara itu sendiri atau melalui pedagang.

f. Iuran kehutanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tanggal 4 Februari 2008, seluruh perusahaan yang memiliki aktivitas di dalam area hutan produksi dan hutan lindung namun kegiatannya tidak berhubungan dengan kegiatan kehutanan memiliki kewajiban untuk membayar iuran kehutanan tahunan dengan basis per hektar. Iuran ini berlaku sejak tahun 2008. Grup telah mencatat iuran tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian ini.

30. KONTINJENSI

a. Tuntutan Hukum

I. Arbitrase

Perusahaan, bersama dengan PT Renaissance Capital Asia dan PT Muara Kencana Abadi adalah Tergugat berkaitan dengan klaim/gugatan yang diajukan oleh Transasia Minerals Limited dan Bondline Limited sebagai Penggugat di Majelis Arbitrase dalam hal SIAC arbitrase No. 001 OF 2012 (ARB001/12/FL) dan dalam suatu arbitrase di bawah the UNCITRAL Rules 1976 di Singapura.

29. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (continued)

On 1 June 2016, the coal supply agreement was replaced by Agreement No. NRIPL-15714IP valid until the later of 31 December 2018 or 57,645 million tons of coking coal, and Agreement No. NRIPL-15716IP regarding the sale of 760.000 ton coking coal which is valid for 3 months.

In April 2017 AKT terminated the relevant agreements and has chosen to sell/market coal it self or via traders.

f. Forestry fee

Based on Government Regulation No. 2 dated 4 February 2008, all companies that have activities within protected and productive forest areas that are not related to forestry will have an obligation to pay a forestry fee annually on a per hectare basis. This fee is effective from 2008. The Group has recognised this fee in these consolidated financial statements.

30. CONTINGENCIES

a. Legal Claims

I. Arbitration

The Company, together with PT Renaissance Capital Asia and PT Muara Kencana Abadi are named as the Respondents with regard to certain Claims filed by Transasia Minerals Limited and Bondline Limited as the Claimants before an ad hoc Arbitration Tribunal in the matter of SIAC arbitration No. 001 OF 2012 (ARB001/12/FL) and in the matter of an Arbitration under the UNCITRAL Rules 1976 in Singapore.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

30. KONTINJENSI (lanjutan)

Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam permohonan tanggal 22 Desember 2012 sebagaimana diubah dengan Penambahan Permohonan Penggugat tanggal 29 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

1. menyatakan Tergugat gagal memenuhi kewajiban mereka untuk membayar jumlah penuh dari harga pembelian atas akuisisi saham AKT, PT Mahakam Pertambangan dan PT Indofront Abadi;
2. membatalkan Perjanjian Jual dan Beli Saham, Surat Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Saham Tuhup dan Jaminan Perusahaan berdasarkan Pasal 1267 dan Pasal 1517 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan segala konsekuensinya;
3. memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali seluruh kepemilikan saham dalam AKT, PT Mahakam Pertambangan dan PT Indofront Abadi yang telah dialihkan selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak tanggal pelaksanaan perintah ini, yang diberikan di bawah perintah *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. memberikan Penggugat kompensasi biaya kerusakan dan bunga yang timbul akibat kegagalan Tergugat yang diperkirakan akan sebesar AS\$20 juta; dan
5. memerintahkan Tergugat untuk membayar semua biaya dalam proses arbitrase ini.

Perusahaan menolak klaim ini dan berkeras mempertahankan posisinya.

Pada tahun 2016 majelis arbitrase diturunkan, karena:

Pembatalan kontrak penjualan asli AKT kepada BLEM dan MKA. Ini berarti semua saham milik BLEM dan MKA harus dikembalikan ke Bondline dan Transasia, yang kemudian akan mengambil alih kepemilikan dan pengendalian AKT karena saat ini berdiri (yang secara signifikan disempurnakan oleh investasi dan usaha AKT namun saat ini dibebani dengan hutang dan kewajiban yang signifikan). Ini juga berarti Penjual harus mengembalikan harga pembelian asli ditambah bunga kepada Pembeli.

30. CONTINGENCIES (continued)

The claims against the Respondents, as stipulated in the Claimants petition dated 22 December 2012, as amended by the Claimants' Additional Submission dated 29 January 2013 were as follows:

1. *to declare the Defendants in default of their obligations to pay the full amount of the purchase price for the acquisition of the shares of AKT, PT Mahakam Pertambangan and PT Indofront Abadi;*
2. *to annul the Sales and Purchase of Shares Agreement, the Letters of Tuhup Shares Purchase Agreement Completion and the Corporate Guarantee pursuant to Article 1267 and Article 1517 of the Indonesian Civil Code, with all of its consequences;*
3. *to order the Respondents to transfer back the ownership of all transferred shares in AKT, PT Mahakam Pertambangan and PT Indofront Abadi no later than three working days from the date of the execution of an award, given under the order of exequatur from the Chairman of the District Court of Central Jakarta;*
4. *to award the Claimants compensation of damages costs and interest arising from the Respondents' default, which was estimated shall be in the amount of US\$20 million; and*
5. *to order the Respondents to pay all the expenses of the Arbitration proceedings.*

The Company rejected the claims and vigorously defended its position.

In 2016 the arbitration tribunal handed down its awarded, being:

Rejection of the original contract of sale of AKT to BLEM and MKA. This means all of the shares owned by BLEM and MKA are to be returned to Bondline and Transasia, who would then assume ownership and control of AKT as it currently stands (ie significantly enhanced by AKT's investments and efforts but currently saddled with significant debts and liabilities). It also means the Sellers must return the original purchase price plus interest to the Buyer.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

30. KONTINJENSI (lanjutan)

Namun, jika Pembeli membayar sejumlah AS\$14,3 juta (yang mencakup AS\$10 juta asli yang diklaim tidak dibayar oleh Pembeli, ditambah bunga yang dinilai pengadilan, ditambah biaya pengadilan) dalam 30 hari setelah keputusan tersebut, keputusan tersebut tidak akan dilakukan.

Perusahaan tidak memiliki cukup dana yang tersedia dan dengan demikian tidak dapat memanfaatkan pilihan pembayaran langsung. Para pemegang saham telah berdiskusi dengan Penjual untuk mencari resolusi yang saling memuaskan tanpa mengurangi kontrak.

II. Arbitrase Noble

Gugatan

Grup juga terlibat dalam berbagai tuntutan hukum yang normal dalam kegiatan bisnis Grup. Tidak ada klaim yang signifikan dan manajemen bekerja sama dengan penggugat untuk mencapai penyelesaian.

Noble berpendapat bahwa penghentian kontrak lihat pada catatan 30e tidak sah dan telah memulai proses Arbitrase di SIAC yang mencari antara lain, pengendalian atas 101.000 ton dan kerusakan batubara sebesar AS\$61 juta. Tribunal Arbitrase dan AKT telah mempertahankan hukum Inggris dan penasihat Singapura dan akan dengan penuh semangat menentang klaim/tuduhan tersebut.

b. Undang-Undang Pertambangan No. 4/2009

Pada tanggal 16 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia meloloskan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru ("Undang-Undang"), yang telah disetujui oleh Presiden pada 12 Januari 2009, menjadi UU No. 4/2009. Sistem PKP2B dimana menjadi dasar bagi AKT, sebagai salah satu entitas anak Grup, beroperasi, sudah tidak tersedia bagi para investor untuk masa depan.

30. CONTINGENCIES (continued)

However, if the Buyer was to pay the amount of US\$14.3 million (which includes the original US\$10 million claimed as unpaid by the Buyer, plus tribunal-assessed interest, plus court costs) within 30 days of the decision, the recision would not apply.

The Company did not have adequate immediately available funds and thus was not able to avail of the immediate payment option. The shareholders have been in discussions with the Sellers to seek a mutually satisfactory resolution without revision of the contract.

II. Arbitration Noble

Claims

The Group is involved in various legal proceedings as a normal consequence of its business. None of the claims are significant and management is working with the claimants to achieve resolutions.

Noble contends that the termination of the contracts referred to in note 30e was not valid and has commenced Arbitration proceedings at the SIAC seeking among other things, control over 101,000 tonnes of coal and some US\$61 million of damages. The Arbitration Tribunal has not yet convened and AKT has retained English law and Singapore counsel and will vigorously contest the claims/allegations.

b. Mining Law No. 4/2009

On 16 December 2008, the Indonesian Parliament passed a new Law on Mineral and Coal Mining (the "Law"), which received the assent of the President on 12 January 2009, becoming Law No. 4/2009. The CCoW system under which AKT, one of the Group's subsidiaries, operates, will no longer be available to future investors.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

30. KONTINJENSI (lanjutan)

Undang-Undang mengindikasikan bahwa PKP2B yang ada, seperti yang dimiliki AKT, akan tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak. Terdapat sejumlah permasalahan yang sedang dianalisis pemegang PKP2B, termasuk AKT. Beberapa diantaranya termasuk:

- Undang-Undang baru menjelaskan bahwa PKP2B akan tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak. Namun, Undang-Undang juga menetapkan bahwa PKP2B yang ada harus disesuaikan dalam jangka waktu satu tahun terhadap ketentuan Undang-Undang yang baru (kecuali untuk penerimaan negara—yang tidak didefinisikan, tetapi diasumsikan termasuk royalti dan pajak); dan
- keharusan bagi pemegang PKP2B yang telah memulai aktivitasnya untuk, dalam waktu satu tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang yang baru, menyerahkan rencana kegiatan pertambangan untuk keseluruhan area kontrak. Jika rencana ini tidak dilaksanakan, area kontrak dapat dikurangi menjadi hanya seluas area yang diperbolehkan untuk Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) berdasarkan Undang-Undang yang baru. AKT telah mengajukan rencana kegiatan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dan telah disetujui untuk memanfaatkan sisa area kontrak seluas 21.630 hektar.

Pada bulan Februari 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 22/2010 dan 23/2010 (“PP No. 22” dan “PP No. 23”), sehubungan dengan penerapan Undang-Undang Pertambangan No. 4/2009. PP No. 22 mengatur tentang pembentukan area pertambangan dengan menggunakan IUP. PP No. 23 memperjelas prosedur untuk memperoleh IUP yang baru. PP No. 23 menyatakan bahwa PKP2B yang ada akan tetap diakui oleh Pemerintah, namun demikian perpanjangan atas PKP2B tersebut akan dilakukan melalui penerbitan IUP.

30. CONTINGENCIES (continued)

However, the Law indicates that existing CCoWs, such as that held by AKT, will be honoured. There are a number of issues which existing CCoW holders, including AKT, are currently analysing. Among others these include:

- *the Law notes that existing CCoW will be honoured until their expiration. However, it also states that existing CCoWs must be amended within one year to conform to the provisions of the Law (other than terms relating to State revenue—which is not defined, but presumably includes royalties and taxes); and*
- *the requirement for CCoW holders which have already commenced some form of activity to, within one year of enactment of the Law, submit a mining activity plan for the entire contract area. If this plan is not fulfilled, the contract area may be reduced to that allowed for mining business licences (“Izin Usaha Pertambangan” or “IUP”) under the Law. AKT submitted its plan within the required time frame, and has been approved to utilise the remaining contract area covering 21,630 ha.*

In February 2010, the Government of Indonesia released two implementing regulations for Mining Law No. 4/2009, i.e. Government Regulation No. 22/2010 and 23/2010 (“GR No. 22” and “GR No. 23”). GR No. 22 deals with the establishment of the mining areas under IUP. GR No. 23 provides clarifications surrounding the procedures to obtain the new IUP. GR No. 23 indicates that existing CCoWs will be honoured by the Government although any extension of existing CCoWs will be through the issue of an IUP.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

30. KONTINJENSI (lanjutan)

Pada tanggal 21 Februari 2012, Pemerintah Indonesia mengubah PP No. 23 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24/2012 ("PP No. 24"), yang mengatur mengenai pengalihan IUP, divestasi dan wilayah pertambangan.

Pada tanggal 13 September 2013, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri No. 27/2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha.

Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban divestasi saham asing secara bertahap sehingga pada tahun kesepuluh paling sedikit 51% kepemilikan saham dimiliki oleh peserta Indonesia.

Peraturan ini juga mengatur mengenai perubahan penanaman modal yang terdiri atas (a) perubahan investasi dan sumber pembiayaan, (b) perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA, (c) perubahan anggaran dasar, (d) perubahan Direksi dan Dewan Komisaris. Manajemen berpendapat bahwa ketentuan dalam peraturan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap Grup.

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Mineral No. 4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78/2010 ("PP No. 78") yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi. Peraturan ini memperbarui Peraturan Menteri No. 18/2008 yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM pada tanggal 29 Mei 2008. Meskipun diatur oleh kerangka PKP2B, AKT mungkin diwajibkan mematuhi peraturan ini.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi didalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

30. CONTINGENCIES (continued)

On 21 February 2012, the Government of Indonesia amended GR No. 23 by issuing Government Regulation No. 24/2012 ("GR No. 24"), which regulates the transfer of IUPs, divestment and mining areas.

On 13 September 2013, the Minister of Energy and Mineral Resources issued Ministerial Regulation No. 27/2013 on the Procedures and Determination of Divestment Price as well as Changes in Capital Investment in Mineral and Coal Mining Businesses.

This regulation governs foreign shares divestment partially whereby on the tenth year, 51% of shares at the minimum, will be owned by the Indonesian participants.

This regulation also governs the changes in capital investment which consists of (a) changes in investment and financing sources, (b) changes in company status from foreign investment to domestic investment or vice versa, (c) changes in Articles of Association, (d) changes in the Board of Directors and Commissioners, and (e) changes in shareholders composition. Management believes that the regulation has no significant impact to the Group.

On 20 December 2010, the Government of Indonesia released an implementing regulation for Mining Law No. 4/2009, i.e. Government Regulation No. 78/2010 ("GR No. 78") that deals with reclamation and post-mining activities for both IUP-Exploration and IUP-Production Operation holders. This regulation updates Ministerial Regulation No. 18/2008 issued by the MoEMR on 29 May 2008. Although AKT is governed by the CCoW framework, it may be obliged to comply with this regulation.

An IUP-Exploration holder, among other requirements, must include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a State-owned bank.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

30. KONTINJENSI (lanjutan)

c. Peraturan Pemerintah No. 78/2010

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pasca tambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila diizinkan); dan (4) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Sedangkan untuk jaminan penutupan tambang, sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Menteri ESDM belum menetapkan panduan mengenai jaminan penutupan tambang. Oleh sebab itu, Grup belum menyediakan jaminan penutupan tambang. Namun, Grup telah membentuk cadangan akuntansi sebesar AS\$2 juta pada 31 Desember 2017 dicatat sebagai bagian dari Penyisihan Reklamasi dan Penutupan Tambang.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri No.7/2014 pemegang IUP Operasi-Produksi diharuskan untuk menyediakan jaminan reklamasi dalam bentuk akun bersama, bank garansi atau cadangan akuntansi (jika memenuhi). Perusahaan pertambangan dapat menyediakan jaminan reklamasi dalam belum cadangan akuntansi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dan sudah melepas lebih dari 40% saham yang dimiliki; dan
- b. Total saham yang diterbitkan tidak kurang dari AS\$50.000.000 seperti tercantum dalam akta notaris yang telah disahkan oleh notaris.

30. CONTINGENCIES (continued)

c. Government Regulation No. 78/2010

An IUP-Production Operation holder, among other requirements, must prepare (1) a five-year reclamation plan; (2) a post-mining plan; (3) provide a reclamation guarantee which may be in the form of a joint account or time deposit placed at a State-owned bank, a bank guarantee, or an accounting provision (if eligible); and (4) provide a post-mine guarantee in the form of a time deposit at a State-owned bank.

The requirement to provide reclamation and post-mine guarantees does not release the IUP holder from the requirement to perform reclamation and post-mine activities.

Meanwhile, as at the date of these consolidated financial statements, the MoEMR has not provided guidance with regard to any mine closure guarantee. Hence, the Group has not provided any mine closure guarantee. However, the Group has provided an accounting provision amounting to US\$2 million as at 31 December 2017 recorded as part of Provision for Reclamation and Mine Closure.

MoEMR issued Ministerial Regulation No. 7/2014 stipulates that an IUP-Production Operation holder is required to provide a reclamation guarantee which may be in the form of a joint account or time deposit placed at a State-owned bank, a bank guarantee, or an accounting reserve (if eligible). Reclamation guarantee in the form of an accounting reserve can be provided by a mining company if the following criteria are met:

- a. Registered on Indonesian Stock Exchange and has placed more than 40% from total owned stock; and
- b. Has an issued share capital of not less than US\$50,000,000 as stated in the notarial deed and/or authorised by a notary.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/75 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

30. KONTINJENSI (lanjutan)

d. Peraturan Menteri No. 28/2009

Pada bulan September 2009, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 28/2009, yang salah satu isinya memperketat penggunaan perusahaan afiliasi atau entitas anak sebagai penyedia jasa kontraktor pertambangan dan mengharuskan persetujuan pemerintah untuk penggunaan perusahaan afiliasi sebagai jasa kontraktor pertambangan.

Peraturan tersebut memberikan pengecualian hanya bila tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang mampu beroperasi di daerah tersebut. Peraturan tersebut memberikan waktu masa transisi selama tiga tahun untuk perubahan terhadap perjanjian yang berlaku saat ini. Manajemen berpendapat bahwa Grup telah mematuhi peraturan ini karena Grup tidak menggunakan afiliasi atau entitas anak sebagai kontraktor pertambangan.

e. Peraturan Menteri No. 17/2010

Pada tanggal 23 September 2010, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 17/2010 yang diantaranya menjelaskan mekanisme untuk menentukan *Indonesian Minerals and Coal Benchmark Price* ("IMCBP"), sebagai salah satu peraturan pelaksana UU No. 4/2009. Peraturan ini berlaku efektif pada tanggal 23 September 2010.

Royalti kepada Pemerintah akan dihitung berdasarkan mana yang lebih tinggi antara harga jual aktualnya dan IMCBP, seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri No. 17/2010.

Pada tanggal 24 Maret 2011, DJMBP menerbitkan peraturan No. 515.K/32/DJB/2011 yang berisi tentang mekanisme perhitungan *Coal Benchmark Price* untuk kontrak spot dan penjualan berjangka.

DJMBP akan menentukan dan memperbarui *Coal Benchmark Price* bulanan untuk kontrak spot penjualan sesuai dengan harga pasar (berdasarkan pengakuan global dan indeks batubara Indonesia dalam kasus batubara).

Untuk kontrak jangka panjang, harga penjualan batubara ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari *Coal Benchmark Price* untuk tiga bulan sebelumnya.

30. CONTINGENCIES (continued)

d. Ministerial Regulation No. 28/2009

In September 2009, the MoEMR issued Ministerial Regulation No. 28/2009 which, among others, sets strict criteria for mining companies use of 'Affiliates' or 'Subsidiaries' as their mining contractors and requires government approval to use an affiliate as a mining contractor.

The regulation provides exceptions only when no other capable mining service companies operate in the area. The regulation provides a three year transition period for changes to existing arrangements. Management believes that the Group has complied with this regulation as the Group does not use affiliates or subsidiaries as mining contractors.

e. Ministerial Regulation No. 17/2010

On 23 September 2010, the MoEMR issued Ministerial Regulation No. 17/2010 which amongst other matters outlines the mechanism for determining the Indonesian Minerals and Coal Benchmark Price ("IMCBP"), as one of the implementing regulations to the Mining Law No. 4/2009. It was effective on 23 September 2010.

Royalties to the Government will be calculated based on the higher of the actual sales price and the IMCBP as further explained in Ministerial Regulation No. 17/2010.

On 24 March 2011, the DGMCG issued regulation No. 515.K/32/DJB/2011 outlining the formula mechanism of Coal Benchmark Price for spot and term sales contracts.

The DGMCG will determine and update the monthly Coal Benchmark Price for spot sales contracts in accordance with market prices (based on a basket of recognised global and Indonesian coal indices in the case of coal).

For long-term contracts, the coal sales price is determined based on the weighted average of the Coal Benchmark Price for the preceding three months.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

30. KONTINJENSI (lanjutan)

Perusahaan pertambangan batubara diminta untuk memberitahu DJMBP tentang usulan harga jual sebelum penandatanganan perjanjian penjualan jangka panjang. Harga Batubara Acuan berlaku untuk IUP-Operasi Produksi, IUP-Khusus Operasi Produksi dan pemegang PKP2B.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Harga Batubara Acuan hanya memberikan panduan untuk berbagai kelas batubara termal. Belum ada konfirmasi mekanisme untuk penetapan harga patokan untuk *coking coal* (satu-satunya lini produk Grup).

Pada tanggal 26 Agustus 2011, DJMBP menerbitkan peraturan No. 999.K/30/DJB/2011, diubah dengan peraturan No. 644.K/30/DJB/2013 tertanggal 21 Maret 2013, terkait tata cara penetapan besaran biaya penyesuaian Coal Benchmark Price terkait royalti.

Grup berkeyakinan bahwa peraturan ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

f. Peraturan Menteri No. 34/2009

Pada bulan Desember 2009, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 34/2009 yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk menjual sebagian hasil produksinya kepada pelanggan domestik (“Domestic Market Obligation” atau “DMO”).

Peraturan Menteri ini menyediakan sistem “cap and trade” dimana perusahaan pertambangan yang melebihi kewajiban DMO dapat menjual/mentransfer kredit DMO untuk perusahaan pertambangan lain yang tidak dapat memenuhi komitmen DMO. Mekanisme penetapan harga untuk kredit DMO akan ditentukan berdasarkan ketentuan komersial.

30. CONTINGENCIES (continued)

A coal mining company is required to notify the DGMCG of the proposed sales price before signing long-term sales agreements. The Coal Benchmark Price is valid for IUP-Production Operation, IUP Special Mining Business Licence Production Operation and CCoW holders.

Up to the date of these consolidated financial statements, the Coal Benchmark Price only provides guidance for various grades of thermal coal. There has been no confirmation of the mechanism for setting a benchmark price for coking coal (the Group's sole product line).

On 26 August 2011, the DGMCG issued regulation No. 999.K/30/DJB/2011, amended by regulation No. 644.K/30/DJB/2013 dated 21 March 2013, outlining the mechanism of Coal Benchmark Price cost adjustments related to royalty calculations.

The Group believes that this regulation does not have significant impact to the Group's consolidated financial statements.

f. Ministerial Regulation No. 34/2009

In December 2009, the MoEMR issued Ministerial Regulation No. 34/2009, which provides a legal framework to require mining companies to sell a portion of their output to domestic customers (“Domestic Market Obligation” or “DMO”).

This regulation provides for a “cap and trade” system whereby mining companies that exceed their DMO obligations may sell/transfer DMO credits to a mining company that is unlikely to meet its DMO commitment. The pricing mechanism for DMO credits is to be determined on commercial terms.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

30. KONTINJENSI (lanjutan)

Mekanisme perdagangan kredit DMO telah diklarifikasi melalui Surat Edaran No. DJMBP 5055/30/DJB/2010 tanggal 29 November 2010, yang mengatur bahwa kredit DMO dapat ditransfer antar perusahaan pertambangan dengan persetujuan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, termasuk kredit yang dimiliki oleh pedagang atas nama perusahaan pertambangan.

DMO biasanya disesuaikan dengan produksi aktual dan penggunaan rumah tangga yang sebenarnya dan pada 2014, 2015, 2016 dan 2017 pasokan dalam negeri di kontrakkan dianggap memadai dan tidak ada DMO yang diberlakukan untuk pasokan umum.

g. Peraturan Pemerintah No. 9/2012

Pada tanggal 6 Januari 2012, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai penerimaan negara bukan pajak No. 9/2012 yang menggantikan peraturan No. 45/2003. Peraturan ini memberikan penjelasan mengenai iuran eksplorasi dari bisnis logam mineral dan komoditas batubara yang sebelumnya tidak diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 45/2003. Sebagai tambahan, peraturan ini juga memberikan arahan untuk imbalan tetap lainnya terkait dengan aktivitas logam mineral dan komoditas batubara dan imbalan lainnya yang tidak terkait dengan komoditas seperti kompensasi untuk informasi terkait dengan IUP dan IUPK area eksplorasi, biaya penggantian untuk penambangan batubara tertutup dan porsi bagian Pemerintah (4%) dari pemegang IUPK-Operasi Produksi berdasarkan pendapatan bersihnya.

Pemegang PKP2B diperkirakan akan melanjutkan penggunaan tarif sesuai kontrak karya.

h. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 714.K/30/DJB/2014

Berdasarkan PKP2B, AKT diperbolehkan untuk mengeksport hasil produksi batubaranya. Pada tanggal 12 Agustus 2014, DJMB menerbitkan peraturan No. 714.K/30/DJB/2014, yang mengatur mengenai kewajiban pemegang kontrak karya harus terdaftar sebagai eksportir terdaftar sebelum Perusahaan mengeksport batubara ke luar negeri. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, Grup telah menyelesaikan hutang Royalti, dan memenuhi semua hal dalam peraturan ini, dan mendapatkan ijin eksportir terdaftar.

30. CONTINGENCIES (continued)

The mechanism for trading DMO credits has been clarified in Circular Letter of DGMCG No. 5055/30/DJB/2010 dated 29 November 2010, which provides that DMO credits can be transferred between mining companies with the approval of the Directorate General of Minerals, Coal and Geothermal, including credits held by traders on behalf of a mining company.

The DMO is usually adjusted for actual production and actual domestic use and in 2014, 2015, 2016 and 2017 contracted domestic supply was deemed adequate and no DMO was enforced across the board.

g. Government Regulation No. 9/2012

On 6 January 2012, the Government of Indonesia released a regulation for non-tax state revenue No. 9/2012 which replaced the previous regulation No. 45/2003. This regulation provides clarification re obligation for fees on metal mineral and coal commodities business which previously had not been set in GR No. 45/2003. In addition, it also provides guidelines on other fixed fees related to metal mineral and coal mine activities and other fees which are not related to commodities, such as compensation for information related to IUP and IUPK exploration areas, replacement costs for closed coal mines and to pay a portion of the Government's share (4%) from IUPK-Production Operation holders based on their net income.

The CCoW is expected to continue using the rates specified in the CCoW.

h. Directorate General of Minerals and Coals Regulation No. 714.K/30/DJB/2014

Pursuant to its CCoW, AKT is permitted to export its coal production. On 12 August 2014, the DGMCG released regulation No. 714.K/30/DJB/2014, which deals with the requirement of CCoW holders to be registered as an registered exporter before the Company can export its coals to foreign customers. As of the date of these consolidated financial statements, the Group has settled all outstanding Royalties, and met all requirements under this law, and has obtained registered exporter status.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/78 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**31. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING**

**31. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN
FOREIGN CURRENCIES**

						2017	
						Mata uang asing/ Foreign Currencies	Monetary assets in foreign currencies
Aset moneter dalam mata uang asing							
Kas dan setara kas	Rupiah	28,017,842,598	2,068,043	Rupiah			Cash and cash equivalents
	Euro	6,525,534	7,790,189	Euro			
	Dolar Australia	2	2	Australian Dollars			
	Dolar Singapura	2	1	Singapore Dollars			
Piutang Usaha	Rupiah	3,013,746,373	222,450	Rupiah			Account Receivable
Jumlah asset moneter dalam mata uang asing		31,038,114,509	10,080,685				Total monetary assets in foreign currencies
Liabilitas moneter dalam mata uang asing							Monetary liabilities in foreign currencies
Utang usaha	Rupiah	117,721,501,213	8,689,216	Rupiah			Trade payables
	Euro	2,340,495	2,794,085	Euro			
Beban yang masih dibayar	Rupiah	-	-	Rupiah			Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing		117,723,841,708	11,483,301				Total monetary liabilities in foreign currencies
Aset (liabilitas) moneter dalam mata uang asing, bersih							Net monetary assets (liabilities) in foreign currencies, net
	Rupiah	(86,689,912,242)	(6,398,723)	Rupiah			
	Euro	4,185,039	4,996,104	Euro			
	Dolar Australia	2	2	Australian Dollars			
	Dolar Singapura	2	1	Singapore Dollars			
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing, bersih		86,685,727,199	(1,402,616)				Total net monetary liabilities in foreign currencies, net
						2016	
						Mata uang asing/ Foreign Currencies	Monetary assets in foreign currencies
Aset moneter dalam mata uang asing							
Kas dan setara kas	Rupiah	9,974,310,459	742,357	Rupiah			Cash and cash equivalents
	Euro	810	854	Euro			
	Dolar Australia	36	26	Australian Dollars			
	Dolar Singapura	73	51	Singapore Dollars			
Jumlah asset moneter dalam mata uang asing		9,974,311,378	743,288				Total monetary assets in foreign currencies

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/79 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**31. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING (lanjutan)**

Liabilitas moneter dalam mata uang asing				Monetary liabilities in foreign currencies	
Utang usaha	Rupiah	-	-	Rupiah	Trade payable
Euro		-	-	Euro	
Dolar		-	-	Australian Dollars	
Australia		-	-		
Dolar		-	-	Singapore Dollars	
Singapura		-	-		
Pound		-	-	Great Britain Pound	
Sterling		-	-		
Inggris		-	-		
Beban yang masih dibayar	Rupiah	_____	_____	Rupiah	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing		_____	_____		Total monetary liabilities in foreign currencies
Aset (liabilitas) moneter dalam mata uang asing, bersih					Net monetary assets (liabilities) in foreign currencies, net
	Rupiah	9,974,310,459	742,357	Rupiah	
	Euro	810	854	Euro	
	Dolar Australia	36	26	Australian Dollars	
	Dolar Singapura	73	51	Singapore Dollars	
	Pound				
	Sterling			Great Britain Pound	
	Inggris	_____	_____		
Jumlah liabilitas moneter dalam mata uang asing, bersih		9,974,311,378	743,288		Total net monetary liabilities in foreign currencies, net

Pada tanggal 31 Desember 2017, jika mata uang asing melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar AS dengan variabel lain konstan, laba/(rugi) sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih tinggi atau rendah sebesar AS\$1.081.313 atau AS\$1.210.580 (2016: AS\$443.655 atau AS\$542.224) terutama diakibatkan keuntungan/(kerugian) dari penjabaran kas dan setara kas, utang usaha, dan beban yang masih harus dibayar dalam mata uang Rupiah.

Grup tidak menyelenggarakan program lindung nilai secara formal karena seluruh penjualan dan sebagian besar pengeluaran Grup adalah dalam mata uang Dolar AS.

32. PELAPORAN SEGMENT

Manajemen, dalam konsultasi dengan Direksi, telah menentukan bahwa Grup hanya memiliki satu laporan segmen untuk tambang batubara. Informasi pada kinerja keuangan dan aset bersih telah diungkapkan dalam laporan laba rugi dan posisi keuangan konsolidasian.

31. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

As at 31 December 2017, if the foreign currency had weakened/strengthened by 10% against the US Dollar with all other variables held constant, pre-tax profit/(loss) for the year would have been US\$1,081,313 or US\$1,210,580 higher or lower (2016: US\$443,655 or US\$542,224), mainly as a result of foreign exchange gains/(losses) on translation of cash and cash equivalents, trade payables and accrued expenses denominated in Rupiah.

The Group does not enter into any formal hedging arrangements to protect the risk of Rupiah fluctuation since all sales and a large portion of the Group's expenditures are in US Dollars.

32. SEGMENT REPORTING

Management, in consultation with the Board of Directors, has determined that the Group has only a single reportable segment, being coal mining. Information on financial performance and net assets is presented in the consolidated statements of comprehensive income and financial position.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/80 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

32. PELAPORAN SEGMENT (lanjutan)

Penjualan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

	2017	2016	
Pasar geografis			<i>Geographical market</i>
Internasional			<i>International</i>
Asia	103,485,808	118,818,740	Asia
Eropa	128,602,167	11,000,538	Europe
	<u>232,087,975</u>	<u>129,819,278</u>	
Domestik			<i>Domestic</i>
	9,686,095	3,797,389	
	-	-	
	<u>241,774,070</u>	<u>133,616,667</u>	

33. KONSENTRASI RISIKO

Selama tahun 2017 dan 2016 pendapatan Grup berasal dari penjualan batubara kepada Noble sebagai agen pemasaran dengan persentase masing-masing sebesar 49% dan 99%. Pembeli akhir dari penjualan batubara Grup sebagian besar berlokasi di Cina dan India.

Manajemen Grup terus berusaha untuk meningkatkan basis pelanggannya.

32. SEGMENT REPORTING (continued)

Sales by destination are as follows:

33. CONCENTRATION OF RISK

During 2017 and 2016, the Group's revenue was earned from coal sales to Noble as the marketing agent with a percentage of 49% and 99% respectively. The end buyers of the Group's coal sales are mostly located in China and India.

The Group's management are continuing the efforts to expand the customer base.

34. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan kas dan setara kas, kas di bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, uang jaminan, piutang dari pihak berelasi dan pinjaman kepada pihak berelasi sebesar AS\$179 juta (2016: AS\$53 juta) sebagai pinjaman dan piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban yang masih harus dibayar, utang sewa pembiayaan dan pinjaman sebesar AS\$789 juta (2016: AS\$1.591 juta) sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

34. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 December 2017, the Company and its subsidiaries classified its cash and cash equivalents, restricted cash in banks, trade receivables, refundable deposits, amounts due from related party and loans to related parties amounting to US\$179 million (2016: US\$53 million) as loans and receivables.

As at 31 December 2017, the Company and its subsidiaries classified its short-term loan, trade payables, accrued expenses, finance lease payables, and borrowings amounting to US\$789 million (2016: US\$1,591 million) as financial liabilities carried at amortised cost.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kegiatan usaha Grup secara inheren dipengaruhi oleh berbagai jenis risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar, risiko harga dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas.

Pengelolaan risiko dipimpin oleh Dewan Direksi yang mengidentifikasi, mengevaluasi dan menentukan kebijakan untuk pengelolaan risiko keuangan jika dipandang perlu, dan menetapkan prinsip-prinsip untuk pengelolaan risiko secara keseluruhan, termasuk risiko pasar, kredit dan likuiditas.

Risiko pasar

i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Penjualan, pendanaan dan sebagian besar pengeluaran Grup ditransaksikan dalam mata uang Dolar AS, yang secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami (*natural hedging*) terhadap eksposur fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Manajemen berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah/Dolar AS tidak berdampak signifikan terhadap Grup karena hanya kurang sekitar 20% dari pengeluaran Grup yang terjadi dalam mata uang Rupiah, sedangkan keseluruhan penjualan Grup dilakukan dengan mata uang Dolar AS.

Lihat (Catatan 32) untuk sensitivitas dari eksposur Grup terhadap kurs mata uang asing.

ii) Risiko harga

Grup terekspos oleh fluktuasi harga *coking coal* yang mana dapat berdampak ke kinerja operasi dan keuangan. Pada dasarnya harga *coking coal* ditentukan oleh permintaan dan penawaran komoditas dunia dan faktor lain seperti permintaan baja. Grup secara proaktif mengelola risiko-risiko ini dan melakukan penyesuaian seperlunya, berdasarkan penetapan harganya pada indeks-indeks internasional, seperti strategi penumpukan persediaan batubara, rencana pertambangan dan jadwal pengiriman, jadwal dan operasi pertambangan untuk mengurangi dampak fluktuasi tersebut.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group's activities are inherently subject to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk, commodity price risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk.

Risk management is led by the Board of Directors, which identifies, evaluates and sets the policies for the management of financial risks, where appropriate; and provides the guiding principles for managing the overall risks, including market, credit and liquidity risks.

Market risk

i) Foreign exchange risk

The majority of the Group's sales, financing and the majority of its costs and operating expenditure are transacted in US Dollars, which indirectly represents a natural hedge on exposure to fluctuations in foreign exchange rates.

Management is of the opinion that the volatility in the Rupiah/US Dollars exchange rate is not likely to have a significant impact on the Group, as only an estimated 20% of the Group's costs and operating expenditures are transacted in Rupiah, while most of its sales are transacted in US Dollars.

Refer to (Note 32) for the sensitivity of the Group's exposure to foreign currencies.

ii) Price risk

The Group is exposed to fluctuations in coking coal prices, and price fluctuations may affect its operation and financial performance. Fundamentally, coking coal prices are determined by the worldwide supply and demand of the commodity and other factors such as world steel demand. The Group pro-actively manages these risks via, among other things, basing its pricing on International indices, adjusting its stockpiling, mine plan and shipping schedules, production schedule and mining operations as necessary to reduce the impact of any volatility.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

iii) Risiko tingkat suku bunga

Grup memiliki sebagian pinjaman dengan tingkat suku bunga variabel sehingga Grup terekspos risiko suku bunga arus kas. Untuk mengurangi risiko perubahan tingkat suku bunga yang menyebabkan adanya ketidakpastian arus kas terhadap pembayaran beban bunga di masa depan, Grup:

- (a) Memonitor tingkat suku bunga di pasar; dan
- (b) Mengimplementasikan manajemen kas untuk meminimalkan beban bunga.

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup yang terpengaruh oleh risiko suku bunga:

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

iii) *Interest rate risk*

The Group has certain borrowings that are subject to variable interest rates, as such the Group is exposed to cash flow interest rate risk. In order to minimise interest rate risks which increase the uncertainty of the cash flows for interest payments in the future, the Group:

- (a) *Monitors interest rates in the market; and*
- (b) *Implements cash management measures to minimise interest expenses.*

The following table presents a breakdown of the Group's financial assets and financial liabilities on which interest rate risks may have an impact:

	2017						Assets Cash and cash equivalents	
	Suku bunga mengambang/ Floating rate		Suku bunga tetap/ Fixed rate		Tanpa bunga/ Non- Interest Bearing	Jumlah/ Total		
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ Greater than one year	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun/ Greater than one year				
Aset								
Kas dan setara kas	25,264,855	-	-	-	1,626,833	26,891,688	Restricted cash in banks	
Kas di bank yang dibatasi penggunaanya	-	-	-	-	22,875	22,875	Trade receivables	
Piutang usaha	-	-	-	-	57,683,070	57,683,070	Refundable deposits	
Uang jaminan	-	-	-	-	-	-	Amount due from related parties	
Piutang dari pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	Loan to related parties	
Pinjaman kepada pihak berelasi	-	-	-	-	-	-		
Jumlah aset keuangan	25,264,855	-	-	-	59,332,778	84,597,633	Total financial assets	
Liabilitas								
Utang PKPU	-	-	-	-	813,817,532	813,817,532	Restructured payable	
Utang usaha	-	-	-	-	12,212,944	12,212,944	Trade payables	
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	13,031,636	13,031,636	Accrued expenses	
Utang sewa pembiayaan	-	-	1,435,676	2,881,232	-	4,316,908	Leases payable	
Pinjaman dari pihak berelasi	-	-	-	-	94,782,786	94,782,786	Loans from related parties	
Pinjaman	-	-	762,820,315	-	-	762,820,315	Borrowings	
Jumlah liabilitas keuangan	-	764,255,991	2,881,232	933,844,898	1,700,982,121		Total financial liabilities	

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/83 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

ii) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

iii) Interest rate risk (continued)

	2016						Assets Liabilities	
	Suku bunga mengambang/ <i>Floating rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed rate</i>		Tanpa bunga/ Non- Interest Bearing	Jumlah/ Total		
	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>Greater than one year</i>	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	Lebih dari satu tahun/ <i>Greater than one year</i>				
Aset								
Kas dan setara kas	4,313,652	-	-	-	340,516	4,654,168	<i>Cash and cash equivalents</i>	
Kas di bank yang dibatasi dibatasi penggunaanya	-	-	-	-	23,152	23,152	<i>Restricted cash in banks</i>	
Piutang usaha	-	-	-	-	48,695,007	48,695,007	<i>Trade receivables</i>	
Uang jaminan	-	-	-	-	-	-	<i>Refundable deposits</i>	
Piutang dari pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	<i>Amount due from related parties</i>	
Pinjaman kepada pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	<i>Loan to related parties</i>	
Jumlah aset keuangan	4,313,652	-	-	-	49,058,675	53,372,327	Total financial assets	
Liabilitas								
Utang PKPU	-	-	-	-	813,817,532	813,817,532	<i>Restructured payable</i>	
Utang usaha	-	-	-	-	4,643,779	4,643,779	<i>Trade payables</i>	
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	-	-	<i>Accrued expenses</i>	
Utang sewa pembiayaan	-	-	1,493,553	2,881,232	13,386,703	13,386,703	<i>Leases payable</i>	
Pinjaman dari pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	<i>Loans from related parties</i>	
Pinjaman	-	-	760,820,315	-	78,098,640	78,098,640	<i>Borrowings</i>	
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	762,313,868	2,881,232	909,946,654	1,675,141,754	Total financial liabilities	

Risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah eksposur maksimum dari risiko kredit adalah AS\$82.970.801 (2016: AS\$24.863.731). Risiko kredit terutama berasal dari penempatan dana pada bank, deposito berjangka, kas di bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang dari pihak berelasi, pinjaman kepada pihak berelasi dan uang jaminan.

Grup mengelola risiko kredit secara berkesinambungan, mengevaluasi profil kredit dari calon pembeli dan memonitor kinerja kredit mereka secara berkelanjutan.

Credit risk

As at 31 December 2017, total maximum exposure from credit risk was US\$82,970,801 (2016: US\$24,863,731). Credit risk arises from cash in banks, time deposits, restricted cash in banks, trade receivables, amounts due from related party, loans to related parties and refundable deposits.

The Group manages its credit risk by continuously reviewing the credit profile of its buyers and monitoring the credit performance thereof.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/84 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

2017

	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan Mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Piutang usaha	57,683,070	-	-	57,683,070	Trade receivables
	<u>57,683,070</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>57,683,070</u>	

2016

	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Telah jatuh tempo dan Mengalami penurunan nilai/ <i>Past due and Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Piutang usaha	48,695,007	-	-	48,695,007	Trade receivables
Piutang dari pihak berelasi	-	-	-	-	Amounts due from related party
	<u>48,695,007</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>48,695,007</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih dari 30 hari adalah sebesar AS\$ nihil (2016: nihil). Grup tidak memegang jaminan sebagai perlindungan atas piutang usaha.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan dan secara historis mempunyai tingkat piutang bermasalah yang rendah. Perusahaan juga melakukan pertimbangan yang menyeluruh sebelum masuk kedalam perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pembeli.

Kebijakan umum Grup untuk penjualan batubara kepada pelanggan yang sudah ada dan pelanggan baru adalah sebagai berikut:

- Memilih pelanggan (sebagian besar adalah perusahaan produsen baja unggulan) dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik.

As at 31 December 2017, the balance of trade receivables that had been overdue for more than 30 days amounted to US\$ nil (2016: nil). The Group does not hold collateral as security for any trade receivables.

Management is confident in its ability to continue to control and maintain minimal exposure to credit risk, since the Group has clear policies on the selection of customers, and has proven low levels of bad debt records. The Company also does a thorough review before entering into legally binding agreements in relation to coal sales transactions.

The Group's general policies for coal sales to new and existing customers are as follows:

- Selecting customers (mostly blue chip steel producer companies) with a strong financial condition and a good reputation.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/85 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

- Penerimaan pelanggan baru dan penjualan batubara melalui suatu prosedur yang disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kekuasaan Grup.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar pelanggan:

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

- Acceptance of new customers and sales of coal are done by agreed procedures and are approved by authorised personnel according to the Group's delegation of authority policy.

The credit quality of financial assets that are neither past due or has already past due but not impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about customer default rates:

	2017	2016	
Piutang usaha			Trade receivables
Dengan pihak yang tidak memiliki peringkat kredit			Counterparties without external credit rating
Grup 1			Group 1
Grup 2	57,683,070	48,695,007	Group 2
Jumlah piutang usaha yang tidak mengalami penurunan nilai	<u>57,683,070</u>	<u>48,695,007</u>	Total unimpaired trade receivables
Kas di bank dan deposito berjangka			Cash in banks and time deposit
Moody's:			Moody's:
A2	998,498	998,498	A2
Baa2	1,316,587	1,316,587	Baa2
Baa3			Baa3
Fitch:			Fitch:
AAA(idn)			AAA(idn)
AA-(idn)			AA-(idn)
Pefindo:			Pefindo:
idAA+	103,310	103,310	idAA+
idAA	-	-	idAA
idBBB	-	-	idBBB
Tidak memiliki peringkat	-	-	Not rated
	<u>2,418,395</u>	<u>2,418,395</u>	
Kas di bank yang dibatasi penggunaanya			Restricted cash in banks
Moody's			Moody's
A2	23,152	23,152	A2
	<u> </u>	<u> </u>	
Piutang dari pihak berelasi			Amounts due from related parties
Grup 1	-	-	Group 1
Grup 2	-	-	Group 2
	<u> </u>	<u> </u>	
Pinjaman kepada pihak Berelasi			Loans to related parties
Grup 1	-	-	Group 1
Grup 2	-	-	Group 2
	<u> </u>	<u> </u>	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

- Grup 1: pelanggan/pihak berelasi baru (kurang dari enam bulan).
- Grup 2: pelanggan/pihak ketiga/pihak berelasi yang sudah ada (lebih dari enam bulan) tanpa sejarah wanprestasi.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul jika Grup mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan khususnya modal kerja. Pengelolaan risiko likuiditas dengan prinsip kehati-hatian meliputi pemeliharaan kecukupan kas dan setara kas dan aset lainnya yang mudah dikonversikan menjadi kas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan melakukan perencanaan dan pengevaluasian posisi dan arus kas secara berkesinambungan, dan menyesuaikan umur aset dan liabilitas keuangan secara tepat.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan Grup secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 years	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 year	
31 Desember 2017					
Utang PKPU	-	-		813,817,532	31 December 2017 Restructured payable
Utang usaha - pihak ketiga	12,212,944	-		-	Trade payables third parties
Beban yang masih harus dibayar	13,031,636	-		-	Accrued expenses
Utang sewa pembiayaan Pinjaman	762,820,315	1,435,676	-	-	Finance lease payables Borrowings
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 years	Antara 1 dan 2 tahun/ Between 1 and 2 years	Antara 2 dan 5 tahun/ Between 2 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 year	
31 Desember 2016					
Utang PKPU	-	-	-	813,817,532	31 December 2016 Restructured payable
Utang usaha - pihak ketiga	4,643,779	-	-	-	Trade payables - third parties
Beban yang masih harus dibayar	13,386,703	-	-	-	Accrued expenses
Utang sewa pembiayaan Pinjaman	760,820,315	4,694,199	-	-	Finance lease payables Borrowings

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

- Group 1: new customers/third parties/related party (less than six months).
- Group 2: existing customers/third parties/related party (more than six months) without default history.

Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Group has difficulties in obtaining funding especially working capital. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash, cash equivalents and other assets that can be converted to cash quickly. The Group manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The table below analyses the Group's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2017 AND 2016

(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Mengingat sebagian besar kewajiban Grup akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan ke depan, namun manajemen Grup melakukan rencana keuangan yang dapat mengatasi masalah likuiditas. Lihat (Catatan 2a) untuk pengungkapan tentang kemampuan Grup mempertahankan kelangsungan usaha, dan lihat catatan 37a.

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa teknik penilaian. Grup menggunakan berbagai metode penilaian yang ada dan membuat asumsi berdasarkan kondisi pasar yang ada pada tanggal pelaporan.

Salah satu teknik penilaian yang digunakan adalah dengan membandingkan harga pasar aktif atas instrumen lain dengan karakteristik yang serupa. Nilai wajar liabilitas tidak lancar akan dibandingkan dengan nilai pembanding ini. Teknik penilaian instrumen keuangan lain yang digunakan adalah arus kas diskonto. Hasil dari kedua teknik penilaian ini kemudian dipertimbangkan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan.

Untuk tujuan pengungkapan, nilai wajar liabilitas keuangan diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontrak masa depan pada tingkat suku bunga pasar saat ini yang tersedia bagi Grup untuk instrumen keuangan yang serupa.

Tabel dibawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang tidak disajikan Grup pada nilai wajarnya:

31 Desember 2017	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar Fair value	31 Desember 2017
Utang sewa pembiayaan	4,374,785	4,374,785	<i>Finance lease payables</i>
31 Desember 2016			31 December 2016
Utang sewa pembiayaan	4,375,785	4,374,785	<i>Finance lease payables</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar dari utang sewa pembiayaan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga yang dikenakan pada masing-masing utang sewa pembiayaan terakhir.

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan lainnya mendekati nilai wajarnya karena sifat jangka pendek dari instrumen keuangan.

Manajemen risiko permodalan

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Lihat (Catatan 2a) untuk rencana manajemen menghadapi ketidakpastian terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Tidak terdapat perubahan pendekatan manajemen dalam mengelola permodalannya pada tahun berjalan.

Konsisten dengan entitas lain dalam industri sejenis, Grup memonitor modal dengan menggunakan dasar rasio *gearing*. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah utang bersih dengan jumlah modal. Utang bersih dihitung dari total pinjaman (termasuk pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan seperti yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian) dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung dari ekuitas seperti yang ada pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditambah utang bersih.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

The fair value of finance lease payables is measured using discounted cash flows based on the interest rate on the latest finance lease payable.

The carrying amount of other financial assets and liabilities approximates their fair values because of the short-term nature of the financial instruments.

Capital risk management

In managing its capital, the Group safeguards its ability to continue as a going concern and to maximise benefits to the shareholders and other stakeholders.

Please refer to (Note 2a) for management's plan to mitigate the uncertainty of the Group's ability to continue as a going concern.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and returns to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditures and also future capital needs.

There were no changes to the management approach to capital management during the year.

Consistent with other entities in the industry, the Group monitors the capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt divided by total capital. Net debt is calculated as total borrowings (including current, non-current borrowings, and finance lease payables as shown in the consolidated statement of financial position) less cash and cash equivalents. Total capital is calculated as 'equity' as shown in the consolidated statement of financial position plus net debt.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/89 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rasio utang terhadap modal adalah sebagai berikut:

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

As at 31 December 2017 and 2016, the debt to equity ratios are as follows:

	2017	2016	
Jumlah pinjaman	1,705,073,446	1,681,514,501	<i>Total debt</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Kas dan setara kas	26,891,688	4,654,168	<i>Cash and cash equivalents</i>
Total pinjaman bersih	1,678,181,758	1,676,860,333	<i>Total net debt</i>
Total ekuitas	(715,993,428)	(750,316,988)	<i>Total equity</i>
Total modal	962,188,330	926,543,345	<i>Total capital</i>
Rasio gearing	-174%	-180 %	<i>Gearing ratio</i>

36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Pinjaman Jangka Panjang

Pada 31 Maret 2018 perusahaan dan SCB telah menyetujui persyaratan untuk penyelesaian Perjanjian Fasilitas terkait dengan pinjaman Perusahaan untuk investasi dalam ARM plc. Kewajiban yang tersisa (sekitar AS\$750 juta pada 31 Maret 2018) ditampilkan sebagai kewajiban lancar dalam neraca, menunggu realisasi resolusi yang disepakati.

Pada bulan Maret 2018 Grup telah membayar AS\$20.000.000 atas pinjaman terutang sesuai ketentuan yang diatur dalam penyelesaian dan Perusahaan menargetkan penyelesaian dengan SCB pada 31 Oktober 2018.

b. Keputusan PKP2B

Pada 19 Oktober 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan keputusan untuk mencabut izin PKP2B AKT. AKT menggugat keputusan ini secara hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*State Administrative Court*). Putusan yang dikeluarkan pada 13 Desember 2017 yang memungkinkan AKT untuk melanjutkan izin operasinya dan mengharuskan ESDM untuk menunda tindakan penegakan hukum terkait surat yang menunggu keputusan akhir Pengadilan. Keputusan resmi dikeluarkan pada 5 April 2018 yang menyatakan kembali keputusan sementara PTUN tersebut untuk dipatuhi.

Pada bulan Mei 2018, ESDM mengajukan banding atas keputusan PTUN. AKT akan segera merespon dan melanjutkan untuk membela hak – hak hukumnya.

36. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

a. Long Term Borrowings.

As at 31 March 2018 the Company and SCB have arrived at a mutually acceptable resolution of the outstanding debt related to the Company's borrowings for the investment in ARM plc. The remaining liability to SCB (some US\$750 million as at 31 March 2018), is shown as a current liability in the balance sheet, pending realisation of the agreed resolution.

In March 2018 the Group paid US\$20,000,000 towards the outstanding loan under the terms stipulated in the agreed settlement, and the Company expects to settle with SCB by 31 October 2018.

b. CCOW Termination

On 19 October 2017 the Minister of Mines and Energy (ESDM) issued a letter which purported to terminate AKT's CCOW. AKT has contested this decision via a law suit through the State Administrative Court Jakarta (Pengadilan Tata Usaha Negara). An injunction was obtained on 13 December 2017 allowing AKT to continue operations and requiring ESDM to delay any enforcement action related to the letter pending a final decision of the Court. A formal decision was handed down on 5 April 2018 which restates the interim PTUN decision and finds in favour of AKT in all respects.

In May 2018 ESDM filed an appeal against the PTUN decision. AKT will in due course respond and continue to vigorously defend its legal rights.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/90 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

**36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

c. Pergantian Dewan Direksi dan Komite Audit

Pada tahun 2015 Tuan Alexander Ramlie telah mengundurkan diri sebagai Presiden Direktur Perusahaan.

Pada bulan November 2015 Tuan Maxwell Armand telah mengundurkan diri sebagai Direktur Perusahaan dan AKT. Pada Januari 2017 Tuan Maxwell Armand meninggal dunia.

Pada tahun 2015 Tuan Paulus Soedibyo telah mengundurkan diri sebagai Komite Audit .

Karena belum ada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sejak bulan Oktober 2014, hal tersebut akan dibahas pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya dari masing-masing perusahaan.

d. Konsultan Tambang

PT Darma Henwa Tbk. sejak Oktober 2016 ditunjuk sebagai konsultan untuk AKT untuk membantu pengelolaan tambang Tuhup yang menyediakan keahlian dan keahlian manajemen di tempat. Perjanjian ini berlaku selama lima tahun dan akan berakhir pada 2021. Pada akhir 2017 para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini.

e. Kontrak Pasokan Batubara

Pada tahun 2017 AKT menandatangani kontrak pasokan batubara kokas jangka panjang dengan dua pabrik baja di India. Penetapan harga berdasarkan indeks dan volume menunjukkan porsi yang signifikan dari produksi yang direncanakan AKT pada 2018 dan seterusnya.

f. Perpajakan

Pada bulan Mei 2018 AKT mengajukan banding terhadap 12 penilaian kurang bayar PPh 23 di tahun 2012 sebesar Rp.108 miliar (setara AS\$48 juta).

g. DMO

Untuk tahun 2018 target DMO untuk AKT (sebelum penyesuaian produksi aktual) adalah sekitar 300.000 ton.

h. AKT PKPU

Pada bulan Mei 2018 AKT mulai melakukan pembayaran kepada kreditur kecil, sesuai dengan Kesepakatan penyelesaian PKPU.

**36. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)**

c. Change of Directors, Audit Committee

In 2015 Mr Alexander Ramlie resigned as President Director of the Company.

In November 2015 Mr Maxwell Armand resigned as Director of the Company and AKT. In January 2017 Mr Maxwell Armand passed away suddenly.

In 2015 Mr Paulus Soedibyo resigned from the Audit Committee.

As there has not been a General Meeting of the Shareholders of the Company since October 2014, these matters will be addressed at the next General Meeting of Shareholders of the respective companies.

d. Mining Consultant

PT Darma Henwa Tbk. has since October 2016 been appointed as a consultant to AKT to assist with management of the Tuhup mine providing on-site personnel and management expertise. The agreement is for five years and expires in 2021. In late 2017 the parties agreed to terminate this agreement.

e. Coal supply contracts

In 2017 AKT entered into long term coking coal supply contracts with two steel mills in India. Pricing is index based and the volume represents a significant portion of AKT's planned production for 2018 and beyond.

f. Taxation

In May 2018 AKT submitted appeals against 12 assessments for WHT 23 underpayment in 2012 totally Rp.108 billion (equivalent to US\$48 million).

g. DMO

For 2018 the DMO target for AKT (before actual production adjustment) is some 300,000 tonnes.

h. AKT PKPU

In May 2018 AKT commenced making payments to small creditors, pursuant to the PKPU Settlement Agreement.

PT BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/91 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**
(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2017 AND 2016**
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

37. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan ini diotorisasikan untuk diterbitkan sesuai dengan resolusi Direksi Grup tanggal 14 Juni 2018.

37. AUTHORISATION OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board Directors of the Group on 14 June 2018.